



RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis bagi semua pihak dalam rangka mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan serta kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan.

Rencana Penanggulangan Bencana ini mencakup analisis menyeluruh mengenai ancaman bencana yang dihadapi, strategi penanggulangan yang komprehensif, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini juga memuat tujuan dan sasaran yang jelas, serta strategi pencapaian yang dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di daerah ini. Selain itu, dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa semua upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dapat tercipta secara efektif.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik dalam bentuk data, informasi, maupun masukan yang sangat berharga. Dukungan ini sangat penting dalam memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya lengkap dan komprehensif, tetapi juga relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya bersama untuk mewujudkan Kabupaten Way Kanan yang lebih tangguh terhadap bencana.

Dengan tersusunnya dokumen ini, kami berharap dapat memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga warga setempat. Semoga upaya bersama ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, serta mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian ini. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berinovasi dalam penanggulangan bencana demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Way Kanan.

Way Kanan, . . Juli 2024

Bupati Way Kanan

Kepala Pelaksana BPBD Way Kanan

RADEN ADIPATI SURYA

SUFRIANTO, S.AN.
NIP. 198008132002121004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Way Kanan menghadapi berbagai ancaman bencana yang memerlukan perhatian khusus. Bencana yang harus dikurangi resikonya yakni bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, cuaca ekstrem dan banjir bandang dengan tingkat sedang hingga tinggi dalam lima tahun ke depan, prioritas penanggulangan bencana meliputi penguatan data dan informasi kebencanaan, peningkatan sistem dan regulasi, dan penambahan sarana prasarana. Selain itu, integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan tata ruang dan pengembangan kapasitas penanganan darurat juga menjadi fokus utama.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok yang diperoleh dan direkomendasikan, maka dilakukan penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok tersebut untuk mendapatkan hasil analisis akhir berupa isu strategis sebagai capaian RPB dalam 5 tahun ke depan di Kabupaten Way Kanan. Isu strategis adalah sebagai berikut.

1. Perlunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana;
2. Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
3. Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan;
4. Kurangnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta belum optimalnya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

Permasalahan dan isu-isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional.

Terdapat tujuan sebagai jawaban atas masalah pokok (isu strategis) yang dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis yaitu sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan yang optimal dalam rangka mengurangi risiko bencana;
2. Meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan;
3. Mewujudkan integrasi isu bencana dalam rencana pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta anggaran penanggulangan bencana.

Agar pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan dapat terukur, maka selanjutnya ditetapkan sasaran dari Dokumen RPB Kabupaten Way Kanan yaitu sebagai berikut.

1. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan DAS;
2. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air;
3. Terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan hutan untuk mengurangi risiko bencana;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan;
5. Memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah;
6. Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah;
7. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah;
8. Terwujudnya rencana pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana;
9. Meningkatnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana;
10. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang layak;
11. Memperkuat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

Untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan terdapat strategi pencapaian yang berisikan program-program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut.

1. Menyusun dokumen perencanaan tata ruang daerah yang memperhatikan DAS;
2. Penguatan pengelolaan dan pemantauan aliran sungai pada kawasan DAS rawan bencana;
3. Penguatan regulasi dan standar analisis serta integrasi dokumen kajian ke dalam dokumen perencanaan;
4. Penguatan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan;
5. Penguatan pencegahan dan mitigasi bencana daerah;
6. Penguatan upaya penanganan darurat bencana daerah;
7. Pembangunan mekanisme daerah untuk pemulihan pasca bencana;
8. Mengintegrasikan rencana pembangunan dengan Rencana Penanggulangan Bencana;
9. Koordinasi dan kolaborasi multi stakeholder penanggulangan bencana daerah;
10. Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
11. Penguatan upaya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana yang transparan dan akuntabel.

Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai bentuk pengurangan risiko bencana merupakan program kegiatan dalam kebijakan dalam penanggulangan bencana yang disusun bersama oleh seluruh dari pemangku kepentingan daerah (Pemerintah, Dunia Usaha/Industri, Perguruan Tinggi, dan Stakeholder terkait) sebagai bentuk wujud kesepakatan bersama dalam proses upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Way Kanan. Rencana Aksi Daerah disusun menggunakan tabulasi untuk mempermudah pemahaman dan implementasi, serta memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Strategi dalam penyelarasan kegiatan dan program Rencana Aksi Daerah dengan program serta kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan mencantumkan kodefikasi dan Nomenklatur. Sehingga setiap program dan kegiatan disandingkan dengan

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk lima tahun ke depan terdapat 34 program, dengan kegiatan sebanyak 79 kegiatan, dan terdapat 151 sub kegiatan. Selanjutnya untuk rencana pendanaan akan bersumber dari APBN, APBD, hibah, donasi, dan CSR, dengan pengelolaan dana yang sesuai peraturan perundang-undangan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan Kabupaten Way Kanan.

Untuk meningkatkan pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta para pemangku kepentingan terkait, penting bagi program dan kegiatan yang tercantum dalam RPB untuk diintegrasikan dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Way Kanan. Selain itu, RPB juga perlu dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan seluruh *stakeholders* di luar Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dalam kerangka kerja pentahelix. Integrasi dan koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan harmonis dan saling mendukung, guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan bahwa rencana aksi penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, penting bagi BPBD Kabupaten Way Kanan sebagai *leading sector* untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala di setiap masa dan tahapan. Dokumen rencana ini harus terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan terkini di Kabupaten Way Kanan, termasuk perubahan lingkungan serta kemajuan yang dapat mempengaruhi profil risiko bencana. Selain evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja (Renja) bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penanggulangan bencana, serta dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahunan. Langkah-langkah ini memberikan kesempatan bagi mitra pemerintah untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam membangun budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Way Kanan, memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi.

DAFTAR ISTILAH

1. **Adaptasi Perubahan Iklim** adalah Proses perubahan sebagai respon terhadap perubahan iklim.
2. **Analisis Risiko Bencana** adalah Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan.
3. **Ancaman Bencana** adalah Kejadian yang dapat menimbulkan bencana.
4. **Bahaya** adalah Situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di wilayah tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
5. **Perubahan Iklim** adalah perubahan suhu rata-rata Bumi serta perubahan pola cuaca yang terkait, seperti pola hujan, kekeringan, badai, dan lain-lain.
6. **Bantuan Darurat Bencana** adalah Upaya memberikan bantuan saat keadaan darurat.
7. **Bencana** adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau manusia, yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. **Bencana Alam** adalah Bencana akibat peristiwa alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. **Bencana Non Alam** adalah Bencana akibat peristiwa non-alam, seperti gagal teknologi, epidemi, dan kebakaran hutan.
10. **Bencana Sosial** adalah Bencana yang diakibatkan oleh manusia, termasuk konflik sosial dan teror.
11. **Dampak Perubahan Iklim** adalah Kerugian atau manfaat akibat perubahan iklim.
12. **Dana Siap Pakai** adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

13. **Desa/Kelurahan Tangguh Bencana** adalah Wilayah yang mampu menghadapi dan pulih dari bencana.
14. **Indeks Penduduk Terpapar** adalah Jumlah penduduk yang berpotensi terkena dampak bencana.
15. **Kapasitas** adalah Penguasaan sumber daya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, dan memulihkan diri dari akibat bencana.
16. **Kelompok Rentan** adalah Bayi, anak di bawah lima tahun, ibu hamil, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.
17. **Keluarga Tangguh Bencana** adalah Keluarga yang mampu beradaptasi dan pulih dari dampak bencana.
18. **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan ini dapat berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan.
19. **Kerentanan Bencana** adalah Keadaan yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat menghadapi bahaya.
20. **Kerugian** adalah Tingkat kekurangan kemampuan masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu, yang meliputi kerugian sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan.
21. **Kesiapsiagaan** adalah Kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna.
22. **Korban Bencana** adalah Orang atau kelompok yang menderita atau meninggal akibat bencana.
23. **Masyarakat** adalah Perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
24. **Mitigasi** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
25. **Mitigasi Struktural** adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan membangun infrastruktur yang menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya.

26. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
27. **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. **Pemulihan** adalah Kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup pasca bencana dengan melakukan rehabilitasi.
29. **Penanganan Darurat Bencana** adalah upaya yang dilakukan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, serta pemenuhan kebutuhan dasar.
30. **Penanggulangan Bencana** adalah Upaya yang meliputi penetapan kebijakan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
31. **Pencegahan** adalah upaya untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
32. **Pencegahan Bencana** adalah Kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
33. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti akibat dampak bencana.
34. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah Upaya penetapan kebijakan dan kegiatan terkait bencana..
35. **Peringatan Dini** adalah upaya pemberian peringatan kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
36. **Perubahan Iklim** adalah Perubahan iklim akibat aktivitas manusia dan variabilitas alamiah.
37. **Peta** adalah Kumpulan titik, garis, dan area yang didefinisikan dengan sistem koordinat tertentu.
38. **Peta Bahaya** adalah Peta yang menunjukkan potensi bahaya suatu daerah.

39. **Peta Risiko Bencana** adalah Peta yang menunjukkan tingkat risiko bencana suatu daerah.
40. **Prosedur Operasi Standar (SOP)** adalah Upaya terstruktur tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
41. **Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)** adalah Unsur pelaksana operasional pemerintah yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi dan sistem informasi penanggulangan bencana.
42. **Rawan Bencana** adalah Kondisi yang mengurangi kemampuan suatu wilayah untuk mencegah dan menangani dampak bencana.
43. **Rehabilitasi** adalah Perbaikan layanan publik pascabencana.
44. **Rekonstruksi** adalah Pembangunan kembali prasarana pascabencana.
45. **Rencana Kontijensi** adalah Rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi darurat.
46. **Rencana Operasi Darurat Bencana** adalah proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan tindakan teknis.
47. **Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana** adalah dokumen perencanaan yang disusun bersama antara BNPB/BPBD dan pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pasca bencana.
48. **Republik Indonesia** adalah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
49. **Risiko Bencana** adalah Potensi kerugian akibat bencana di suatu wilayah dalam waktu tertentu.
50. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah Jaringan kerja berdasarkan prosedur untuk melakukan kegiatan pada saat kejadian bencana.
51. **Status Keadaan Darurat** adalah Keadaan yang ditetapkan pemerintah daerah untuk menangani bencana.
52. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah Keadaan yang ditetapkan pemerintah untuk jangka waktu tertentu berdasarkan rekomendasi badan yang bertugas.
53. **Tanggap Darurat Bencana** adalah Upaya segera setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

54. **Tingkat Risiko** adalah Perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitasnya untuk mengurangi risiko.
55. **Wilayah Bencana** adalah Wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
BABINSA	Bintara Pembina Desa
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BASARNAS	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BINTER	Bintara Pembina Desa
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPDAS	Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPS	Badan Pusat Statistik
BTS	Base Transceiver Station
BUD	Badan Urusan Desa
BULOG	Badan Urusan Logistik
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CSR	Corporate Social Responsibility
DAS	Daerah Aliran Sungai
DIBI	Data Informasi Bencana Indonesia
Dishub	Dinas Perhubungan
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPD	Demam Berdarah Dengue
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	Focus Group Discussion
FPRB	Forum Pengurangan Risiko Bencana
HA	Hektar
IGD	Instalasi Gawat Darurat
IKD	Indeks Ketahanan Daerah
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat
IRBI	Indeks Rawan Bencana Nasional
IWO	Ikatan Wartawan Online
JTP	Jenis Tindak Pidana
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KKN	Kuliah Kerja Nyata
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Singkatan	Keterangan
KMDP	Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KRB	Kajian Risiko Bencana
KUA	Kebijakan Umum Anggaran
LP2B	Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir
LPPM	Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat
M	Meter
MDMC	Muhammadiyah Disaster Management Center
MEP	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
MM	Milimeter
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PAH	Penampung Air Hujan
PAM	Pengamanan Masyarakat
PARB	Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana
PB	Penanggulangan Bencana
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEMULA	Pemuda Peduli Lingkungan Dan Alam
PERDA	Peraturan Daerah
PERGUB	Peraturan Gubernur
PERKA	Peraturan Kepala
Perkada	Peraturan Kepala Daerah
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PERPRES	Peraturan Presiden
PKB	Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKM	Pengaruh Kerentanan Masyarakat
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PM	Partisipasi Masyarakat
PMI	Palang Merah Indonesia
POLDA	Kepolisian Daerah
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	Prioritas Plafon Anggaran
PPAS	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPGD	Penanggulangan Penderita Gawat Darurat
PPLH	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPU LH	Peraturan Umum Lingkungan Hidup
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
PTD	Pengelolaan Tanggap Darurat

Singkatan	Keterangan
PTP	Pelaku Tindak Pidana
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusdalops	Pusat Pengendali Operasi
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
RAD	Rencana Aksi Daerah
RAN	Rencana Aksi Nasional
RAPBD	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
Renas PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
Renja K/L	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Renja OPD	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Renstra OPD	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Nasional
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUA	Rencana Kebijakan Umum Anggaran
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRI	Radio Republik Indonesia
RS	Rumah Sakit
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
SAR	Search and Rescue
SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SD	Sekolah Dasar
SFDRR	<i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i>
SIG	Sistem Informasi Geografis
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTD	Sistem Komando Tanggap Darurat
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPM	Standar Pelayanan Minimal
STIT	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
TAGANA	Taruna Siaga Bencana
TNI	Tentara Nasional Indonesia

Singkatan

UKM

USGS

UU

WALHI

WMK

Keterangan

Usaha Kecil Menengah

United States Geological Survey

Undang-Undang

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Wilayah Manajemen Kebakaran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
DAFTAR ISTILAH.....	8
DAFTAR SINGKATAN.....	13
DAFTAR ISI.....	17
DAFTAR TABEL.....	19
DAFTAR GAMBAR.....	21
BAB I PENDAHULUAN.....	22
I.1 Latar Belakang.....	22
I.2 Tujuan.....	24
I.3 Kerangka Pikir.....	25
I.4 Kedudukan Dokumen.....	27
I.5 Landasan Hukum.....	30
I.6 Ruang Lingkup.....	33
BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN	
DAERAH.....	35
II.1 Gambaran Umum Wilayah.....	35
II.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah.....	49
II.3 Risiko Bencana Daerah.....	52
II.4 Prioritas Bencana yang Ditangani.....	56
II.5 Analisa Masalah Pokok.....	58
II.6 Rumusan Isu Strategis.....	67
BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULAN BENCANA.....	71
III.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional.....	71
III.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah.....	76
III.3 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana.....	78
III.4 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	107
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN	
PROGRAM.....	110
IV.1 Tujuan dan Sasaran.....	110
IV.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	114
IV.3 Program Penanggulangan Bencana.....	119
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO	
BENCANA.....	124
V.1 Rencana Aksi.....	124
BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI.....	157
VI.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah.....	157

VI.2 Pemasukan ke Perencanaan Lainnya.....	162
VI.3 Pengendalian dan Evaluasi.....	170
BAB VII PENUTUP.....	180
DAFTAR PUSTAKA.....	182
LAMPIRAN.....	184

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Way Kanan.....	38
Tabel II.2	Rata-Rata Curah Hujan Tahunan Kabupaten Way Kanan.....	40
Tabel II.3	Formasi Geologi dan Luasannya di Kabupaten Way Kanan.....	44
Tabel II.4	Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.....	45
Tabel II.5	Lahan Kritis di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.....	47
Tabel II.6	Jumlah Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2022.....	48
Tabel II.7	Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Way Kanan.....	49
Tabel II.8	Tabel Rekapitulasi Bahaya Kabupaten Way Kanan.....	52
Tabel II.9	Tabel Rekapitulasi Penduduk terpapar Kabupaten Way Kanan.....	53
Tabel II.10	Tabel Rekapitulasi Potensi kerugian Kabupaten Way Kanan.....	54
Tabel II.11	Tabel Rekapitulasi Potensi kerugian Kabupaten Way Kanan.....	55
Tabel II.12	Tabel Rekapitulasi Potensi kerugian Kabupaten Way Kanan.....	56
Tabel II.13	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan.....	63
Tabel II.14	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) Kabupaten Way Kanan....	64
Tabel II.15	Relevansi RPJMD Kab.Way Kanan terhadap Penanggulangan Bencana.....	66
Tabel II.16	Pembobotan Isu Strategis.....	69
Tabel III.1	Kebijakan PB dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 – 2044.....	72
Tabel III.2	Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Fase Pra Bencana.....	79
Tabel III.3	Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Fase Saat Bencana/Tanggap Darurat.....	80
Tabel III.4	Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Fase Pascabencana.....	81
Tabel III.5	Peran OPD Kabupaten Way Kanan dalam Fase Pra, Saat, dan Pascabencana.....	82
Tabel IV.1	Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	112
Tabel IV.2	Proyeksi Target Indikator Tujuan 3.....	114
Tabel IV.3	Strategi dan Arah Kebijakan.....	116
Tabel IV.4	Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program.....	120
Tabel V.1	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan.....	126
Tabel VI.1	Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.....	158
Tabel VI.2	Pemaduan Program/Sasaran RPB dalam Perencanaan.....	164
Tabel VI.3	Kerangka Pengendalian dan Evaluasi.....	170

Tabel VI.4	Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi Pengurangan Bencana.....	172
Tabel VI.5	Format Rencana Pemantauan per-Semester Pelaksanaan Aksi Pengurangan Bencana.....	173
Tabel VI.6	Format Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana.....	176
Tabel VI.7	Format Penyajian Hasil Evaluasi Tahunan.....	177
Tabel VI.8	Format Penyajian Hasil Evaluasi Tengah Periode.....	178
Tabel VI.9	Format Penyajian Hasil Evaluasi Tahunan.....	178

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Alur Proses Penyusunan Rancangan Awal Dok.RPB.....	26
Gambar I.2	Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana.....	28
Gambar I.3	Diagram Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.....	30
Gambar II.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Way Kanan.....	37
Gambar II.2	Kondisi Klimatologi Kabupaten Way Kanan.....	39
Gambar II.3	Peta Curah Hujan Kabupaten Way Kanan.....	41
Gambar II.4	Kondisi Topografi Kabupaten Way Kanan.....	42
Gambar II.5	Kondisi Geologi Kabupaten Way Kanan.....	43
Gambar II.6	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan 2020.....	46
Gambar II.7	Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana.....	50
Gambar II.8	Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Way Kanan.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan berdiri pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan yang memiliki luas 3.522,11 km² atau 352.211,37 Ha yang merupakan Kabupaten terluas keempat dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Secara astronomis Kabupaten Way Kanan terletak pada koordinat 104⁰ 17' - 105⁰ 04' Bujur Timur dan 04⁰ 12' – 04⁰ 58' Lintang Selatan. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Way Kanan Menurut Perda No.1 Tahun 2020 Kabupaten Way Kanan memiliki 15 kecamatan, yang terdiri 221 Kampung dan 6 Kelurahan yang dibatasi oleh :

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Utara;
2. Kabupaten Lampung Utara di sebelah Selatan;
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat di sebelah Timur; dan
4. Kabupaten Lampung Barat di sebelah Barat.

Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia telah diwujudkan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang dan menjadi acuan daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah. Sedangkan Renas PB merupakan penjabaran RIPB yang disusun dan ditetapkan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan dalam hal penanggulangan bencana berjangka waktu 5 tahun. Di dalam dokumen Renas PB Tahun 2020-2024 terdapat Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan data Indeks Rawan Bencana Nasional (IRBI). Berdasarkan dokumen IRBI Tahun 2023 Kabupaten Way Kanan memiliki skor indeks risiko bencana sebesar 108,00 termasuk dalam kategori kelas sedang. Sedangkan berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)

BNPB Kabupatén Way Kanan diketahui memiliki sejarah kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim (angin puting beliung), kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028 terdapat ancaman bencana yang berpotensi terjadi seperti gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi wabah penyakit dan COVID-19. Ancaman bencana terutama banjir sering terjadi di Kabupaten Way Kanan dikarenakan sebagian besar wilayah merupakan daerah yang dialiri sungai, sehingga ketika musim penghujan tiba dengan intensitas curah hujan tinggi, daerah tersebut akan mudah terjadi banjir karena laju limpasan air yang cepat.

Permasalahan bencana beserta kemungkinan dampak yang ditimbulkan di Kabupaten Way Kanan, maka diperlukan upaya terencana, terukur, terstruktur, dan terpadu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menghadapi kemungkinan bencana terjadi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Hal ini diatur dalam Pasal 23, Pasal 36, dan Pasal 6 masing-masing perundangan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memiliki perencanaan yang terstruktur dalam upaya penanggulangan bencana. Rencana ini dibuat berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, sehingga memberikan arah kebijakan yang objektif dalam penanggulangan bencana di daerah.

Upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan akan ditingkatkan melalui perencanaan terpadu yang terukur, terstruktur, dan terarah, melibatkan seluruh institusi terkait. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan tahun 2025-2029. Proses penyusunan RPB melibatkan semua pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Way Kanan, mulai dari pengumpulan data, sosialisasi, diskusi kelompok, hingga finalisasi dokumen. RPB akan berfungsi sebagai panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Way Kanan dan pedoman bagi instansi pemerintah lainnya. Selain itu,

RPB juga akan menjadi dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang menetapkan strategi, arah kebijakan, dan program penanggulangan bencana berdasarkan kondisi dan risiko bencana di Kabupaten Way Kanan.

Dalam konteks pelaksanaan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kabupaten Way Kanan, terlibatlah berbagai unsur yang memiliki peran khusus, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, instansi vertikal pemerintah, dan kelompok masyarakat. Kolaborasi ini terwujud melalui diskusi terarah (*focus group discussion*), di mana setiap unsur memberikan masukan dan kajian. Dokumen RPB juga telah disempurnakan melalui saran perbaikan yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahapan asistensi. Integrasi program-program dalam RPB diharapkan dapat segera dilakukan agar sesuai dengan peran masing-masing SKPD dan unsur lembaga lainnya di Kabupaten Way Kanan. Sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta perencanaan sektor lintas sektor akan mendukung rencana pembangunan di daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam penyusunan RPB diharapkan menjadi fokus prioritas dan memberikan masukan bagi program/kegiatan di RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD.

I.2 Tujuan

Dokumen Rencana Penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan :

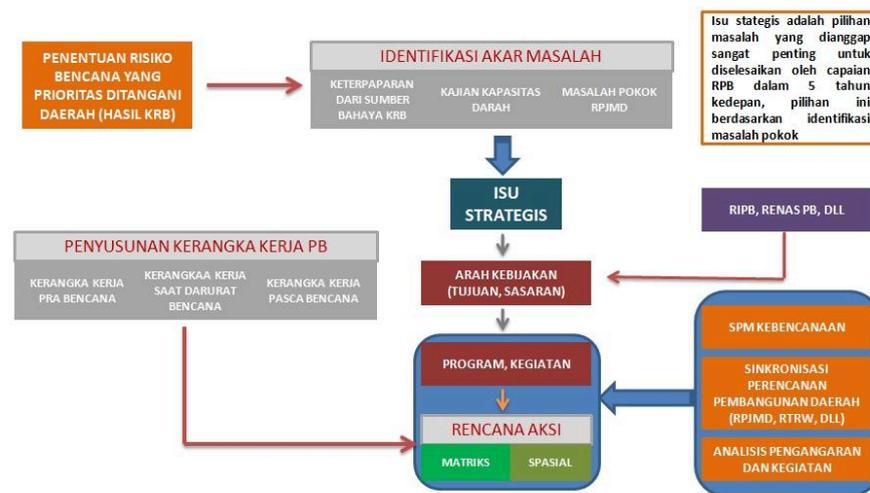
- 1) Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif.
- 2) Sebagai alat koordinasi yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi antar pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan.
- 3) Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

I.3 Kerangka Pikir

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan komprehensif yang menggabungkan kebijakan dan strategi pemerintah dalam mengelola risiko bencana. RPB mencakup berbagai kegiatan dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Untuk menjalankan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif, diperlukan manajemen yang terukur dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan yang terkoordinasi. RPB disusun oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya atau oleh kawasan otoritas tertentu, dengan mengacu pada UU 24 Tahun 2007. Dokumen ini mencakup komponen-komponen seperti pengenalan ancaman bencana, pemahaman kerentanan masyarakat, analisis dampak bencana, tindakan pengurangan risiko, mekanisme kesiapsiagaan, serta alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia untuk penanggulangan bencana dari tahap pra-bencana hingga pasca bencana.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan merupakan suatu dokumen yang sangat penting dalam upaya perencanaan dan penanganan bencana di tingkat kabupaten. Dokumen ini merujuk pada berbagai sumber informasi dan referensi yang relevan, termasuk Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). IKD memberikan gambaran tentang tingkat ketahanan daerah terhadap bencana, sementara KRB memberikan analisis mendalam mengenai potensi dan risiko bencana yang mungkin terjadi. Dalam penyusunannya, RPB juga mengacu pada kewenangan dan peran pemerintah kabupaten serta mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan yang ada. Di antaranya adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rencana pembangunan selama lima tahun, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merencanakan pembangunan untuk periode yang lebih panjang. Selain itu, RPB juga mengaitkan dengan Rencana Strategis (Renstra) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Dengan mengintegrasikan berbagai dokumen ini, RPB bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan upaya

penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terkoordinasi dan efektif, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.



Gambar I.1 Alur Proses Penyusunan Rancangan Awal Dok.RPB

Sumber : Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, BNPB 2020

Alur Proses penyusunan rancangan awal Dokumen RPB Kabupaten Way Kanan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar I.1 akan menjadi sebuah kerangka pikir dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kerangka pikir dimulai dengan penentuan potensi risiko bencana yang menjadi prioritas penanganan di daerah tersebut, yang didasarkan pada hasil Kajian Risiko Bencana (KRB). Setelah potensi bencana teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis akar masalah, yang meliputi tingkat keterpaparan terhadap bencana, kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, serta permasalahan utama yang diungkap dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses ini bertujuan untuk menentukan isu strategis yang kemudian akan membentuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang selaras dengan dokumen-dokumen penting lainnya, seperti Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), dan dokumen kebencanaan terkait di Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya akan ditentukan program dan kegiatan yang disusun dan disinkronisasikan dengan SPM Kebencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

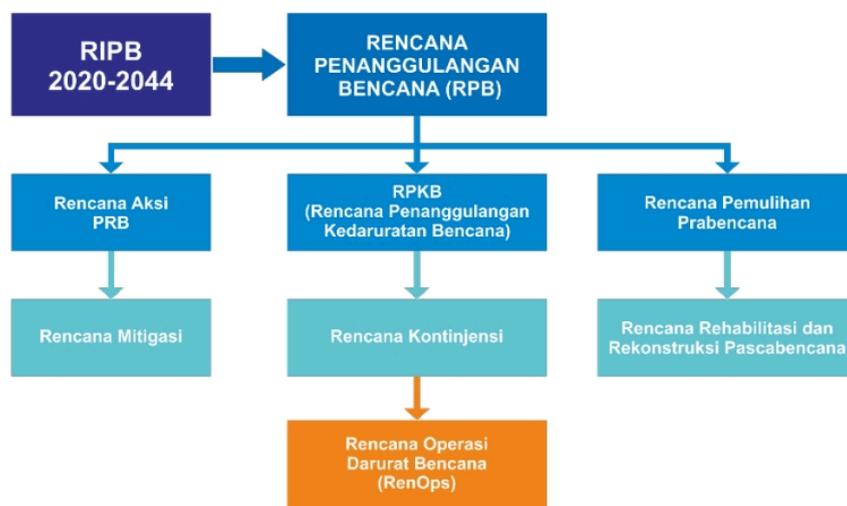
Daerah (RPJMD) Provinsi, RPJMD Kabupaten, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan lainnya serta adanya analisis penganggaran dan kegiatan serta diakhir akan adanya proses penentuan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Rencana Aksi ini memiliki keterhubungan dengan penyusunan kerangka kerja yang didalamnya melibatkan penyusunan kerangka kerja pra bencana, kerangka kerja saat darurat bencana, dan kerangka kerja pasca bencana.

I.4 Kedudukan Dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan salah satu aspek penting dari perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Dalam perencanaan ini, setiap langkah yang diambil merupakan bagian dari program atau kegiatan yang terfokus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Rencana-rencana ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis instansi pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab terpisah, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

Posisi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) diilustrasikan dalam gambar I.2, yang memberikan gambaran jelas mengenai perannya dalam sistem perencanaan. Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana terletak pada hierarki yang terstruktur dengan jelas dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan yang lebih luas. Dalam kerangka Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024, RPB memainkan peran sentral sebagai dokumen operasional yang mendetail. RPB terbagi menjadi beberapa komponen kunci yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan spesifik. Pertama, Rencana Aksi Penanggulangan Bencana (PRB) mencakup berbagai strategi dan langkah-langkah konkret dalam mitigasi, yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana sebelum terjadi. Kedua, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) juga mencakup Rencana Kontinjensi, yang

dirinci lebih lanjut menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps), yang mengatur bagaimana respons darurat harus dilaksanakan selama dan setelah kejadian bencana. Ketiga, Rencana Pemulihan Prabencana berfokus pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang dirancang untuk mengembalikan kondisi pasca bencana ke keadaan normal atau lebih baik. Dengan pembagian ini, setiap elemen dalam RPB berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aspek penanggulangan bencana, dari pencegahan hingga pemulihan, diatur dengan cara yang sistematis dan efisien, memastikan bahwa semua tahap penanggulangan bencana berjalan secara harmonis dan terkoordinasi.



Gambar I.2 Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana

Sumber : Pedoman Penyusunan Dokumen RPB, BNPB 2021

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan disusun sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Prosedur penyusunan RPB ini juga mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPB memiliki periode pelaksanaan yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni lima tahun, dan berfungsi sebagai masukan penting bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan, terutama dalam aspek penanggulangan bencana. Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi instrumen perencanaan yang mandiri, tetapi juga terintegrasi dalam kerangka perencanaan

pembangunan yang lebih luas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Kabupaten Way Kanan.

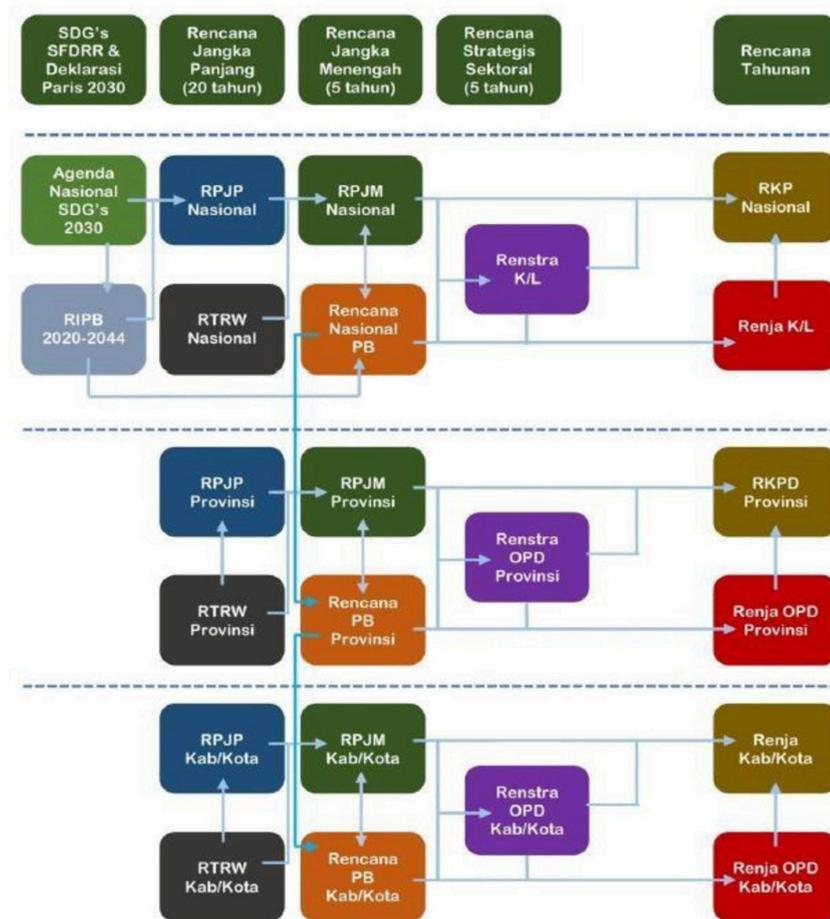
RPB Kabupaten Way Kanan disusun untuk periode lima tahun ke depan, dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen ini merupakan milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan akan menjadi bagian integral dari Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Penanggulangan Bencana. Semua pemangku kepentingan di Kabupaten Way Kanan berkomitmen untuk mengawal proses legislatif RPB ini hingga menjadi peraturan yang mengikat, memastikan pertanggungjawaban, hak, kewajiban, gugatan, dan tanggung jawab terkait penanganan bencana di Kabupaten Way Kanan diatur dengan jelas.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan terjemahan dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana, yang menjadi komitmen dalam Kerangka Aksi Sendai *Framework Disaster Risk Reduction* di tingkat lokal, bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB memuat program/kegiatan terkait pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis OPD, dan RKPD tahunan. RPB menjadi dasar untuk menyusun dokumen rencana turunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, memberikan arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan pada setiap tahapan siklus bencana. Kedudukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) seperti yang ditunjukkan pada Gambar I.3. menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana nasional dan provinsi yang terintegrasi dalam:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi;
- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional);
- 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi);
- 5) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
- 8) Rencana Strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga, dan SKPD Provinsi;

- 9) Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);
- 10) Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 11) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi (Renja SKPD).

Untuk memahami bagaimana Rencana Penanggulangan Bencana terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan, penting untuk melihat posisi dan kedudukannya secara jelas. Diagram berikut akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan dan peran dokumen ini dalam keseluruhan struktur perencanaan.



Gambar I.3 Diagram Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Sumber : Pedoman Penyusunan Dokumen RPB, BNPB 2021

I.5 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan Kabupaten Way Kanan, landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana.;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Penanggulangan Bencana.;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
28. Keputusan Gubernur No. 215 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

I.6 Ruang Lingkup

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cakupan dan tujuan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan,

berikut adalah rincian ruang lingkup dokumen ini. Penjelasan berikut mencakup berbagai aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana serta keterlibatan pihak-pihak terkait.

1. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Way Kanan merupakan hasil dari kajian risiko bencana serta evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tata cara penyelenggaraan penanggulangan bencana pada berbagai kondisi, mulai dari pra, saat, hingga pasca bencana, tetapi juga menyajikan visi, misi, kebijakan program, dan alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama lima tahun ke depan.
2. Dalam penyusunan kegiatan/program, penting untuk memperhatikan indikator capaian dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi terkini. Oleh karena itu, dokumen ini juga menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang diperlukan sebagai bagian dari proses perbaikan. Rencana Aksi/Kegiatan mencakup langkah-langkah pencegahan dan mitigasi, upaya kesiapsiagaan, serta rencana penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang direncanakan untuk lima tahun ke depan.
3. Seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, termasuk Pemerintah, Lembaga Usaha, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Non-Pemerintah, terlibat dalam pelaksanaan Rencana Aksi/Kegiatan Penanggulangan Bencana. Hal ini mencerminkan komitmen untuk bersama-sama menghadapi tantangan bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat di Kabupaten Way Kanan.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

II.1 Gambaran Umum Wilayah

Gambaran umum wilayah memaparkan kondisi daerah berdasarkan aspek geografi, geologi, topografi, iklim, hidrologi, penggunaan lahan dan demografi. Sejarah kejadian bencana merupakan bencana-bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Way Kanan, sedangkan potensi bencana merupakan prediksi bencana-bencana yang kemungkinan terjadi. Gambaran umum wilayah dan kebencanaan dapat memberikan pemahaman tentang potensi penduduk yang terpapar bahaya, dan dari kondisi topografi, iklim, geologi, hidrologi, demografi dan ekonomi penggunaan lahan dapat diperkirakan potensi tinggi rendahnya kelas bahaya yang ada. Selain itu kondisi infrastruktur, perekonomian dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam merespons terjadinya bencana.

Pada tahun 2023, Kabupaten Way Kanan memiliki 483.884 penduduk dengan kepadatan dan risiko bencana yang bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Banjit memiliki jumlah penduduk tertinggi (47.433 jiwa) dan Bahuga terendah (12.169 jiwa). Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Baradatu (292,17 jiwa/km²) dan terendah di Negeri Besar (61,01 jiwa/km²). Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Negara Batin (2,62%) dan terendah di Rebang Tangkas (-0,92%).

Kabupaten Way Kanan menghadapi risiko bencana alam seperti banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Banjit dan Negeri Besar memiliki resiko banjir tinggi, sementara Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu rentan terhadap kebakaran hutan. Tanah longsor terutama mengancam Banjit karena alih fungsi lahan. Kecamatan dengan populasi dan kepadatan tinggi, seperti Banjit, lebih rentan terhadap kerugian besar dalam bencana, dan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tinggi, seperti Negara Batin, memerlukan perhatian lebih dalam penanganan bencana. Faktor alam seperti curah hujan tinggi, kondisi tanah, dan perubahan iklim turut mempengaruhi risiko bencana di wilayah ini.

II.1.1 Posisi Geografis

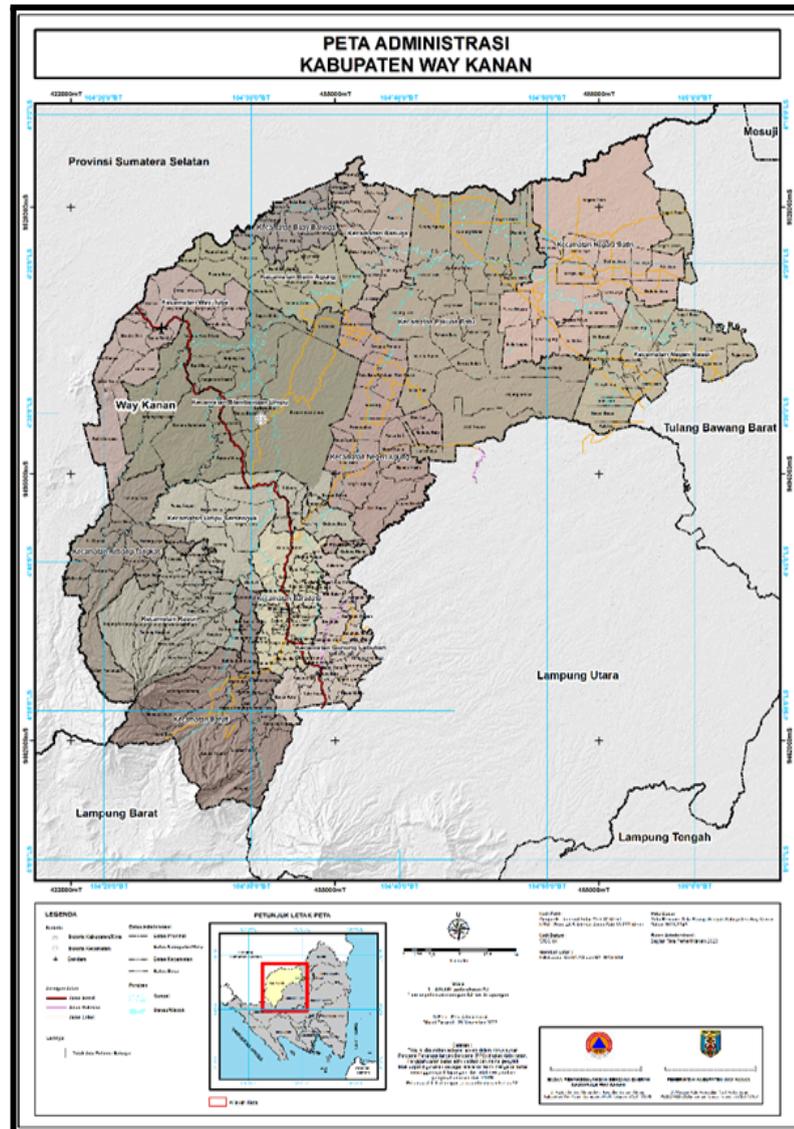
Secara geografis Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi antara $104^{\circ}17'$ - $105^{\circ}04'$ Bujur Timur dan $04^{\circ}12'$ - $04^{\circ}58'$ Lintang Selatan dengan luas kurang lebih 352.211 (tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus sebelas) hektare atau sebesar 11,11% dari luas Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota Blambangan Umpu dibentuk secara resmi pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan UU No.12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II. Kabupaten Way Kanan berbatasan antara lain yaitu:

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Utara;
2. Kabupaten Lampung Utara di sebelah Selatan;
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat di sebelah Timur;
4. Kabupaten Lampung Barat di sebelah Barat

II.1.2 Administrasi Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota Blambangan Umpu dibentuk secara resmi pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan UU No.12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan memiliki luas wilayah 3.522,11 km² atau sebesar 11,11% dari luas Provinsi Lampung. Secara astronomis berada diantara arah Utara-Selatan 4.12° - 4.58° Lintang Selatan dan arah Timur-Barat 104.17° - 105.04° Bujur Timur.

Secara garis besar, gambaran wilayah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Gambar II.1.



Gambar II.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Way Kanan
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Gambar II.1. menunjukkan peta administrasi wilayah Kabupaten Way Kanan. Pada awal pembentukannya pada tahun 1999, Kabupaten Way Kanan secara administratif terbagi menjadi 6 kecamatan dan 192 kampung. Dengan diberlakukannya Perda No. 33 Tahun 2000, jumlah kecamatan di Kabupaten Way Kanan bertambah menjadi 8. Selanjutnya, pada tahun 2005, melalui Perda No. 2 Tahun 2005, jumlah kecamatan meningkat menjadi 11. Pada tahun 2002,

berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2002, jumlah kecamatan bertambah lagi menjadi 14, dengan total 206 kampung. Terakhir, dengan diberlakukannya Perda No. 1 Tahun 2020, Kabupaten Way Kanan kini terdiri dari 15 kecamatan, yang mencakup 227 kampung dan 6 kelurahan. Data keseluruhan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Way Kanan beserta jumlah kampung di tiap tiap kecamatannya dapat dilihat pada Tabel II.1

Tabel II.1 Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Way Kanan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
			(km ²)	(%)	Kampung/ Kelurahan	(%)
1	Banjit	Pasar Banjit	282,14	8,01%	20	8,81
2	Baradatu	Tiuh Balak Pasar	128,87	3,66%	22	9,69
3	Gunung	Gunung Labuhan	135,49	3,85%	21	9,25
4	Kasui	Jaya Tinggi	203,79	5,79%	19	8,37
5	Rebang Tangkas	Gunung Sari	184,68	5,24%	10	4,41
6	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	500,41	13,99%	13	5,73
7	Way Tuba	Way Tuba	184,2	5,23%	13	5,73
8	Negeri Agung	Negeri Agung	250,28	7,11%	19	8,37
9	Bahuga	Mesir Ilir	115,69	3,27%	11	4,85
10	Buay Bahuga	Bumi Harjo	75,08	2,13%	9	3,96
11	Bumi Agung	Bumi Agung	148,69	4,21%	10	4,41
12	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	509,4	14,46%	19	8,37
13	Negara Batin	Negara Batin	384,19	10,91%	15	6,61
14	Negeri Besar	Negeri Besar	229,04	6,50%	13	5,73
15	Umpu Semenguk	Negeri Baru	190,16	5,64%	13	5,73
Luas Total			3.522,11	100	227	100

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

II.1.3 Iklim Kabupaten Way Kanan

Secara umum, wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi dua tipe iklim. Bagian barat memiliki curah hujan yang cukup tinggi, berkisar antara 3.000 mm hingga 5.000 mm per tahun. Sementara itu, bagian timur memiliki curah hujan yang lebih rendah, yaitu antara 2.000 mm hingga 3.000 mm per tahun, dengan suhu rata-rata 26°C hingga 30°C. Sementara itu jika diklasifikasikan ke dalam iklim menurut R. Oldeman, maka Wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 3 iklim, yaitu:

1. Iklim B: Bulan basah 7-9 bulan, bulan kering < 2 bulan

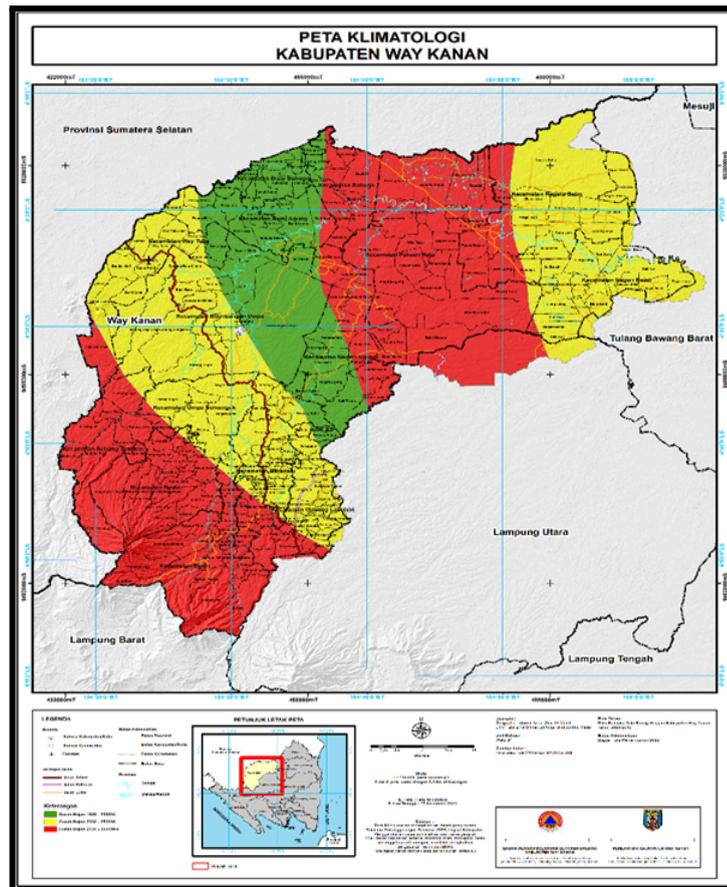
Wilayah yang memiliki iklim B ini terdapat di sebagian Kecamatan Banjit, Kasui, Blambangan Umpu, dan Bahuga.

2. Iklim C1: Bulan basah 5-6 bulan, bulang kering < 2 bulan

Wilayah yang memiliki iklim C1 ini terdapat di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bahuga, Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Banjit, dan Baradatu.

3. Iklim C2: Bulan basah 5-6 bulan, bulan kering 2-3 bulan

Wilayah yang memiliki iklim C2 ini terdapat di Kecamatan Pakuan Ratu dan sekitarnya. Berikut disajikan peta klimatologi Kabupaten Way Kanan pada Gambar II.2



Gambar II.2 Kondisi Klimatologi Kabupaten Way Kanan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan, 2023-2043

Gambar II.2 menunjukkan kondisi klimatologi Kabupaten Way Kanan. Musim hujan di Kabupaten Way Kanan berlangsung dari bulan November hingga Mei, sedangkan musim kemarau terjadi dari bulan Juni hingga Agustus. Bulan-bulan yang relatif kering adalah September dan Oktober. Pada musim hujan, jumlah hari hujan rata-rata per bulan adalah 10 hingga 16 hari, sedangkan pada musim kemarau jumlahnya berkisar antara 4 hingga 8 hari. Curah hujan tinggi di bagian barat Kabupaten Way Kanan dan pada musim hujan dapat

menyebabkan banjir, terutama di wilayah dengan iklim B. Sebaliknya, pada musim kemarau dan bulan-bulan kering (September dan Oktober), daerah dengan iklim C2 lebih rentan terhadap kekeringan. Rata-rata curah hujan tahunan Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dalam Tabel II.2 dan Gambar II.3

Tabel II.2 Rata-Rata Curah Hujan Tahunan Kabupaten Way Kanan

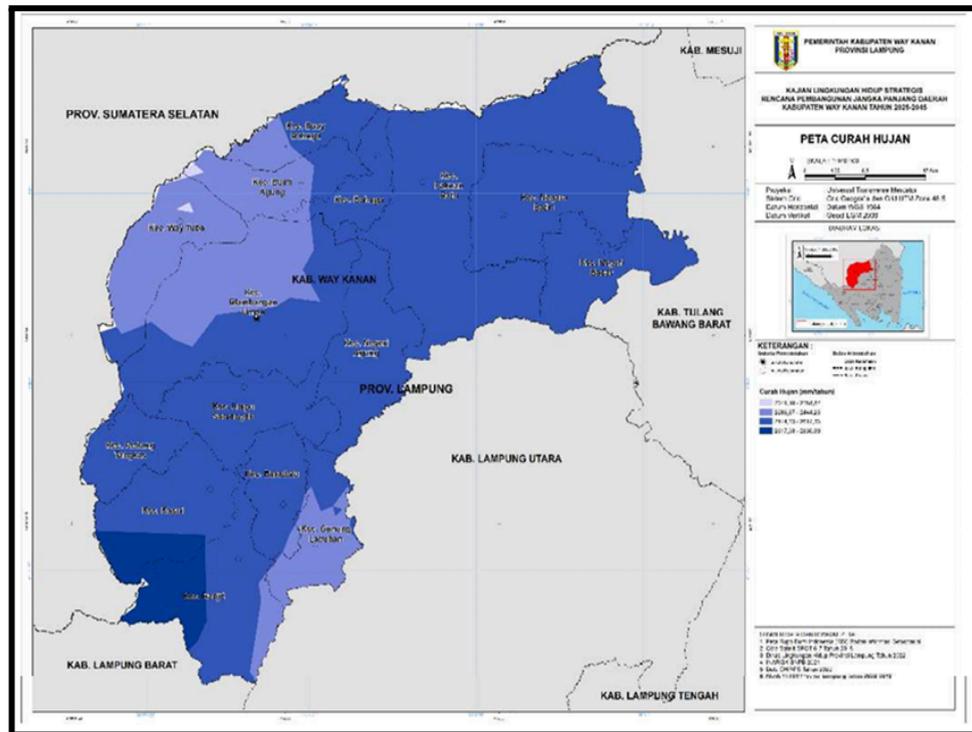
Stasiun	Total Curah Hujan (mm/tahun)					Rata-Rata Curah Hujan Tahunan (MM/Tahun)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Purwa Negara	3.722,0	3.331,0	2.354,0	2.156,5	2.559,0	2.824,5
Negeri Besar	1.504,0	1.754,0	2.883,0	2.971,5	2.891,0	2.200,7
Kasui Pasar 1	2.301,5	2.446,0	3.188,9	4.335,0	4.177,5	3.289,8
Way Tuba	2.212,0	2.140,6	2.655,3	2.509,3	2.203,9	2.344,2
Tulung Buyut	2.422,0	2.002,5	3.358,0	3.877,5	3.329,2	2.997,8
Bengkulu Rejo	2.138,0	2.184,0	2.707,0	2.363,0	2.832,0	2.444,8
Blambangan Umpu 1	2.792,0	2.601,0	2.107,0	2.253,1	3.824,2	2.715,6
Setia Negara	2.236,0	1.539,0	3.101,0	2.388,1	2.848,5	2.422,5
Tanjung Raya	2.869,0	2.655,0	3.175,0	3.011,0	2.282,0	2.798,4

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Lampung Tahun

Tabel II.2 menunjukkan kondisi stasiun pengamatan hujan di Kabupaten Way Kanan rentan terhadap berbagai bencana alam. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi di bagian barat dapat menyebabkan banjir, longsor, dan erosi tanah. Banjir seringkali melanda pemukiman penduduk, lahan pertanian, dan infrastruktur jalan, mengakibatkan kerugian materi yang besar dan mengancam keselamatan warga. Di sisi lain, bagian timur yang memiliki curah hujan lebih rendah juga tidak luput dari ancaman bencana. Pada musim kemarau, daerah ini rentan terhadap kekeringan. Kekeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, kekurangan air bersih, dan ancaman kebakaran hutan serta lahan. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama.

Secara keseluruhan, perubahan iklim dan pola cuaca ekstrem di Kabupaten Way Kanan menuntut adanya upaya mitigasi dan adaptasi yang serius. Langkah-langkah seperti pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir, penghijauan, penyediaan sumber air bersih, serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana perlu dioptimalkan untuk

meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Berikut disajikan peta curah hujan Kabupaten Way Kanan Pada Gambar II.3



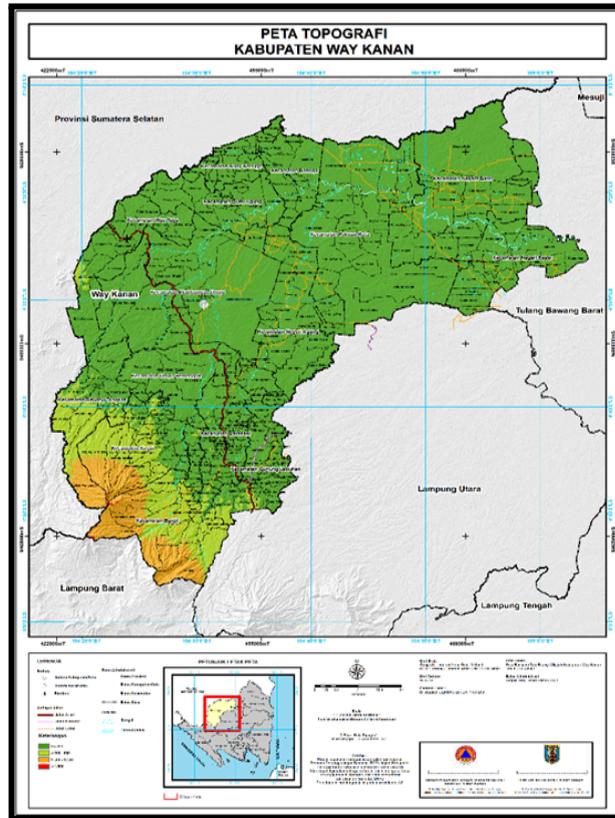
Gambar II.3 Peta Curah Hujan Kabupaten Way Kanan
 Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat dan Pelaksana KLHS RPJPD Tahun 2023

Gambar II.3. menunjukkan bagian dari Kabupaten Way Kanan dalam peta curah hujan. Kabupaten Way Kanan menghadapi berbagai ancaman bencana alam yang disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrem, baik di musim hujan maupun kemarau. Di bagian barat, curah hujan tinggi meningkatkan risiko banjir, longsor, dan erosi tanah, sementara di bagian timur, kekeringan menjadi ancaman serius selama musim kemarau.

II.1.4 Kondisi Topografi

Secara topografi, Kabupaten Way Kanan dapat dibagi menjadi dua unit topografis, yaitu daerah berbukit hingga bergunung dan daerah river basin. Topografi Kabupaten Way Kanan terdiri dari lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan yang umumnya ditutupi oleh hutan vegetasi primer atau sekunder dengan puncak-puncaknya seperti Bukit Barisan dan Bukit Pesagi. Bentuk medan topografi di sebelah barat adalah berbukit-bukit, mencakup kurang dari 7% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan. Sedangkan di

sebelah timur, sekitar 93% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan terbentang dataran yang sebagian besar berupa sawah serta perkebunan dataran rendah. Berikut disajikan peta topografi Kabupaten Way Kanan Pada Gambar II.4

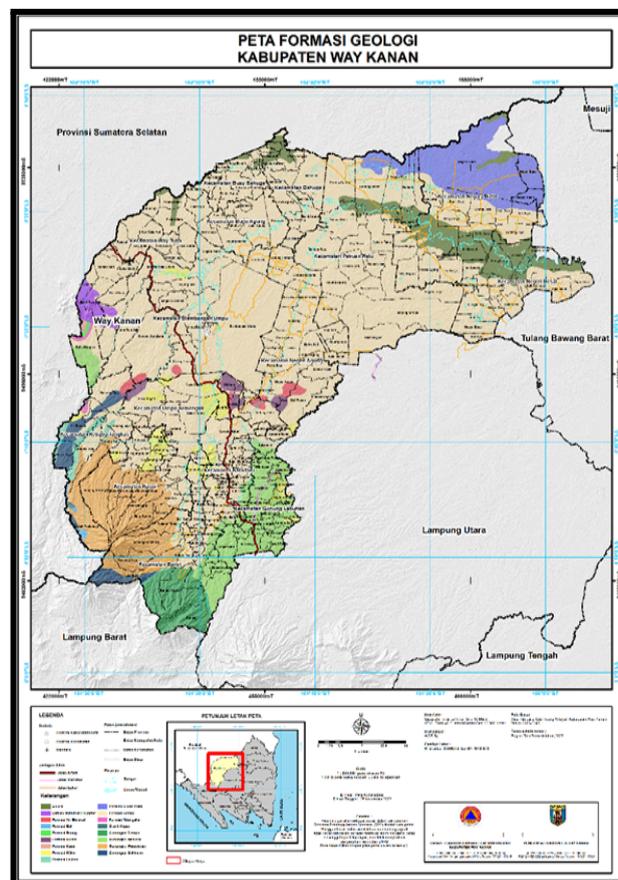


Gambar II.4 Kondisi Topografi Kabupaten Way Kanan
(Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan, 2023-2043)

Gambar II.4 menampilkan bentang alam daerah Kabupaten Way Kanan juga dapat dikelompokkan ke dalam bentuk wilayah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0 – 15° mencakup luasan kurang lebih 73,9%, bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan lereng 15 – 25° memiliki sebaran kurang lebih 20,2 % dan berbukit sampai bergunung dengan kemiringan lereng 25 - 40° memiliki sebaran kurang lebih 5,9%. Lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi 450 1500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Kasui dengan puncak tonjolannya ada pada Bukit Punggur (1700 m), Daerah Kecamatan Banjit dengan puncak tonjolannya ada pada Bukit Remas (1600 m) dan Bukit Duduk (1500 m). Topografi ini dapat menyebabkan beberapa bencana, seperti longsor di daerah lereng curam dan banjir di daerah river basin serta dataran rendah.

II.1.5 Geologi

Secara geologis, bentang alam Kabupaten Way Kanan didominasi oleh kelompok dataran tufa masam. Terdapat juga kelompok dataran lain seperti aluvial dan vulkanik. Kelompok tufa masam menutupi sebagian besar wilayah, mulai dari dataran tufa masam yang datar hingga yang berkelompok. Kelompok dataran yang datar hingga bergelombang ditemukan dalam luasan yang relatif sempit di bagian barat, berbatasan dengan kelompok vulkanik. Kelompok aluvial ditemukan di lembah-lembah sungai utama yang mengalir di wilayah ini. Berikut disajikan peta formasi geologi Kabupaten Way Kanan pada Gambar II.5.



Gambar II.5 Kondisi Geologi Kabupaten Way Kanan
(Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan, 2023-2043)

Gambar II.5. menunjukkan kondisi geologi Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan literatur dan peta geologi dapat diinventarisir bahwa Grup volkan kebanyakan masih tergolong cukup muda yang masih mempertahankan bentuk

spesifik kerucutnya dibangun oleh lava yang berselang-seling dengan bahan piroklastik terdapat pada bagian Barat Daya. Kemudian bahan tambang utama yang ada di Way Kanan adalah mineral batuan diantaranya: potensi andesit diperkirakan sebesar 176,9 juta m³ terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu, Way Tuba, Banjit, Kasui dan Baradatu.berikut disajikan luasan formasi geologi Kabupaten Way Kanan terdapat pada Tabel II.3.

Tabel II.3 Formasi Geologi dan Luasannya di Kabupaten Way Kanan

Formasi Geologi	Kode	Luasan (km ²)	Formasi Geologi	Kode	Luasan (km ²)
Formasi Talangakar	Tomt	3,91	Formasi Air Benakat	Tma	6,72
Formasi Kikim	Tpok	73,17	Formasi Air Benakat	Tma	6,24
Granit Kapur	Kgr1	0,99	Formasi Air Benakat	Tma	2,07
Aluvial	Qa	157,68	Formasi Baong	Tmb	1,46
Aluvial	Qa	9,73	Formasi Bal	Tmba	1,75
Aluvial	Qa	25,45	Formasi Bal	Tmba	0,52
Gunungapi Masurai	Qhv	188,19	Formasi Bal	Tmba	1,71
Gunungapi Masurai	Qhv	16,81	Formasi Gumai	Tmg	5,31
Gunungapi Dempo	Qhvd	87,13	Formasi Gumai	Tmg	3,69
Gunungapi Pesawaran	Qhvp	258,26	Formasi Gumai	Tmg	0,77
Gunungapi Sekincau	Qhvs	45,17	Formasi Gumai	Tmg	5,92
Gunungapi Sekincau	Qhvsg	0,07	Formasi Gumai	Tmg	7,53
Formasi Kasai	QTK	1,64	Formasi Lakitan	Tmpl	4,73
Formasi Ranau	QTr	2.498,45	Formasi Lakitan	Tmpl	2,87
Batuan Gunungapi Kuarter	Qv	27,58	Formasi Lakitan	Tmpl	12,5
Formasi Air Benakat	Tma	4,61	Formasi Muara Enim	Tmpm1	195,95
Formasi Air Benakat	Tma	1,64			

(Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan, 2023-2043)

Tabel II.3 menjelaskan untuk radiosit diperkirakan sebesar 3 juta m³, Marmer 15,8 juta m³, Bentonite 60 juta m³, Kaolin 7,5 juta m³, Tanah Liat, Gamping dan Phospat terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu. Sedangkan potensi tufa 123,6 juta m³ di Kecamatan Blambangan Umpu dan Baradatu. Pasir Batu 1,3 juta m³ di Baradatu, Banjit dan Blambangan Umpu. Kandungan bahan galian Besalt diperkirakan sebesar 0,4 juta m³ di Kecamatan Banjit. Lembah-lembah sungai dengan dataran aluvial di Kabupaten Way Kanan rentan terhadap banjir selama musim hujan, sedangkan wilayah dataran tufa masam yang luas mungkin mengalami kekeringan selama musim kemarau, dan area vulkanik serta tufa masam yang bergelombang, terutama di wilayah Barat Daya dengan grup volkan muda, berisiko mengalami tanah longsor.

II.1.6 Tutupan Lahan

Pada tahun 2022 tutupan lahan di Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 12 tutupan lahan, yaitu Bandara/Pelabuhan, Hutan Lahan Kering Sekunder, Perkebunan, Permukiman, Permukiman Transmigrasi, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur Semak, Sawah, Semak Belukar, Semak Belukar Rawa, Tanah Terbuka dan Tubuh Air. Tutupan lahan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak dengan luas 153.638,63 Ha atau 43,62% dari total luas wilayah Kabupaten Way Kanan. Sawah, semak belukar, semak belukar rawa, tanah terbuka, dan tubuh air. Pada tahun 2020, wilayah ini didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak seluas 153.638,63 ha (43,62% dari total wilayah). Tutupan lahan seperti ini dapat memicu berbagai bencana, seperti kebakaran hutan pada hutan lahan kering sekunder, banjir dan erosi pada lahan pertanian dan tanah terbuka, serta kekeringan pada lahan pertanian lahan kering. Berikut disajikan data tutupan lahan Kabupaten Way Kanan tahun 2020 pada Tabel II.4

Tabel II.4 Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

NO	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Presentase
1.	Bandara/Pelabuhan	90,2	0,03%
2.	Hutan lahan Kering Sekunder	30.791,06	1,08%
3.	Perkebunan	92.752,27	26,33%
4.	Permukiman	19.426,85	5,52%
5.	Permukiman Transmigrasi	685,20	0,19%
6.	Pertanian Lahan Kering	72.473,41	20,58%
7.	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	153.638,63	43,62%
8.	Sawah	6.727,91	1,91%
9.	Semak Belukar	129,06	0,04%
10.	Semak Belukar Rawa	111,85	0,03%
11.	Tanah Terbuka	1.092,35	0,31%
12.	Tubuh Air	1.293,34	0,37%
Total		352.211,37	100,00%

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2020

Tabel II.4 tersebut menggambarkan distribusi penggunaan lahan di suatu wilayah dengan total luas 352.211,37 hektar. Perkebunan menjadi penggunaan lahan terbesar, mencakup 92.752,27 hektar atau 26,33% dari total luas lahan. Sementara itu, Pertanian Lahan Kering Campur Semak menempati urutan kedua

benar-benar mengalami kerusakan parah dan memerlukan perhatian segera relatif kecil dibandingkan kategori lainnya. Luasan Lahan kritis pada Kabupaten Way kanan disajikan Pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Lahan Kritis di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

NO	Lahan Kritis	Luasan (Ha)
1.	Tidak Kritis	132.183,710
2.	Potensial Kritis	109.795,200
3.	Agak Kritis	88.239,170
4.	Kritis	20.008,590
5.	Sangat Kritis	53,390

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2023

Tabel II.5 menyajikan daftar luasan lahan kritis di Kabupaten Way Kanan . Luasan lahan ini secara bertahap, lahan yang masuk dalam kategori "Potensial Kritis" dan "Agak Kritis" memiliki luasan yang juga signifikan, masing-masing sebesar 109.795.200 Ha dan 88.239.170 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lahan-lahan tersebut belum mengalami kerusakan yang parah, mereka berpotensi memburuk jika tidak dikelola dengan baik. Kategori "Kritis" dengan luasan 20.008.590 Ha menegaskan adanya lahan yang telah mengalami kerusakan serius, yang memerlukan tindakan pemulihan lebih lanjut untuk mencegah peralihan ke kondisi yang lebih parah.

II.1.7 Demografi

Penduduk di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 sebanyak 481.036 jiwa yang terdiri atas 246.388 jiwa penduduk laki-laki dan 234.648 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu untuk kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan tahun 2022 mencapai 122 jiwa/km. Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Baradatu dengan kepadatan sebesar 290 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bahuga 53 sebesar 60 jiwa/km². Berikut merupakan tabel persebaran

penduduk per kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2018 dan 2022. Berikut disajikan tabel II.6. mengenai jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan.

Tabel II.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2022

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		2021	2022
1.	Banjit	47.320	47.433
2.	Baradatu	44.724	44.872
3.	Gunung Labuhan	31.337	31.332
4.	Kasui	33.114	33.338
5.	Rebang Tangkas	24.113	23.892
6.	Blambangan Umpu	37.014	37.347
7.	Way Tuba	25.955	26.482
8.	Negeri Agung	38.305	38.070
9.	Umpu Semenguk	33.184	33.440
10.	Bahuga	11.883	12.169
11.	Buay Bahuga	21.657	21.857
12.	Bumi Agung	28.765	29.152
13.	Pakuan Ratu	44.615	45.437
14.	Negara Batin	36.856	37.820
15.	Negeri Besar	21.200	21.243
Kabupaten Way Kanan		480.042	483.884

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, 2023

Tabel II.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Way Kanan memiliki 483.884 penduduk. Kecamatan Banjit memiliki jumlah penduduk tertinggi (47.433 jiwa), sedangkan Kecamatan Bahuga terendah (12.169 jiwa). Penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak berada di Kecamatan Banjit (24.371 jiwa laki-laki dan 23.062 jiwa perempuan), dan terendah di Kecamatan Bahuga (6.128 jiwa laki-laki dan 5.987 jiwa perempuan). Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Baradatu (292,17 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Negeri Besar (61,01 jiwa/km²). Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Negara Batin (2,62%) dan terendah di Kecamatan Rebang Tangkas (-0,92%).

Kabupaten Way Kanan menghadapi berbagai resiko bencana alam, seperti banjir dengan potensi terbesar di Kecamatan Negeri Besar dan Pakuan Ratu dikarenakan memang sebagian besar masyarakatnya bermukim di area sepadan sungai, cuaca ekstrem (berisiko rendah hingga sedang) dikarenakan masih belum optimalnya mitigasi struktural dan non struktural yang perlu dilakukan untuk

bencana cuaca ekstrim, dan gempa bumi dengan risiko sedang di seluruh kecamatan. Risiko kebakaran hutan dan lahan sedang di Kecamatan Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu yang didominasi pertanian lahan kering campur dan semak yang dapat meningkatkan risiko, kekeringan berpotensi di seluruh wilayah, dan tanah longsor dengan kerentanan tinggi di Kecamatan Banjit karena adanya perubahan alih fungsi lahan bagian hulu. Kecamatan dengan kepadatan dan populasi tinggi, seperti Banjit, lebih rentan terhadap kerugian besar dalam bencana, sementara kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tinggi, seperti Negara Batin, memerlukan perhatian lebih dalam penanganan bencana. Faktor alam seperti curah hujan tinggi, kondisi tanah, dan perubahan iklim turut mempengaruhi risiko bencana di wilayah ini.

II.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Way Kanan. Dalam kurun waktu 2014-2023 terjadi 295 bencana baik alam dan non-alam di Kabupaten Way Kanan. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah bencana kebakaran bangunan hutan dan lahan dan bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman maupun kerusakan lahan. Data sejarah kejadian bencana ditampilkan pada Tabel II.7 .

Tabel II.7 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Way Kanan

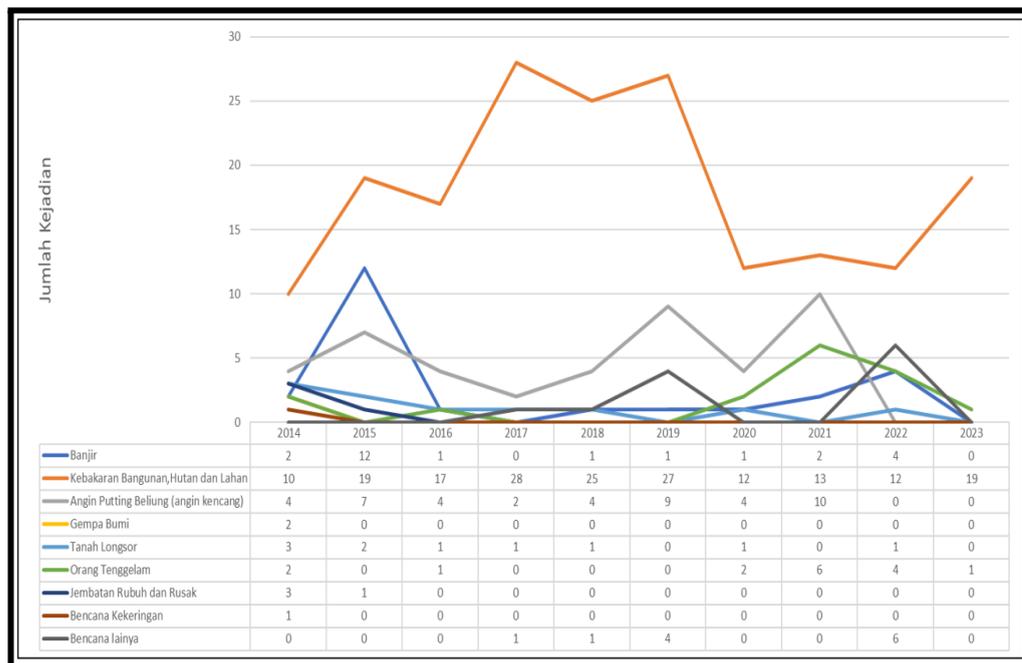
Jenis Bencana	Tahun										Jumlah
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Banjir	2	12	1	0	1	1	1	2	4	0	24
Kebakaran Bangunan,Hutan dan lahan	10	19	17	28	25	27	12	13	12	19	182
Angin Puting Beliung	4	7	4	2	4	9	4	10	0	0	44
Gempa	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tanah Longsor	3	2	1	1	1	0	1	0	1	0	10
Bencana Kekeringan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total Bencana	25	41	24	32	32	41	20	31	27	20	295

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Tabel II.7 menampilkan sekumpulan historis sejarah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Way Kanan. Kecenderungan kejadian bencana yang terjadi di

Kabupaten Way Kanan periode tahun 2014 – 2023. Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor, angin puting beliung merupakan jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Way Kanan. Hal ini dapat dilihat pada grafik dalam kurun waktu selama tahun 2014-2023, keempat bencana tersebut memiliki jumlah kejadian paling banyak dibandingkan bencana lainnya. Grafik kecenderungan kejadian bencana pada Gambar II.7 menampilkan data bencana dari sepuluh tahun terakhir.

Gambar II.7 Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Gambar II.7 menampilkan grafik kecenderungan kejadian historis bencana Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan laman USGS menunjukkan bahwa gempa bumi di Kabupaten Way Kanan terjadi sebanyak 10 kali dalam periode 1980-2021. Beberapa gempa bumi signifikan di Kabupaten Way Kanan termasuk dua kejadian pada tahun 1984 dengan magnitudo 4,6, dan satu kejadian pada tahun 1986 dengan magnitudo 4,3. Pada periode 1990-1999, beberapa gempa signifikan terjadi di Kabupaten Way Kanan. Pada tahun 1992, gempa dengan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah ini. Selanjutnya, gempa terjadi pada tahun 1996 dengan magnitudo 4,2 dan pada tahun 1998 dengan magnitudo 4,0. Dalam periode 2000-2009, gempa berkekuatan magnitudo 4,1 tercatat pada tahun 2005 dan magnitudo 4,4 pada tahun 2008. Terakhir, pada periode 2010-2021, dua

gempa terjadi pada tahun 2014: gempa dengan magnitudo 4 pada tanggal 6 April (koordinat 104.657 Bujur, -4.393 Lintang) dan gempa dengan magnitudo 4,1 pada tanggal 16 November (koordinat 104.679 Bujur, -4.564 Lintang). Semua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Selain bencana alam, Kabupaten Way Kanan juga menghadapi kejadian non-alam seperti wabah penyakit dan konflik sosial. Wabah penyakit yang paling signifikan di Kabupaten Way Kanan meliputi Demam Berdarah Dengue (DBD), Malaria, Hepatitis, dan COVID-19. Rinciannya adalah 547 kasus DBD, 2 kasus Malaria, 100 kasus Hepatitis, dan 1884 kasus COVID-19. Grafik kecenderungan menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus COVID-19 pada tahun 2020, sementara kasus DBD, Malaria, dan Hepatitis tetap relatif stabil selama periode yang sama. Selanjutnya, untuk bencana konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Way Kanan pada Total kasus selama tahun ini adalah 359, dengan jumlah pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Juni Tahun 2022. Rincian terbesar dari total luasan konflik sosial tersebut pada tahun 2022 yaitu Pencurian Berat dengan total 86 kasus, pencurian kendaraan bermotor 46 kasus, pembunuhan 3 kasus dan konflik lain-lain sebanyak 51 kasus. Jumlah ini mencakup Jenis Tindak Pidana (JTP) dan Pelaku Tindak Pidana (PTP) untuk setiap bulan.

Selanjutnya untuk konflik sosial tahun 2023 tercatat terdapat 6 (enam) konflik yang terjadi. Konflik yang pertama yaitu pembakaran pabrik sawit PT Adi Karya Gemilang (AKG) Bahuga, Penanganan penembakan dilakukan oleh Bidang Propam POLDA Lampung, dan beruntungnya, insiden ini tidak menyebabkan konflik yang lebih besar. Kemudian, Tuntutan Masyarakat Kampung Tanjung Dalam Kec Bumi Agung Terhadap PT Palm Lampung Persada (PLP). Mediasi Forkopimda Way Kanan dengan perwakilan masyarakat dan PT PLP berhasil menyelesaikan konflik, dan Bupati Way Kanan turut serta dalam proses penyelesaian. Berikutnya, Konflik Ketua SMSI Way Kanan Versus Rumah Makan GAOLA. Perkelahian antara Ketua SMSI Way Kanan dan Rumah Makan GAOLA dipicu oleh dugaan pungli batubara. Puluhan warga posko Gaola mendatangi markas PMI Way Kanan, dan konflik ini dilaporkan ke Polres Way Kanan untuk penanganan lebih lanjut.

Jumlah potensi bencana di Kabupaten Way Kanan berdasarkan sejarah kebencanaan dan analisis menggunakan pendekatan SIG dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan di daerah. Bencana-bencana yang berpotensi di Kabupaten Way Kanan terdiri dari 9 (sembilan) jenis yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Epidem Wabah Penyakit dan COVID-19. Sembilan potensi bencana di Kabupaten Way Kanan tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Kabupaten Way Kanan untuk tahun 2024 sampai tahun 2028

II.3 Risiko Bencana Daerah

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan Kajian Risiko Bencana pada tahun 2023 dan menjadi data pokok dalam pemilihan atau prioritas penanganan bencana dalam Rencana Penanggulangan Bencana 2025-2029. Berikut disajikan Tabel II.8 yang merupakan rekapitulasi bahaya Kabupaten Way Kanan

Tabel II.8 Tabel Rekapitulasi Bahaya Kabupaten Way Kanan

NO	ANCAMAN BENCANA	LUAS (Ha)	KELAS
1.	Gempa Bumi	352.211,37	Rendah
2.	Banjir	41.696,55	Tinggi
3.	Banjir Bandang	17.089,47	Tinggi
4.	Tanah Longsor	42.555,15	Tinggi
5.	Kekeringan	352.211,37	Sedang
6.	Cuaca Ekstrim	347.891,62	Tinggi
7.	Kebakaran Hutan & Lahan	338.157,36	Tinggi
8.	Epidemi Wabah Penyakit	51.509,67	Rendah
9.	COVID-19	315.689,49	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Tabel II.8 menunjukkan bahwa bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas bahaya yang tergolong Tinggi. Sedangkan untuk bahaya kekeringan berada pada kelas bahaya yang tergolong sedang. Rekapitulasi bahaya bencana Kabupaten Way Kanan berada pada kelas Tinggi. Data menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki luas bahaya sedang dengan total luas mencapai 352.210,39 Ha. Banjir

merupakan risiko tertinggi dengan luas bahaya tinggi mencapai 34.332,39 Ha, diikuti oleh kebakaran hutan dan lahan dengan total luas bahaya tinggi sebesar 343.338,57 Ha. Tanah longsor memiliki luas bahaya rendah sebesar 36.062,73 Ha. Kekeringan dan cuaca ekstrim memiliki luas bahaya sedang masing-masing sebesar 352.211,37 Ha dan 335.299,59 Ha. Banjir bandang memiliki luas bahaya sedang sebesar 16.405,38 Ha. Epidemii wabah penyakit memiliki luas bahaya rendah sebesar 1.536,39 Ha. Rekapitulasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai risiko bencana yang dihadapi Kabupaten Way Kanan, dengan banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan menjadi fokus utama yang membutuhkan perhatian mitigasi dan penanganan lebih lanjut. Berikut disajikan tabel rekapitulasi penduduk terpapar Kabupaten Way Kanan pada Tabel II.9.

Tabel II.9 Tabel Rekapitulasi Penduduk terpapar Kabupaten Way Kanan

NO	ANCAMAN BENCANA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)			
		JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN		
			KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK DISABILITAS
1.	Gempa Bumi	484.110	107.253	54.308	2.136
2.	Banjir	37.927	100.202	50.701	2.035
3.	Banjir Bandang	14.917	55.421	28.480	1.123
4.	Tanah Longsor	31.993	77.840	39.656	1.418
5.	Kekeringan	480.756	106.502	53.933	2.146
6.	Cuaca Ekstrim	480.756	106.502	53.933	2.146
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	406.751	98.171	49.710	1.916
8.	Epidemi Wabah Penyakit	99.065	25.404	12.746	501
9.	COVID-19	476.320	106.502	53.933	2.146

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Tabel II.9 menunjukkan rekapitulasi potensi pada penduduk terpapar bencana di Kabupaten Way Kanan Berada pada kelas Sedang. Data menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki jumlah penduduk terpapar sebanyak 484.110 jiwa, dengan kelompok umur rentan mencapai 107.253 jiwa, penduduk miskin 54.308 jiwa, dan

penduduk disabilitas 2.136 jiwa. Banjir memiliki potensi penduduk terpapar sebanyak 37.927 jiwa, dengan kelompok umur rentan mencapai 100.202 jiwa, penduduk miskin 50.701 jiwa, dan penduduk disabilitas 2.035 jiwa. Kebakaran hutan dan lahan memiliki potensi penduduk terpapar sebanyak 406.751 jiwa, dengan kelompok umur rentan mencapai 98.171 jiwa, penduduk miskin 49.710 jiwa, dan penduduk disabilitas 1.916 jiwa. Dari rekapitulasi tersebut, terlihat bahwa sebagian besar bencana. Berikut disajikan tabel rekapitulasi potensi kerugian Kabupaten Way Kanan pada Tabel II.10.

Tabel II.10 Tabel Rekapitulasi Potensi kerugian Kabupaten Way Kanan

NO	ANCAMAN BENCANA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUGIAN LINGKUNGAN (Ha)	
		KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Gempa Bumi	60.775,76	500,99	61.276,75	Tinggi	-	-
2.	Banjir	5.795,43	18.092,90	23.888,33	Tinggi	6.624,28	Tinggi
3.	Banjir Bandang	2.590,10	683,76	3.273,86	Rendah	19.799,75	Tinggi
4.	Tanah Longsor	9.533,19	1.184,52	10.715,07	Rendah	9.063,36	Tinggi
5.	Kekeringan	0	10.343,52	10.338,00	Tinggi	296.833,63	Tinggi
6.	Cuaca Ekstrem	103.710,58	10.022,47	113.459,53	Tinggi	-	-
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	69.966,70	19.684,22	89.650,91	Tinggi	75.353,93	Tinggi
8.	Epidemi Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
9.	COVID-19	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Tabel II.10. menunjukkan potensi kerugian fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan berada pada kategori tinggi untuk bencana seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan. Semua bencana ini memiliki dampak yang signifikan dan luas terhadap infrastruktur, ekonomi, serta ekosistem. Sementara itu, bahaya banjir bandang dan tanah longsor dikategorikan berada pada tingkat sedang. Meskipun demikian, kedua bencana ini masih dapat

menyebabkan kerugian yang cukup berarti, namun dengan skala dan frekuensi yang relatif lebih rendah dibandingkan bencana di kategori tinggi.

Di sisi lain, bencana epidemi seperti wabah penyakit dan pandemi COVID-19 tidak menunjukkan adanya kerugian fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak utama dari bencana ini lebih berfokus pada aspek kesehatan manusia, meskipun juga memiliki efek tidak langsung terhadap sektor ekonomi dan sosial. Dengan demikian, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan tingkat ancaman dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis bencana, guna meminimalisir dampak negatif yang dapat terjadi. Berikut disajikan tabel potensi kerugian Kabupaten Way Kanan pada Tabel II.11.

Tabel II.11 Tabel Rekapitulasi Potensi kerugian Kabupaten Way Kanan

NO	ANCAMAN BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1.	Gempa Bumi	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
2.	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Tingg
3.	Banjir Bandang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
4.	Tanah Longsor	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
5.	Kekeringan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
6.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
8.	Epidemi Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
9.	COVID-19	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Berdasarkan Tabel 2.11. menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana Kabupaten Way kanan dianalisis berdasar pada Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana oleh BNPB tahun 2019 dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait. Dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kabupaten Way kanan. Kajian risiko bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan

strategi dalam menghadapi bencana. Berikut disajikan tabel indikator Kinerja PB pada Tabel II.12.

Tabel II.12 Tabel Rekapitulasi Potensi kerugian Kabupaten Way Kanan

NO	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDIKATOR KINERJA PB	CAPAIAN TAHUNAN				KELAS INDEKS			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	KABUPATEN WAY KANAN	IKD	-	0,20	0,45	0,53	-	RENDAH	SEDANG	SEDANG
		IRBI	-	131,19	120,07	108,00	-	SEDANG	SEDANG	SEDANG

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Tabel II.12. menunjukkan capaian tahunan dan kelas indeks untuk indikator kinerja Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten Way Kanan selama tahun 2021 hingga 2023. Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang mengukur efektivitas dan efisiensi penanggulangan bencana di daerah, menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan nilai 0,20 pada tahun 2021, 0,45 pada tahun 2022, dan mencapai 0,53 pada tahun 2023. Kelas indeks untuk IKD mengalami perubahan dari rendah pada tahun 2021 menjadi sedang pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang menilai tingkat risiko bencana yang dihadapi oleh suatu daerah, menunjukkan penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan nilai 131,19 pada tahun 2021, menurun menjadi 120,07 pada tahun 2022, dan 108,00 pada tahun 2023. Kelas indeks untuk IRBI tetap dalam kategori sedang selama periode ini.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan perbaikan dalam kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan, yang terlihat dari peningkatan IKD dan penurunan IRBI, meskipun kelas indeks untuk kedua indikator ini tetap berada dalam kategori sedang.

II.4 Prioritas Bencana yang Ditangani

Identifikasi potensi bencana yang diprioritaskan ditentukan berdasarkan tren bencana yang terjadi, yaitu jumlah kejadian bencana dan jenis bencana selama kurun waktu sepuluh tahun, serta klasifikasi kelas risiko yang berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kelas risiko bencana dengan kategori tinggi terjadi untuk bencana banjir dan kebakaran hutan lahan.

Menurut tren bencana yang terjadi, terdapat dua bencana yang memiliki kecenderungan meningkat, yaitu banjir dan cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan lahan yang sering terjadi dengan jumlah kejadian bencana paling banyak dibandingkan bencana lainnya. Bencana tersebut memiliki prioritas untuk ditangani karena berada pada zona merah atau memiliki risiko tinggi, sehingga perlu perhatian khusus agar tidak menyebabkan kerugian besar. Berikut disajikan matriks prioritas penanganan bencana Kabupaten Way Kanan pada Gambar II.8

Prioritas Penanganan		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian	Meningkat		<ul style="list-style-type: none"> • Banjir Bandang • Cuaca Ekstrem • Tanah Longsor 	
	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Epidemii Wabah Penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> • Gempabumi • Kekeringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banjir • Kebakaran Hutan Lahan
	Menurun		<ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 	

I	Prioritas Pertama; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun I - III
II	Prioritas Kedua; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun II - IV
III	Prioritas Ketiga; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun III - V

Gambar II.8 Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Way Kanan

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Gambar II.8 menjelaskan bahwa jenis bencana yang terdapat di Kabupaten Way Kanan di kelompok sesuai dengan prioritas penanganannya. Tabel matriks prioritas dapat dijelaskan beberapa poin berikut.

1. **Prioritas Pertama (merah)**, Pada periode Tahun I - III, bencana dengan tingkat risiko tinggi yang mengalami kecenderungan kejadian meningkat atau tetap, seperti banjir dan kebakaran hutan serta lahan, menjadi fokus utama. Untuk bencana-bencana ini, aksi yang dilakukan meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan secara intensif. Upaya pencegahan dan mitigasi berfokus pada pengurangan risiko dan dampak bencana, sementara kesiapsiagaan bertujuan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif ketika bencana terjadi.

2. **Prioritas Kedua (kuning)**, Pada periode Tahun II - IV, bencana dengan tingkat risiko sedang yang mengalami kecenderungan kejadian meningkat atau tetap, seperti gempa bumi dan kekeringan, serta bencana dengan tingkat risiko rendah tetapi kecenderungan kejadian meningkat, seperti banjir bandang, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, akan mendapat perhatian. Aksi yang dilakukan bersifat generik, lebih menekankan pada pencegahan dan mitigasi. Fokus utama adalah memperkuat sistem dan regulasi yang ada, serta mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan mitigatif yang dapat mengurangi risiko dan dampak bencana.
3. **Prioritas Ketiga (hijau)**, Pada periode Tahun III - V, bencana dengan tingkat risiko rendah dan kecenderungan kejadian tetap atau menurun, seperti epidemi wabah penyakit dan COVID-19, akan dikelola dengan pendekatan yang lebih umum. Aksi yang diambil akan bersifat generik, berfokus pada pencegahan dan mitigasi. Ini termasuk penguatan kapasitas sistem kesehatan, monitoring dan evaluasi berkala, serta penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kemungkinan kejadian bencana.

Adapun bencana gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor memiliki tingkat risiko sedang dengan kecenderungan tetap, sehingga memerlukan penanganan prioritas dibawah bencana yang memiliki risiko tinggi dengan kecenderungan kejadian yang meningkat. Sementara itu, berdasarkan hasil diskusi publik, bencana yang menjadi prioritas tinggi untuk ditangani dari tahun pertama hingga tahun ketiga adalah bencana banjir, karena bencana tersebut terjadi setiap tahun dengan frekuensi kejadian yang tinggi setiap tahunnya.

II.5 Analisa Masalah Pokok

Identifikasi masalah pokok dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk menentukan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan program/kegiatan yang akan dilakukan guna mendukung pengurangan risiko bencana, korban jiwa, kerugian, serta kerusakan lingkungan dari setiap bencana prioritas. Masalah pokok dapat diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap tiga aspek/komponen

yaitu :

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas ;
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana, berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketahanan Daerah/ IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh (BNPB) ;
3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/ misi kepala daerah terpilih atau pada pencapaian sasaran/ tujuan RPJMD terkait penanggulangan bencana ;

Di Setiap komponen tersebut dirumuskan dan diuraikan menjadi 3 masalah pokok. Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah pokok menggunakan metode analisis pohon masalah. Selain itu juga penentuan akar masalah dalam program penanggulangan bencana disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal dari Kabupaten Way Kanan. Sementara untuk menganalisa Komponen Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Komponen Kesenjangan Pencapaian RPJMD menggunakan metode Gap Analysis. Dari tiap Tiap komponen tersebut di atas akan diidentifikasi 3 Masalah Pokok.

II.5.1 Komponen Keterpaparan/Kerawanan

Kerentanan yang menyebabkan tingginya risiko bencana. Hubungan antara bencana dan kerentanan menghasilkan suatu kondisi risiko, di mana semakin tinggi kerentanan terhadap suatu bencana, maka semakin tinggi tingkat resikonya. Masalah pokok diperoleh dari analisis pohon masalah yang menjelaskan mengenai penyebab bencana prioritas yang ada di Kabupaten Way Kanan. Hasil Analisa terhadap komponen Keterpaparan/kerawanan diperoleh akar masalah sebagai berikut.

1. Tingginya risiko bencana banjir di Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh belum maksimalnya implementasi perencanaan tata ruang yang kurang memperhitungkan pola aliran sungai dalam upaya normalisasi dan normalisasi sungai. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan dalam pengelolaan ruang dan potensi bahaya banjir. Terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis

di sekitar wilayah timur Kabupaten Way Kanan yang mencakup Kecamatan Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Negeri Besar, Negara Batin yang berperan dalam tingginya bencana banjir. Kemudian, kurangnya pengarahan dalam mitigasi struktural, khususnya regulasi mengenai sempadan sungai, menyebabkan masih maraknya pembangunan pemukiman di daerah rawan banjir. Selanjutnya, kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi penyangga air, seperti kolam retensi, menyebabkan kelemahan dalam mitigasi potensi bahaya banjir. Fungsi resapan tanah dan alih fungsi lahan khususnya di wilayah sempadan sungai juga menjadi permasalahan, di mana kurangnya optimalisasi atau bahkan penurunan fungsi. Hal tersebut dibuktikan dengan Kekritisian hutan dan lahan semakin luas, mencapai 171.704 ha di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menyebabkan daerah resapan dan tangkapan hujan tidak berfungsi;

2. Tingginya risiko banjir bandang di Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh perubahan fungsi hutan di wilayah hulu serta alih fungsi lahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fungsi hutan sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir bandang karena vegetasi di hutan berperan dalam memperkuat kekuatan dan kestabilan tanah saat terjadi curah hujan yang tinggi, serta menahan erosi yang berlebihan. fungsi resapan tanah juga menjadi permasalahan, di mana kurangnya optimalisasi atau bahkan penurunan fungsi akibat alih fungsi lahan dapat memperburuk potensi bahaya banjir bandang. Alih fungsi lahan di kawasan Kabupaten Way Kanan yang sebelumnya ditanami tanaman yang dapat menampung air digantikan dengan tanaman kopi. Tanaman kopi cenderung kurang efektif dalam menahan air karena sifat tanaman ini yang memiliki sistem perakaran yang lebih dangkal dan tidak mampu menahan air dengan baik. Tanaman yang memiliki sistem perakaran yang dalam dapat lebih efisien dalam menyerap dan menyimpan air dalam tanah, sehingga berkontribusi pada fungsi resapan tanah yang optimal ;
3. Tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kebakaran yang terjadi akibat

kelalaian manusia, seperti meninggalkan puntung rokok secara sembarangan atau bekas pembakaran sampah yang dibiarkan begitu saja serta pembukaan lahan dengan menggunakan pembakaran lahan yang tidak terkontrol. Selain itu, minimnya kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pembakaran juga menjadi penyebab. Kurangnya sistem pelaporan yang efisien dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi terkait terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan turut memperburuk situasi. Kapasitas dan sumber daya manusia yang tidak memadai dalam menghadapi situasi darurat, serta kekurangan sarana dan prasarana serta persebaran pos pantau pemadam kebakaran yang tidak merata, menjadi kendala tambahan. Kurangnya sistem deteksi dini atau teknologi yang efektif untuk mengidentifikasi potensi kebakaran sejak dini juga berkontribusi pada tingginya risiko kebakaran. Selain itu, perubahan iklim yang meningkatkan kekeringan dan menciptakan kondisi yang lebih mudah terbakar juga menjadi faktor penyebab. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Way Kanan tercatat sebanyak 182 kejadian selama periode 2014-2023;

4. Tingginya risiko cuaca ekstrem di Kabupaten Way Kanan meliputi beberapa aspek. Faktor alam, seperti kurangnya curah hujan dan periode kemarau yang panjang, serta perubahan iklim yang meningkatkan intensitas dan durasi kekeringan ekstrim, menjadi kontributor utama. Kurangnya infrastruktur penampungan air bersih, diversifikasi sumber air untuk pertanian, dan ketidakmampuan mendapatkan pasokan air bersih dari sumber yang memadai juga memicu tingginya risiko cuaca ekstrem di Kabupaten Way Kanan. Infrastruktur penyimpanan air yang tidak memadai serta aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, seperti penebangan liar, memperburuk kondisi kekeringan dengan mengurangi daya dukung lingkungan. Selain itu, belum maksimalnya dalam Belum optimalnya Penyediaan pasokan air bersih dan penggunaan Penampung Air Hujan (PAH) dimusim kemarau ;
5. Tingginya risiko tanah longsor di Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh kurang optimalnya rehabilitasi hutan dan penghijauan, terutama dalam pemilihan tanaman dengan sistem perakaran yang dalam dan jarak tanam yang sesuai, khususnya di lereng curam, juga berkontribusi. Belum

optimalnya pemadatan tanah di sekitar perumahan meningkatkan risiko ketidakstabilan tanah. Kurangnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat saat terjadi curah hujan tinggi serta minimnya pemahaman tentang bahaya bermukim di daerah lereng bukit terjal meningkatkan kesadaran akan resiko tanah longsor. Himbauan, pengaturan, dan upaya penertiban yang tidak efektif kepada masyarakat untuk tidak membuat rumah di bawah, tepat di pinggir, atau dekat tebing juga menjadi masalah, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya penegakan aturan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut;

Dari hasil Analisa sebagaimana tertuang dalam akar masalah diatas, maka masalah pokok untu komponen keterpaparan/kerawanan adalah :

1. Perlunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.
2. Kapasitas sumber daya manusia dalam memahami arti bencana masih lemah dan perlu diperkuat serta didukung oleh teknologi yang optimal untuk pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
3. Pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk menangani alih fungsi lahan, illegal logging, dan ancaman terhadap ekosistem.

II.5.2 Komponen Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana

Komponen ini didasarkan pada penilaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dan masyarakat yang tertuang dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM). Hasil perumusan pembaharuan tersebut disebut sebagai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang diimplementasikan mulai tahun 2016 pada beberapa wilayah di Indonesia. IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai

0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah dan disajikan tabel indeks ketahanan daerah Kabupaten Way Kanan pada Tabel II.13.

1. Indeks $\leq 0,4$ adalah Rendah
2. Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
3. Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi

Tabel II.13 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan

No	Prioritas	Indeks Prioritas
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,76
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,33
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,92
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,40
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,48
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,55

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 -2028*

Tabel II.13 menunjukkan secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Way Kanan dalam menghadapi potensi bencana berada pada kelas sedang dengan Nilai Indeks Kapasitas Daerah adalah 0,53. Namun, nilai indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan kerentanan. Maka terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan transformasi nilai indeks ketahanan (IKDT) daerah ke dalam skala yang sama.

Hasil transformasi nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Way kanan didapati yaitu sebesar 0,44. Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana telah mulai dilakukan di Kabupaten Way kanan untuk 7 (tujuh) kegiatan prioritas penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kabupaten Way kanan. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan memiliki nilai 0,76. Kemudian pengkajian risiko dan perencanaan terpadu memiliki skor cukup rendah dibandingkan skor lainnya yaitu 0,33. Sedangkan untuk prioritas lainnya memiliki nilai sedang hingga tinggi dari setiap aspek parameter yang menjadi prioritas dalam kapasitas daerah. Informasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Way kanan perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian bencana.

Kesiapsiagaan masyarakat atau Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu komponen kapasitas daerah merupakan penilaian tingkat kesiapsiagaan yang dilakukan melalui metode survei dan wawancara mendalam (deep interview) kepada responden aparat pemerintah/tokoh dengan teknik purposive sampling pada beberapa kampung/kelurahan yang berpotensi terdampak bencana dengan menggunakan kuesioner. Di dalam kuesioner, kesiapsiagaan masyarakat terdiri dari 2 parameter spesifik dan 3 parameter generik yang dibagi dalam 19 indikator pencapaian. Dari pencapaian 19 indikator tersebut, diperoleh nilai indeks dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat di level kampung/kelurahan untuk setiap jenis potensi bencana yang ada pada daerah kabupaten/kota yang dikaji, dengan menggunakan alat bantu yang telah disediakan melalui MS Excel. Parameter tersebut adalah diantaranya Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD), Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM), Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP), Partisipasi masyarakat (PM) . Nilai indeks kesiapsiagaan masyarakat berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan disajikan tabel indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM) Kabupaten Way Kanan pada Tabel II.14

1. Indeks $\leq 0,33$ adalah Rendah
2. Indeks 0,34 – 0,666 adalah Sedang
3. Indeks 0,67 – 1 adalah Tinggi

Tabel II.14 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) Kabupaten Way Kanan

No	Jenis Bahya	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM	Indeks Kesiapsiagaan	Level Kesiapsiagaan
1	Gempa Bumi	0,21	0,2	0,49	0,54	0,31	0,35	Sedang
2	Banjir	0,33	0,32	0,49	0,54	0,31	0,4	Sedang
3	Banjir Bandang	0,33	0,32	0,49	0,54	0,31	0,4	Sedang
4	Tanah Longsor	0,25	0,26	0,49	0,54	0,31	0,37	Sedang
5	Kekeringan	0,53	0,54	0,49	0,54	0,31	0,48	Sedang
6	Cuaca Ekstrim(Angin puting beliung)	0,39	0,39	0,49	0,54	0,31	0,42	Sedang
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,52	0,5	0,49	0,54	0,31	0,47	Sedang
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,36	0,37	0,49	0,54	0,31	0,41	Sedang
9	COVID-19	0,36	0,37	0,49	0,54	0,31	0,41	Sedang
Indeks Multibahaya		0,36	0,36	0,49	0,54	0,31	0,41	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Tabel II.14 menunjukkan bahwa secara keseluruhan wilayah Kabupaten Way Kanan dalam menghadapi seluruh potensi bencana berada pada kelas sedang ditinjau dari nilai indeks kesiapsiagaan masyarakatnya sendiri. Hal yang perlu

menjadi fokus peningkatan IKM sendiri terletak pada Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD) dan Partisipasi Masyarakat (PM) yang masih menunjukkan indeks rendah di beberapa jenis bahaya. Indeks multi bahaya pada IKM memperlihatkan bahwa pemerintah dan masyarakat kabupaten Way Kanan sudah memiliki level kesiapsiagaan yang cukup baik, namun tetap perlu adanya peningkatan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana guna meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi baik dari segi material maupun nonmaterial.

Dari hasil identifikasi/penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) Kabupaten Way Kanan dapat dilihat bahwa masalah pokok ada pada prioritas 2, prioritas 5 dan prioritas 6 untuk IKD dan masalah pokok ada pada Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD) dan Partisipasi Masyarakat (PM) yang masih menunjukkan indeks rendah pada Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) di beberapa jenis bahaya yang menjadi prioritas peningkatan, sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam penanggulangan Bencana
2. Terjadi disparitas dalam perolehan Indeks Kesiapsiagaan masyarakat (IKM).
3. Program ketangguhan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan belum optimal. Diperlukan peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pembuatan rencana kontinjensi segera.

II.5.3 Komponen kesenjangan pencapaian Pembangunan Daerah (RPJMD) atau Visi/Misi Kepala Daerah

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2021-2026 disebutkan bahwa visi Kabupaten Way Kanan adalah "Way Kanan Unggul dan Sejahtera". Untuk mencapai visi tersebut dilakukan dengan empat (4) misi dan disajikan relevansi RPJMD Kabupaten Way Kanan terhadap penanggulangan bencana pada Tabel II.15 berikut.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah.

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Berikut disajikan tabel relevansi RPJMD Kabupaten Way Kanan terhadap penanggulangan bencana pada Tabel II.15.

Tabel II.15 Relevansi RPJMD Kab.Way Kanan terhadap Penanggulangan Bencana

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengurangi Dampak Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Risiko Bencana • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : RPJMD Kab.Way Kanan Tahun 2021-2026

Tabel II.15 menampilkan strategi pembangunan RPJMD maka didapatkan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 terhadap penanggulangan bencana yang menunjukkan bahwa isu penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah:

1. Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana ;
2. Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana ;
3. Membangun / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Meningkatkan Penanganan Bencana ;
4. Meningkatkan Pelayanan Bencana KebakaranMembangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana ;
5. Pengurangan Wilayah Rawan Bencana ;
6. Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana ;
7. Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran ;

Meskipun terdapat fokus yang jelas pada penanggulangan bencana, beberapa masalah kesenjangan (*Gap*) masih dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan ini:

1. Masih terbatasnya alokasi atau anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Trantibum Linmas Sub-Urusan Bencana sesuai dengan amanah peraturan;
2. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibum Linmas Sub-Urusan Bencana;
3. Dalam sub-urusan bencana, disebutkan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi alokasi anggaran, yang berdampak pada pelaksanaan penanggulangan bencana ;
4. Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM ;

Berdasarkan analisa diatas, masalah pokok dari kesenjangan pencapaian Pembangunan Daerah (RPJMD) atau Visi/Misi Kepala Daerah adalah:

1. Keterbatasan Sarana Prasarana dan anggaran Penanggulangan Bencana terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibum Linmas Sub- Urusan Bencana ;
2. Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan dan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana ;
3. Ketergantungan pada Dana Pemerintah Pusat untuk Pembiayaan Penanggulangan Bencana ;

II.6 Rumusan Isu Strategis

Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok. Penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok. Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan. Lima kriteria strategis tersebut adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.

2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Berdasarkan hasil analisis masalah pokok yang teridentifikasi dari Kajian Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat, Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan serta mempertimbangkan hasil analisis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maka didapatkan 9 masalah pokok. Sembilan (9) masalah pokok ini kemudian dijadikan isu strategis penanggulangan bencana. Berikut disajikan hasil pembobotan pada tabel pembobotan isu strategis pada Tabel II.16

Tabel II.16 Pembobotan Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		A	B	C	D	E	
1.	Perlunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.	5	5	5	5	4	24

Lanjutan Tabel II.16

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		A	B	C	D	E	
2.	Kapasitas sumber daya manusia dalam memahami arti bencana masih lemah dan perlu diperkuat serta didukung oleh teknologi yang optimal untuk pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.	5	5	2	3	1	16
3.	Pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk menangani alih fungsi lahan, illegal logging, dan ancaman terhadap ekosistem.	5	4	4	5	5	23
4.	Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam penanggulangan Bencana	5	5	5	3	4	22
5.	Terjadi disparitas dalam perolehan Indeks Kesiapsiagaan masyarakat (IKM).	5	5	3	2	2	18
6.	Program ketangguhan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan belum optimal. Diperlukan peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pembuatan rencana kontinjensi segera.	5	5	2	3	2	17
7.	Keterbatasan Sarana Prasarana dan anggaran Penanggulangan Bencana terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibum Linmas Sub- Urusan Bencana	5	3	3	5	4	20
8.	Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan dan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	3	4	4	5	5	21
9.	Ketergantungan pada Dana Pemerintah Pusat untuk Pembiayaan Penanggulangan Bencana	3	3	4	3	3	16

Tabel II.16 menjelaskan bahwa dalam proses pemilihan isu strategis, digunakan sistem penilaian dengan skor 1 hingga 5, dimana skor 5 menunjukkan tingkat relevansi yang sangat tinggi dan skor 1 menunjukkan relevansi yang sangat rendah. Penilaian ini dilakukan berdasarkan lima kriteria utama, yang masing-masing diberi kode (A) hingga (E). Setiap isu strategis dinilai secara komprehensif melalui diskusi bersama untuk memastikan objektivitas dan

kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil diskusi ini, maksimal lima isu strategis dengan skor tertinggi akan dipilih dari lima masalah pokok yang telah diidentifikasi. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa isu-isu yang dipilih benar-benar memiliki dampak signifikan dan relevansi tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi atau program yang sedang dijalankan.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, analisis permasalahan dan saran/masukan yang dikumpulkan melalui pertemuan konsultasi, maka disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.
2. Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
3. Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan.
4. Kurangnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta belum optimalnya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULAN BENCANA

III.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Penyelenggaraan penanggulangan bencana didasari oleh kebijakan penanggulangan bencana nasional. Berikut ini adalah beberapa dokumen kebijakan penanggulangan bencana nasional yang menjadi landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

III.1.1 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020 - 2044

Ketangguhan masyarakat dapat dicapai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka Panjang yang komprehensif dan terintegrasi. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044, yang juga berfungsi sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana salah satu pedoman nasional yang bisa dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Maka RIPB ini ditetapkan periode 2020- 2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun

2020-2044 adalah "**Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan**". Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

- a. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
- b. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
- c. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Maka untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana yang tertuang dalam Tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel III. 1 Kebijakan PB dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044

Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian Tahun 2020-2024
Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam PB yang adaptif dan berkelanjutan • Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana 	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
Peningkatan sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya dalam PB 	Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu serta berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data 	Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.

Lanjutan Tabel III.1

Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian Tahun 2020-2024
<p>Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk PB 	<p>Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk PB 	<p>Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.</p>
<p>Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku PB Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal Penanggulangan Bencana 	<p>Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam PB 	<p>Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola PB untuk meningkatkan akuntabilitas. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana 	<p>Meningkatnya kapasitas kabupaten/ kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 	<p>Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.</p>

Lanjutan Tabel III.1

Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian Tahun 2020-2024
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana ● Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana ● Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana ● Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi ● Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital 	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengoptimalkan perencanaan rehab-rekon pasca bencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana ● Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik 	Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana ● Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup 	Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Sumber : RIPB 2020-2024

III.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2025-2045

Penyusunan RPJPN 2025 – 2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan.

Adapun misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu “Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi” dengan arah (tujuan) pembangunan ke 7 yaitu “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”. Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam arah (tujuan) pembangunan ke 7 tersebut penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Arah kebijakan RPJPN 2025-2045 meliputi:

- a. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana.
- b. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.
- c. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif kluster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta.
- d. Pembangunan grey infrastructure (sea wall, breakwater, spillway dll) dan nature-based solution (pembangunan green belt) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.
- e. Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
- f. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.
- g. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.
- h. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
- i. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana).

- j. Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhususkan untuk wilayah Sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi “Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi”

III.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

III.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penanggulangan

Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana didasari oleh kebijakan penanggulangan bencana pada tingkat daerah. Di tingkat Provinsi Lampung terdapat kebijakan penanggulangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan ini menjelaskan asas, prinsip dan tujuan penanggulangan bencana; tanggung jawab dan wewenang penanggulangan bencana di Provinsi Lampung; Kelembagaan penanggulangan bencana; hak, kewajiban dan peran berbagai pihak dalam penanggulangan bencana; penyelenggaraan penanggulangan bencana; pendanaan dan bantuan bencana; pembinaan dan pengawasan; penyelesaian sengketa, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

III.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Way Kanan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Perencanaan dari aspek pengurangan dampak bencana secara umum sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana
- b. Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana

- c. Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana
- d. Meningkatkan Penanganan Bencana
- e. Pengurangan Wilayah Rawan Bencana
- f. Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana
- g. Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana
- h. Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran

Selain itu, di Kabupaten Way Kanan terdapat Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 yang menjelaskan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- c. Pengkomandoan melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada

di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat.

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Way Kanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III.3 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Kerangka kerja Penanggulangan Bencana merupakan kegiatan dalam proses penanggulangan bencana yang meliputi beberapa fase diantaranya:

- a. **Fase Pra-Bencana** yaitu mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini, cakupan situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana, merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya yang ditimbulkan karena Bencana.
- b. **Fase Saat Bencana atau Tanggap Darurat** yaitu dilakukan mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, sedangkan bantuan darurat adalah upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan juga air bersih.
- c. **Fase Pasca Bencana** yaitu fase mencakup pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Pemulihan (*recovery*), adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan Rekonstruksi (*reconstruction*), adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana,

sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat,

Berikut adalah Tabel III. 2 yang memuat peran dan mandat BPBD dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga dalam urusan penanggulangan bencana fase pra bencana :

Tabel III.2 Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Fase Pra Bencana

PERAN	MANDAT
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. pembuatan peta rawan bencana; 5. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana. 6. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. 2. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. penyiapan lokasi evakuasi; f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana, 3. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. mengamati gejala bencana; b. menganalisis data hasil pengamatan; c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan mengambil tindakan oleh masyarakat.

Berdasarkan Tabel III.2 di atas, terlihat bahwa peran dan mandat urusan bencana pada fase saat bencana atau tanggap darurat terbagi ke dalam 2 peran yang meliputi peran koordinasi dan peran implementasi.

Berikut adalah peran dan mandat BPBD dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga dalam urusan penanggulangan bencana fase saat bencana yang terdapat dalam Tabel III.3.

Tabel III.3 Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Fase Saat Bencana/Tanggap Darurat

PERAN	MANDAT
Komando	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. 2. Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelamatan; b. pengerahan sumber daya manusia; c. pengerahan peralatan; dan d. pengerahan logistik. 3. Pengendalian para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan standar kebutuhan minimum; 2. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 3. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana; 4. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; 2. Penentuan status keadaan darurat bencana; 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 4. Pemenuhan kebutuhan dasar; 5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Berdasarkan Tabel III.3 di atas, terlihat bahwa peran dan mandat urusan bencana pada fase saat bencana atau tanggap darurat terbagi ke dalam 3 peran yang meliputi peran komando, peran koordinasi, dan peran implementasi.

Berikut adalah peran dan mandat BPBD dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga dalam urusan penanggulangan bencana fase pasca bencana yang termuat dalam III. 4.

Tabel III.4 Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Fase Pascabencana

PERAN	MANDAT
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi: 2. Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan 3. pemulihan lintas sektor.
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana 2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada 8. pemulihan lintas sektor.

Berdasarkan Tabel III.4 di atas, terlihat bahwa peran dan mandat urusan bencana pada fase saat bencana atau tanggap darurat terbagi ke dalam 2 peran yang meliputi peran koordinasi dan peran implementasi.

Berikut adalah Tabel III.5 yang memuat tabulasi peran dan mandat kepada *stakeholder* yang memiliki kepentingan/urusan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan dalam fase pra, saat, dan pascabencana.

Tabel III.5 Peran OPD Kabupaten Way Kanan dalam Fase Pra, Saat, dan Pascabencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. 2. Melakukan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). 3. Memastikan FPRB di daerah anda telah menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan forum melalui program kerja yang didukung oleh pendanaan yang jelas 4. Menyusun mekanisme atau prosedur penyebaran informasi kebencanaan. 5. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). 6. Menyusun Rencana Kedaruratan Bencana (RKPB). 7. Memastikan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baik dalam hal kualitas dan kuantitasnya. 8. Menyediakan data dan informasi tentang karakteristik ancaman bencana telah tersedia dalam bentuk peta bahaya dan kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Komando: BPBD bertindak sebagai pusat komando yang mengkoordinasikan seluruh upaya penanggulangan bencana, termasuk koordinasi berbagai pihak. 2. Koordinasi Sumber Daya: BPBD mengkoordinasikan pengumpulan dan distribusi sumber daya, baik manusia, peralatan, maupun logistik, untuk memastikan bahwa bantuan mencapai daerah yang terdampak dengan cepat dan efisien. 3. Operasi Penyelamatan dan Evakuasi: BPBD memimpin operasi penyelamatan korban bencana. Ini termasuk pengorganisasian tim penyelamat dan relawan untuk mencari dan menyelamatkan korban yang terjebak atau terluka. 4. Penyusunan rencana operasi darurat bencana. 5. Menjalankan mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana; 2. Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pascabencana; 3. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana 4. Pelaksanaan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. 5. Menjalankan mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana. 6. Menjalankan mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
			status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus	7. Menjalankan mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi
		9. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan. 10. Mempersiapkan mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan. 11. Mempersiapkan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi. 12. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional. 13. Melakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/ berkala. 14. Melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan. 15. Melakukan penyusunan rencana kontijensi bencana banjir, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan banjir bandang. 16. Melakukan gladi rencana kontijensi bencana banjir, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan banjir bandang.	6. Menjalankan mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana. 7. Mengerahkan relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis. 8. Mengerahkan relawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana 9. Menjalankan prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana 10. Mengerahkan relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang sulit dijangkau 11. Menjalankan prosedur administrasi dan penggunaan dana darurat bencana secara akuntabel dan transparan.	dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah (Vertikal)	Komando Distrik Militer 0427/ Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel militer dan masyarakat setempat terhadap bencana. 2. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelaksanaan operasi penyelamatan korban bencana dengan cepat dan efisien, bekerja sama dengan tim penyelamat lainnya. 2. Menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya kepada masyarakat terdampak. 3. Mengamankan wilayah terdampak bencana untuk mencegah penjarahan dan menjaga ketertiban. 4. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pusat komando bencana untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam rekonstruksi infrastruktur yang rusak, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. 2. Mendukung program rehabilitasi sosial dan ekonomi untuk membantu masyarakat kembali ke kehidupan normal.
Perangkat Daerah (Vertikal)	Lapangan Udara TNI AD (Lanudad) Gatot Subroto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel militer dan masyarakat setempat terhadap bencana. 2. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelaksanaan operasi penyelamatan korban bencana dengan cepat dan efisien, bekerja sama dengan tim penyelamat lainnya. 2. Menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya kepada masyarakat terdampak. 3. Mengamankan wilayah terdampak bencana untuk mencegah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam rekonstruksi infrastruktur yang rusak, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. 2. Mendukung program rehabilitasi sosial dan ekonomi untuk membantu masyarakat kembali ke kehidupan normal.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
			penjarahan dan menjaga ketertiban. 4. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pusat komando bencana untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif.	
Perangkat Daerah (Vertikal)	Skadron-12/Serbu	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel militer dan masyarakat setempat terhadap bencana. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> Mendukung pelaksanaan operasi penyelamatan korban bencana dengan cepat dan efisien, bekerja sama dengan tim penyelamat lainnya. Menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya kepada masyarakat terdampak. Mengamankan wilayah terdampak bencana untuk mencegah penjarahan dan menjaga ketertiban. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pusat komando bencana untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif. 	<ol style="list-style-type: none"> Membantu dalam rekonstruksi infrastruktur yang rusak, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Mendukung program rehabilitasi sosial dan ekonomi untuk membantu masyarakat kembali ke kehidupan normal.
Perangkat Daerah (Vertikal)	Kepolisian Resor Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> Tetap melaksanakan giat monitoring dan samsaing ditengah-tengah Masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Pengamanan Lokasi: Polres bertugas mengamankan daerah yang terdampak bencana untuk mencegah tindak kejahatan 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait BPBD, BMKG, Kesehatan, dll guna mengevakuasi korban.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Memberi informasi awal, penyuluhan terkait tanggap segera bencana alam (bhabinkamtibmas) 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi, deteksi dini, sambaling Masyarakat untuk meminimalisir korban 4. Melaksanakan himbauan kepada Masyarakat Penyuluhan kepada jajaran dan bhabinkamtibmas untuk memberikan pernyataan dan info untuk meningkatkan kewaspadaan tempat evakuasi, menyiapkan peralatan, dan sarana prasarana yang kita miliki 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaturan Lalu Lintas: Mengatur lalu lintas untuk memastikan kelancaran evakuasi, mobilisasi bantuan, dan penanganan darurat 3. Mendukung Evakuasi Korban dan Operasi SAR (<i>Search and Rescue</i>): Membantu proses evakuasi korban bencana dari daerah berbahaya ke tempat yang aman. Bekerja sama dengan tim SAR lainnya untuk mencari dan menyelamatkan korban yang hilang atau terjebak. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Antisipasi bencana susulan, penanganan korban. 3. Memberikan penyuluhan psikologi terhadap korban 4. Secara bertahap giat pembenahan.
Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Penyusunan Kebijakan di bidang kebencanaan bersama BPBD Kabupaten 2. Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana 3. Penguatan Kapasitas Infrastruktur Penanggulangan Bencana 4. Koordinasi dengan BPBD Kabupaten Way Kanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon Darurat : Koordinasi dengan BPBD Kabupaten Way Kanan dan instansi terkait 2. Membantu evakuasi dan penyelamatan 3. Memberikan bantuan peralatan dan distribusi logistik kebutuhan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan dan Rekonstruksi 2. Evaluasi tanggap darurat
Perangkat Daerah	Kantor Pencarian dan Pertolongan Provinsi Lampung (BASARNAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kedaruratan bencana 2. Pembinaan potensi SAR 3. Pemeliharaan peralatan SAR 4. Menyiapkan peralatan 5. Koordinasi dengan semua stakeholder yg terlibat. 6. Membentuk posko pencarian dan pertolongan (BASARNAS) di Kabupaten Way Kanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siaga tanggap darurat bencana 2. Menyiapkan peralatan untuk digunakan untuk tanggap darurat 3. Koordinasi dengan semua unsur yg terlibat 4. Melaksanakan pencarian dan pertolongan dan evakuasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan dan Rekonstruksi 2. Evaluasi dan Pembelajaran 3. Penyusunan Rekomendasi

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan dengan memperhatikan aspek kebencanaan 2. Menyiapkan sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain. 3. Menyusun mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban. 4. Menyusun rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (<i>slow onset</i>) dari pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan darurat pada infrastruktur permukiman dan perumahan yang rusak akibat bencana untuk memastikan aksesibilitas bagi tim penyelamat dan distribusi bantuan. 2. Mengupayakan penyediaan air bersih bagi korban bencana, termasuk memperbaiki sistem distribusi air yang rusak dan menyediakan tangki air darurat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain. 2. Menjalankan mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban. 3. Memastikan rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (<i>slow onset</i>) dari pembangunan 4. Memastikan perbaikan rumah penduduk yang telah/sedang dilaksanakan telah mampu secara terukur mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang telah terjadi.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan dengan memperhatikan aspek kebencanaan 2. Memberikan informasi dan edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana 3. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana. 4. Menyiapkan relawan untuk melakukan kaji cepat pada masa krisis bencana. 5. Menyiapkan pergudangan logistik untuk penanganan darurat bencana. 6. Memastikan pengelolaan pergudangan logistik dilakukan secara akuntabel dan transparan. 7. Memastikan kebutuhan tempat pergudangan logistik telah terpenuhi dari segi kualitas dan kuantitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan obat-obatan. 2. Mengelola logistik bantuan termasuk penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu. 3. Memberikan dukungan psikososial kepada pengungsi untuk membantu mereka mengatasi trauma dan stres akibat bencana. 4. Memberikan perhatian khusus dan bantuan kepada anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk memastikan mereka mendapatkan kebutuhan dasar dan perlindungan. 5. Mengerahkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk mendukung kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan program pemulihan sosial untuk membantu masyarakat bangkit kembali, termasuk program pemulihan ekonomi bagi kelompok rentan. 2. Mendukung rekonstruksi fasilitas sosial yang rusak akibat bencana 3. Menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memulai kembali kehidupan mereka. 4. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan kapasitas masyarakat pasca bencana.
Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan bimbingan, koordinasi dan sosialisasi daerah rawan bencana serta pemberian sosialisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamankan area yang terdampak bencana untuk mencegah kejahatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemantauan, pengawasan dan pengecekan

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
	Kebakaran Kabupaten Way Kanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. penanggulangan dan penanganan terhadap bencana 2. Membantu merencanakan, mempersiapkan dan mengembangkan pilot proyek pengamanan kesiagaan menghadapi bencana di daerah rawan bencana. 3. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4. Latihan <i>Quick Response Time Rate</i> 5. Pemantauan wilayah rawan kebakaran 6. Inspeksi alat proteksi pemadam kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Membantu proses evakuasi warga dari daerah berbahaya ke tempat yang lebih aman. 3. Berpartisipasi dalam operasi penyelamatan korban yang terjebak atau terluka, bekerja sama dengan tim penyelamat lainnya. 4. Melakukan operasi pemadaman kebakaran baik yang terjadi akibat bencana alam seperti kebakaran 5. Mendukung kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. kondisi daerah terdampak bencana aman terkendali. 2. Investigasi kebakaran dan inspeksi pasca kebakaran 3. Pembersihan lokasi bencana 3. Siaga sarana prasarana dan personil
Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Strategis yang memperhatikan aspek kebencanaan 2. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (resapan air). 3. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (daerah tangkapan air) 4. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (restorasi sungai) 5. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (Kawasan DAS Rawan Longsor) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian cepat terhadap dampak lingkungan akibat bencana 2. Mendokumentasikan kerusakan lingkungan untuk merencanakan tindakan pemulihan yang tepat. 3. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak lingkungan dari bencana dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya pemulihan ekosistem yang rusak akibat bencana, seperti rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai. 2. Memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur lingkungan yang rusak, seperti fasilitas pengolahan limbah dan sistem drainase. 3. Melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang terjadi selama bencana dan upaya penanganan yang telah dilakukan.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan air permukaan (perlindungan, Pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan 7. Mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS 8. Menyusun kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) 		
Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan dan strategi untuk sistem transportasi yang tanggap terhadap bencana. 2. Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kesiapan transportasi dalam menghadapi bencana. 3. Menyelenggarakan pelatihan dan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas transportasi. 4. Meningkatkan kekuatan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan agar tahan terhadap bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan evakuasi masyarakat dari daerah bencana dengan menggunakan berbagai moda transportasi. 2. Berkoordinasi dengan BPBD, dinas kesehatan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran transportasi selama bencana. 3. Menyebarkan informasi mengenai rute evakuasi, kondisi jalan, dan alternatif transportasi kepada masyarakat selama bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan infrastruktur transportasi yang dibangun kembali agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan. 2. Mendukung program pemulihan ekonomi dengan memastikan akses transportasi yang memadai untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Strategis terkait kebencanaan 2. Melakukan inisiatif pengkajian kembali atau revisi tata ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi cepat terhadap kerusakan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, saluran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
		<p>kabupaten dalam rangka integrasi tata ruang Kabupaten Way Kanan dengan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memastikan proses penyusunan RTRW (persiapan- pengumpulan data-analisis data-konsepsi spasial) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB. 4. Memastikan aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan sudah mempertimbangkan prinsip PRB 5. Memastikan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah dimanfaatkan untuk mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas Kabupaten Way Kanan dalam penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana. 6. Memberikan informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana yang dapat diakses publik 	<p>drainase, dan fasilitas umum lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memantau kondisi infrastruktur secara berkelanjutan selama dan setelah bencana untuk mengidentifikasi perubahan dan kerusakan tambahan. 3. Melakukan perbaikan darurat pada jalan dan jembatan yang rusak atau terputus untuk memulihkan aksesibilitas dan mobilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan ketahanan infrastruktur yang dibangun kembali agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan. 3. Mendukung program pemulihan ekonomi dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. 4. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas teknis mengenai manajemen risiko dan penanggulangan bencana. 5. Mengembangkan kebijakan jangka panjang yang mencakup strategi penguatan ketahanan infrastruktur dan penataan ruang terhadap bencana.
Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pergudangan logistik untuk penanganan darurat bencana. 2. Memastikan pengelolaan pergudangan logistik dilakukan secara akuntabel dan transparan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalurkan bantuan pangan darurat kepada masyarakat terdampak bencana. 2. Berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan instansi lainnya untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan yang rusak akibat bencana.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memastikan kebutuhan tempat pergudangan logistik telah terpenuhi dari segi kualitas dan kuantitas. 4. Menyiapkan strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah telah mempertimbangkan scenario bencana terparah. 5. Menyiapkan strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta). 6. Menjamin ketahanan pangan untuk kebutuhan darurat bencana terparah maupun risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) di daerah 	<p>memastikan distribusi pangan darurat berjalan lancar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendukung pemulihan produksi pangan dengan menyediakan bantuan benih, pupuk, dan alat pertanian kepada petani yang terdampak bencana.
Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Strategis dan rencana kerja tahunan dengan memperhatikan aspek kebencanaan alam dan non alam 2. Melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan mengidentifikasi potensi risiko terhadap ternak dan fasilitas pertanian dan peternakan. 3. Mendukung ketersediaan pangan unggulan melalui peningkatan produksi dan produktivitas 4. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada petani dan peternak mengenai tindakan preventif untuk melindungi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi cepat terhadap kerusakan pada sektor pertanian 2. Membantu dalam pendataan kerugian hasil panen, kehilangan ternak, dan infrastruktur pertanian yang rusak akibat bencana. 3. Mengkoordinasikan distribusi bantuan pangan darurat kepada masyarakat terdampak, terutama yang kehilangan akses terhadap sumber pangan seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan program pemulihan ekonomi untuk membantu petani dan peternak bangkit kembali, seperti pemberian kredit usaha dengan bunga rendah. 2. Membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pertanian dan peternakan yang rusak akibat bencana. 3. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
		<p>ternak dan fasilitas pertanian serta peternakan dari bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mempertahankan eksistensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mewujudkan ketahanan pangan. 6. Meningkatkan keahlian PPL dengan mengikuti sekolah lapang iklim 7. Memastikan Ketersediaan terkait vaksin dan obat-obatan untuk menanggulangi wabah penyakit yang menyerang hewan. 	<p>gelombang tinggi, tsunami, dan badai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyediakan informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi berkomunikasi dengan BMKG 5. Melakukan respon cepat terhadap terjadinya wabah Zoonosis yang menyerang hewan. 	<p>petani dan peternak pasca bencana.</p>
Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan wilayah perkebunan yang rawan bencana dan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi tanaman dan infrastruktur perkebunan 2. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada petani dan pekerja perkebunan mengenai tindakan preventif untuk melindungi tanaman dan infrastruktur dari bencana. 3. Menerapkan pembangunan usaha tani perkebunan yang berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarkan informasi penting kepada petani mengenai langkah-langkah yang harus diambil selama bencana, termasuk lokasi evakuasi dan posko bantuan. 2. Berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, dan lembaga lainnya untuk memastikan respon yang terkoordinasi dan efektif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam rehabilitasi lahan perkebunan yang rusak akibat bencana, termasuk pemulihan tanah dan tanaman. 2. Mendukung rekonstruksi infrastruktur perkebunan yang rusak, seperti sistem irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas lainnya.
Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan penyuluhan dan pelatihan bagi pelaku koperasi dan UKM mengenai manajemen risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi. 2. Melakukan pemantauan terhadap risiko bencana yang mungkin mempengaruhi koperasi dan UKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti BPBD, instansi terkait, koperasi, dan pelaku usaha mikro untuk menyelaraskan upaya penanganan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan program pemulihan ekonomi untuk membantu koperasi dan UKM bangkit kembali, seperti pemberian kredit usaha dengan bunga rendah.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pendataan kerusakan yang terjadi pada sektor koperasi, usaha mikro, dan perdagangan akibat bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendukung rekonstruksi fisik tempat usaha yang rusak akibat bencana 3. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pelaku usaha pasca bencana.
Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan dan strategi untuk mitigasi risiko bencana pada sektor perikanan. 2. Sosialisasi dan fasilitasi asuransi keselamatan kerja kepada pelaku usaha perikanan 3. Memberikan penyuluhan mengenai manajemen risiko bencana, teknik budidaya ikan yang tahan terhadap kondisi ekstrim, dan langkah-langkah mitigasi. 4. Mendorong pembangunan kolam dan tambak ikan yang tahan terhadap bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan bantuan darurat berupa pakan ikan, benih ikan, dan obat-obatan bagi petani ikan yang terdampak bencana. 2. Berkoordinasi dengan BPBD, dinas pertanian, dan instansi terkait lainnya untuk mendukung petani ikan selama tanggap darurat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan OPD dan Instansi terkait untuk perbaikan sarana prasarana yang perlu direhabilitasi. 2. Mengembangkan program pemulihan ekonomi untuk membantu petani ikan bangkit kembali, seperti pemberian kredit usaha dengan bunga rendah. 3. Mendukung rekonstruksi kolam, tambak, dan infrastruktur perikanan lainnya yang rusak akibat bencana. 4. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas petani ikan pasca bencana.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Strategis dan rencana kerja tahunan dengan memperhatikan aspek kebencanaan alam dan non alam. 2. Melakukan sosialisasi rumah sakit dan puskesmas aman bencana dilakukan di daerah rawan bencana. 3. Memastikan seluruh rumah sakit daerah rawan bencana sudah melaksanakan kegiatan/program rumah sakit aman bencana berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 4. Memastikan seluruh rumah sakit di kawasan rawan bencana telah melakukan sertifikasi/evaluasi aspek safety hospital yang berkaitan dengan pemenuhan syarat akreditasi rumah sakit. 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara langsung mengenai bahaya penyakit. 6. Memastikan ketersediaan vaksin dan Obat-obatan tersedia untuk masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan satgas penanggulangan bencana di daerah, menyiapkan tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan untuk diperbantukan ke lokasi bencana 2. Berkoordinasi dengan puskesmas di sekitar lokasi bencana untuk mengirinkan tenaga kesehatan yang diperlukan dan ambulans ke lokasi bencana dan RS di Kabupaten untuk menyiapkan penerimaan penderita yang dirujuk dari lokasi bencana, memobilisasi tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan untuk diperbantukan ke lokasi bencana, melakukan penanggulangan gizi darurat. 3. Melakukan respon cepat terhadap terjadinya wabah penyakit yang menyerang manusia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan bencana, melakukan evaluasi dan analisa dampak bencana terhadap kesehatan lingkungan/KLB. 2. Menentukan strategi intervensi berdasarkan analisis status gizi setelah rapid assesment dilakukan. 3. Menyediakan pelayanan kesehatan. 4. Mengawasi kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan bagi penduduk di penampungan sementara.
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, informasi dan persandian Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi bencana untuk memantau dan menyebarkan informasi mengenai risiko bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyebaran informasi darurat kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemulihan infrastruktur komunikasi yang rusak akibat bencana untuk memastikan kelancaran arus informasi.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas komunikasi mengenai prosedur penyebaran informasi selama bencana. 3. Meningkatkan kekuatan dan ketahanan infrastruktur komunikasi seperti jaringan telekomunikasi, internet, dan pusat data di seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan. 	<p>radio, televisi, internet, dan media sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendirikan pusat informasi bencana yang menyediakan data dan informasi terkini mengenai situasi bencana. 3. Berkoordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penyebaran informasi yang konsisten dan akurat. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan ketahanan infrastruktur komunikasi yang dibangun kembali agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan. 3. Melakukan evaluasi terhadap sistem informasi dan komunikasi yang digunakan selama bencana untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya di masa mendatang.
Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat peta sekolah rawan bencana : 2. Melakukan sosialisasi kepada sekolah di tingkat TK/PAUD/SD/SMP di kawasan rawan bencana - tentang hasil/manfaat/ tujuan dari kegiatan/program sekolah aman bencana 3. Melakukan kegiatan/program sekolah aman pendidikan TK/PAUD/SD/SMP difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah aman bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sekolah yang terdampak bencana; 2. Menghitung Jumlah peserta didik yang terdampak bencana 3. Menyediakan sekolah darurat. 4. Menyediakan tenaga pengajar (guru) pada daerah terdampak bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehab akses sekolah (ruang kelas, guru, perpustakaan, utilitas) terdampak bencana 2. Menyiapkan akses pendidikan sekolah terdampak bencana (alat praktik, peralatan siswa) 3. Memastikan seluruh akses pendidikan sekolah terdampak bencana terpenuhi seluruhnya

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan dan strategi untuk memastikan kesiapsiagaan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata terhadap bencana. 2. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana kepada pemuda, komunitas olahraga, dan masyarakat sekitar destinasi wisata. 3. Membangun dan memperkuat fasilitas olahraga dan destinasi wisata yang tahan terhadap bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan fasilitas olahraga dan pemuda sebagai tempat evakuasi sementara bagi korban bencana. 2. Menyediakan dukungan logistik dan tenaga dari komunitas pemuda dan olahraga untuk membantu operasi tanggap darurat. 3. Berkoordinasi dengan BPBD, dinas kesehatan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk mendukung operasi tanggap darurat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rehabilitasi destinasi wisata yang rusak akibat bencana untuk memulihkan sektor pariwisata. 2. Memperbaiki fasilitas olahraga yang rusak untuk memastikan kegiatan olahraga dapat berjalan kembali 3. Mendukung program pemulihan ekonomi dengan menghidupkan kembali sektor pariwisata dan olahraga yang terdampak.
Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana dengan fokus pada perlindungan perempuan dan anak. 2. Menyelenggarakan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi keluarga dan komunitas dengan penekanan pada perlindungan kelompok rentan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan BPBD, dinas kesehatan, dinas sosial, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kebutuhan khusus perempuan dan anak terpenuhi. 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasional tanggap darurat dengan fokus pada kelompok rentan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan layanan rehabilitasi psikososial bagi perempuan dan anak yang terdampak bencana, termasuk konseling dan dukungan psikologis. 2. Melakukan pemulihan fasilitas dan program keluarga berencana yang terdampak bencana.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2. Melakukan evaluasi risiko keuangan daerah terhadap potensi bencana dan menyusun strategi untuk mengurangi dampak finansial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dan mendistribusikan dana darurat dengan cepat dan tepat sasaran untuk mendukung operasi tanggap darurat. 2. Berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penggunaan dana darurat bencana yang efisien dan transparan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana. 2. Mengelola dana bantuan yang diterima dari pemerintah pusat, donor, dan pihak lainnya untuk kegiatan pemulihan.
Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun RPJPD, RPJMD dan RENSTRA yang memperhatikan aspek kebencanaan 2. Melakukan inisiatif pengkajian kembali atau revisi tata ruang kabupaten dalam rangka mengintegrasikan tata ruang Kabupaten Way Kanan dengan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif 3. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, termasuk zonasi daerah rawan bencana. 4. Memastikan Terakomodirnya semua SPM bidang kebencanaan pada APBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan upaya tanggap darurat dengan instansi terkait untuk memastikan respon yang cepat dan terkoordinasi. 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan logistik bantuan, termasuk distribusi barang dan jasa kepada masyarakat terdampak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif untuk memulihkan daerah terdampak bencana. 2. Mengembangkan rencana jangka panjang yang mencakup strategi peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana di masa depan.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana 2. Terlibat dalam kegiatan terkait pengurangan risiko bencana. 3. Mengakomodasi usulan kegiatan terkait pengurangan risiko bencana 4. Mendukung pembahasan anggaran terkait pengurangan risiko bencana di daerah. 5. Menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana 6. Memanfaatkan dana aspirasi untuk kegiatan terkait pengurangan risiko bencana 7. Memantau penggunaan dana yang dialokasikan untuk program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi pelaksanaan operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. 2. Mengadvokasi kebutuhan darurat masyarakat terdampak bencana kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi pelaksanaan program pemulihan dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. 2. Mengevaluasi efektivitas program pemulihan dan rekonstruksi yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
Perangkat Daerah	Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana melalui pendekatan keagamaan. 2. Melakukan pemetaan tempat ibadah dan sarana pendidikan keagamaan yang rawan bencana dan mengidentifikasi potensi risiko. 3. Melakukan sosialisasi kepada madrasah/pondok pesantren di kawasan rawan bencana - tentang hasil/ manfaat/ tujuan dari kegiatan/program madrasah/pondok pesantren aman bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat terdampak bencana, termasuk doa bersama, konseling keagamaan, dan dukungan spiritual. 2. Menyediakan dukungan psikososial bagi korban bencana melalui pendekatan keagamaan untuk membantu mereka mengatasi trauma. 3. Menyalurkan bantuan darurat seperti makanan, air, dan perlengkapan kebersihan kepada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tempat ibadah yang rusak akibat bencana. 2. Mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan pulih dari bencana.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
		4. Melakukan kegiatan/program madrasah difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) madrasah pondok pesantren aman bencana.	masyarakat terdampak melalui jaringan tempat ibadah.	
Perangkat Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana, termasuk langkah-langkah mitigasi dan tanggap darurat. 2. Melatih relawan PMI dalam keterampilan pertolongan pertama, evakuasi, dan manajemen bencana. 3. Meningkatkan dan memperkuat fasilitas PMI seperti posko, gudang logistik, dan pusat kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan operasi penyelamatan korban bencana dengan cepat dan efisien, termasuk pertolongan pertama dan evakuasi ke tempat yang aman. 2. Menyediakan layanan kesehatan darurat, termasuk pertolongan pertama, pengobatan, dan bantuan medis lainnya 3. Menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, selimut, dan perlengkapan lainnya kepada masyarakat terdampak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan layanan kesehatan berkelanjutan bagi korban bencana, termasuk konseling dan dukungan psikososial. 2. Mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, seperti pusat kesehatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Se-Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan dan prosedur untuk tanggap darurat dan mitigasi bencana di wilayah kecamatan. 2. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana, termasuk simulasi evakuasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan respons dari berbagai sektor, termasuk kesehatan, keamanan, dan logistik. 2. Mengkoordinasikan distribusi bantuan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan kepada korban bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pemulihan infrastruktur publik yang rusak akibat bencana. 2. Mendukung rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Kantor Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyuluhan kepada warga mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana, langkah-langkah evakuasi, dan tindakan penyelamatan diri. 2. Membentuk dan melatih relawan desa/kelurahan untuk membantu dalam penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan respons dari berbagai sektor lokal, termasuk kesehatan, keamanan, dan logistik. 2. Mengkoordinasikan evakuasi warga dari area terdampak bencana ke tempat yang aman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pemulihan infrastruktur publik yang rusak akibat bencana. 2. Mendukung rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bangunan sekolah dibangun atau direnovasi sesuai standar tahan bencana untuk mengurangi risiko kerusakan. 2. Melakukan sosialisasi kepada sekolah di tingkat menengah (SMA/SMK) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/manfaat/ tujuan dari kegiatan/program sekolah aman bencana 3. Melakukan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan menengah (SMA/SMK) difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah aman bencana 4. Melakukan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan menengah (SMA/SMK) difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah aman bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan respons darurat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, memastikan komunikasi yang lancar antara sekolah, dinas pendidikan kabupaten, dan pihak berwenang lainnya. 2. Memberikan pendampingan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten dalam pelaksanaan evakuasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan proses belajar mengajar dapat segera dilanjutkan, termasuk penyediaan ruang kelas sementara jika bangunan sekolah rusak. 2. Mengkoordinasikan perbaikan dan rekonstruksi fasilitas sekolah yang rusak dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan dan pihak terkait lainnya. 3. Melakukan evaluasi terhadap tanggapan darurat yang telah dilakukan dan menyusun rencana perbaikan untuk masa depan berdasarkan pengalaman tersebut.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi prakiraan cuaca serta peringatan dini 2. Memantau dan menyebarluaskan informasi cuaca melalui media sosial dan lainnya 3. Menyelenggarakan program sekolah lapang iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau kondisi cuaca dan iklim secara terus-menerus menggunakan peralatan dan sistem pemantauan yang baik. 2. Mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi bencana alam. 	Memantau dan menyebarluaskan informasi cuaca melalui media sosial dan lainnya
Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih-Sekampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan dan analisis risiko banjir, tanah longsor, dan bencana lain yang terkait dengan aliran sungai dan penggunaan lahan di wilayah DAS. 2. Mengimplementasikan program rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengurangi risiko bencana, termasuk penanaman pohon dan penguatan vegetasi di area kritis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau kondisi aliran sungai dan DAS serta memberikan informasi terkini tentang potensi bahaya seperti banjir atau longsor kepada pihak terkait. 2. Mengaktifkan mekanisme tanggap darurat untuk mengelola aliran air dan mengurangi dampak bencana 	Melakukan rehabilitasi dan restorasi ekosistem DAS yang rusak akibat bencana, termasuk penanaman kembali hutan dan vegetasi pelindung.
Perangkat Daerah	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan Analisis Risiko 2. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung upaya evakuasi dan penyelamatan korban bencana dengan memastikan aksesibilitas jalur air dan infrastruktur pengendali banjir 2. Menggerakkan tim reaksi cepat untuk menangani situasi darurat dan memberikan dukungan teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan dan Rekonstruksi 2. Restorasi Ekosistem DAS
Perangkat Daerah	KPH Bukit Punggur dan KPH Muara Dua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Pelaksanaan Kebijakan tentang konservasi vegetatif hutan dan DAS di wilayah rawan longsor yang berkelanjutan dan memperhatikan dampak perubahan iklim. 2. Melakukan pemetaan dan identifikasi risiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung operasi Penanggulangan Bencana 2. Evakuasi dan Penyelamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Hutan 2. Evaluasi Dampak dan Kinerja 3. Penyusunan Rekomendasi

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan konservasi dan rehabilitasi hutan 4. Pengelolaan hutan berkelanjutan 		
Perangkat Daerah	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan Zonasi Kawasan Hutan 2. Penataan dan Pengelolaan Kawasan Hutan 3. Monitoring dan Evaluasi Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan Informasi 2. Mendukung operasi Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Kawasan Hutan 2. Penyusunan Rekomendasi
BUMN	PT. PLN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan Identifikasi Risiko 2. Menyusun mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah 3. Perawatan dan Penguatan Infrastruktur 4. Sistem Pemantauan dan Deteksi Dini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana 2. Pengecekan dan Perbaikan Cepat 3. Menjamin keberlangsungan dan/atau pemulihan pasokan listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restorasi Pasokan Listrik 2. Evaluasi Dampak dan Kinerja
BUMN	PT. Telkom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan Identifikasi Risiko 2. Perawatan dan Penguatan Infrastruktur: BTS, pusat data, dan jaringan kabel 3. Sistem Pemantauan dan Deteksi Dini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Penanggulangan Bencana 2. Dukungan Infrastruktur Sementara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restorasi Layanan Telekomunikasi 2. Evaluasi Dampak dan Kinerja
BUMN	Perum BULOG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dan Penyimpanan Pangan 2. Pemetaan dan Identifikasi Risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman Cepat Pangan 2. Pengoperasian Gudang Darurat 3. Dukungan Logistik untuk Penyelamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan Stok Pangan 2. Rekonstruksi Sistem Logistik 3. Evaluasi Dampak dan Kinerja
BUMN	PT. Perkebunan Nusantara I Regional VII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan Identifikasi Risiko 2. Memberikan penyuluhan kepada karyawan mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana dan prosedur keselamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung operasi tanggap darurat. 2. Menyediakan dukungan logistik dan sumber daya yang diperlukan untuk operasi tanggap darurat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan bantuan teknis dan material bagi karyawan dan masyarakat sekitar.

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
				2. Mendukung program pemulihan ekonomi, kegiatan perkebunan dan industri
Badan Usaha Swasta	Perusahaan Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek lingkungan dan pengurangan risiko bencana dengan menyediakan infrastruktur pendukung mitigasi bencana. 2. Melaksanakan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana bagi karyawan untuk memastikan mereka siap menghadapi situasi darurat. 3. Bekerjasama dengan pemerintah daerah, BPBD, dan lembaga terkait lainnya untuk mendukung upaya mitigasi bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur perusahaan untuk mendukung operasi logistik tanggap darurat. 2. Berkoordinasi dengan pemerintah, BPBD, dan lembaga tanggap darurat lainnya untuk memastikan upaya respons yang terkoordinasi dan efektif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap respons bencana yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki. 2. Mengembangkan kebijakan dan prosedur baru berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons di masa depan.
Organisasi Masyarakat/LS M/NGO	Forum Relawan Bencana Kabupaten Way Kanan, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Way Kanan, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan, Pemuda Peduli Lingkungan Dan Alam (PEMULA) Way Kanan, Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi Masyarakat 2. Pelatihan Kesiapsiagaan 3. Advokasi Kebijakan 4. Pemberdayaan Komunitas 5. Riset Komunitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi Bantuan 2. Membantu Operasi Penyelamatan, Pencarian dan Pertolongan. 3. Layanan Konseling 4. Penyebaran Informasi 5. Koordinasi dengan Pihak Terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Bantuan paket sembako atau yang lain sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi kemasyarakatan. 2. Rehabilitasi Infrastruktur: Membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. 3. Evaluasi Program 4. Riset Kebijakan 5. Rekomendasi kepada pemerintah

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
	Tangguh Bencana Way Kanan, PKK Way Kanan, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Way Kanan, Karang Taruna Way Kanan, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Way Kanan, Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung, LPBI NU Way Kanan, FAJI Way Kanan, RAPI Way Kanan, FPTI Way Kanan, ATRAC Way Kanan, PAMOR Way Kanan, KBPA Way Kanan, Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Lampung.			
Perguruan Tinggi	STIT Al-Hikmah Way Kanan, Institut	1. Melakukan riset kebencanaan 2. Implementasi keilmuan terkait dengan kebencanaan	1. Melatih tim tanggap darurat kampus atau relawan untuk	1. Melakukan penelitian multidisiplin tentang bencana

Lanjutan Tabel III.5

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
	Al-Ma'arif Way, Kanan dan Universitas Lampung (PSDKU) Way Kanan, Universitas Terbuka		<p>merespons bencana dengan cepat dan efisien.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan bantuan kemanusiaan seperti tempat penampungan sementara, makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya bagi korban bencana di kampus dan sekitarnya. Menyediakan layanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana untuk membantu pemulihan fisik dan mental mereka. 	<p>alam, manajemen risiko bencana, dan pemulihan pasca-bencana untuk meningkatkan pemahaman dan respons terhadap situasi darurat.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan teknologi dan inovasi baru untuk deteksi dini, mitigasi, dan penanggulangan bencana yang lebih efektif.
Media	Media Cetak, Media Elektronik dan Media Online	<ol style="list-style-type: none"> Edukasi dan Penysadaran Masyarakat Penyebaran Informasi Terkini Mendorong Partisipasi Publik Kampanye Kesadaran Bencana Publikasi Program Pemerintah dan Lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> Penyebaran Informasi Darurat Mendukung Operasi Penyelamatan Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> Liputan Proses Pemulihan Penyebaran Informasi Bantuan

III.4 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Selain itu Pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD untuk tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan *c.q* Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Strategi ini merupakan kombinasi dari instrumen-instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan transparan.

Berdasarkan fase bencana, sumber pendanaan dapat dialokasikan sebagai berikut:

III.4.1 Sumber Pendanaan Fase Pra Bencana

Pendanaan fase pra bencana bersumber dari APBN atau APBD dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, terdapat mekanisme penyaluran Dana Bersama pada tahap prabencana yang dapat dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau kementerian negara/ lembaga kepada BNPB. Selain itu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022, Dana Desa dapat dialokasikan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

III.4.2 Sumber Pendanaan Fase Tanggap Darurat

Pemerintah pusat dan daerah melalui anggaran BNPB dan BPBD menyiapkan dana siap pakai dan Belanja Tidak Terduga sebagai sumber pendanaan fase tanggap darurat. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana juga mengatur mekanisme penyaluran Dana Bersama yang dapat menjadi sumber pendanaan fase tanggap darurat. Sumber pendanaan pada fase tanggap darurat juga diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2020, dimana pemberian bantuan dana siap pakai dalam negeri didasarkan atas:

- a. Adanya penetapan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau presiden;
- b. Adanya penetapan status keadaan tertentu;

Pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luasan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai peraturan perundang undangan.
- b. Berdasarkan penetapan status kepala daerah dan atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
- c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

III.4.3 Sumber Pendanaan Pascabencana

Pendanaan pasca bencana bersumber dari APBN dan atau APBD. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, terdapat mekanisme penyaluran Dana Bersama pada tahap prabencana yang dapat dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau kementerian negara/ lembaga kepada BNPB.

Bantuan sosial pada fase pasca bencana merupakan bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Prosedur pengajuan bantuan sosial oleh pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dengan kategori pengajuan bantuan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Untuk pengajuan bantuan sosial yang tidak direncanakan, dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Disamping anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), penanggulangan bencana daerah ini juga dapat dihimpun melalui hibah, donasi, *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti *pooling fund* bencana yang dapat dimanfaatkan pada fase pra dan pasca bencana. Pengumpulan uang dan barang terkait kepentingan kebencanaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

IV.1 Tujuan dan Sasaran

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen perencanaan yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, definisi tujuan yang dimaksud adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan. Tujuan merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis) yang dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis dengan tujuan RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan dirumuskan dalam bentuk kalimat positif yang mencakup ide besar.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang dimaksud adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Dengan kata lain, apabila sasaran tercapai pada akhir pelaksanaan RPB, maka sebagian besar masalah yang dirumuskan dalam isu strategis sudah terjawab. Masing-masing sasaran diterjemahkan dalam bentuk indikator hasil. Sebaiknya satu tujuan dicapai dengan dua atau tiga sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator sasaran Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan substansi tujuan dan sasaran adalah holistik-tematik, integratif dan spasial.

Sedangkan kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan rumusan sasaran RPB, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 ialah:

- a. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;

- c. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategi pembangunan daerah; dan
- d. memenuhi kriteria *SMART-C* (*specific*/spesifik, *measurable*/terukur, *achievable*/ bisa dicapai, relevan, *time bound*/tepat waktu dan *continuously improve*/ pengembangan yang berkelanjutan).

Berikut ini adalah Tabel IV.1 yang berisi tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran.

Tabel IV.1 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Perlunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.	1. Mewujudkan pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan yang optimal dalam rangka mengurangi risiko bencana	Ditingkatkannya pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana	1. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan DAS	Keterpaduan rencana tata ruang terhadap pengelolaan DAS
			2. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko bencana banjir dan banjir bandang
			3. Terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan hutan untuk mengurangi risiko bencana.	Penurunan alih fungsi lahan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan
			4. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.
2. Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.	2. Meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan	Ditingkatkannya Indeks ketahanan daerah hingga 0.75	5. Memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Meningkatnya kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana daerah
			6. Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana daerah

Lanjutan Tabel IV.1

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			7. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	Terpenuhinya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak bencana
3. Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan.	3. Mewujudkan integrasi isu bencana dalam rencana pembangunan.	Ditingkatkannya integrasi isu bencana dalam rencana pembangunan	8. Terwujudnya rencana pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Keterpaduan rencana pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana.
4. Kurangnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	4. Meningkatkan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	Ditingkatkannya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	9. Meningkatnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	Keterlibatan multi stakeholder dalam penanggulangan bencana.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta belum optimalnya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.	5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta anggaran penanggulangan bencana.	Ditingkatkannya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta anggaran penanggulangan bencana.	10. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang layak	Peningkatan persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
			11. Memperkuat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.	Meningkatnya upaya penguatan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana

Berikut ini adalah Tabel IV.2 yang berisi proyeksi target pencapaian indikator tujuan 3, yaitu meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan hingga tahun 2029.

Tabel IV.2 Proyeksi Target Indikator Tujuan 3

Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline (Kondisi Tahun 2023)	Target Tahunan Tujuan					Kondisi Akhir Periode 2030
			Tahun KE-1 (2025)	Tahun Ke-2 (2026)	Tahun Ke-3 (2027)	Tahun Ke-4 (2028)	Tahun Ke-5 (2029)	
Meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan	Ditingkatkannya Indeks ketahanan daerah hingga 0.75	0.53	0.58	0.63	0.65	0.67	0.70	0.75

IV.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Berdasarkan sasaran, sajikan strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun.

Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB atau satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Pilihan strategi didasarkan pada analisis konteks di masing-masing daerah, sehingga mungkin akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Beberapa pertimbangan untuk penentuan strategi di antaranya ialah:

- a. Tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai tingkatannya (provinsi atau kabupaten/kota);
- b. Mandat dari peraturan perundangan terkait, misalnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Kondisi internal dan eksternal pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh daerah;

- e. Tingkat efektifitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini adalah Tabel IV.3 yang berisi strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran.

Tabel IV.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Perlunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.	1. Mewujudkan pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan yang optimal dalam rangka mengurangi risiko bencana	Ditingkatkannya pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana	1. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan DAS	Keterpaduan rencana tata ruang terhadap pengelolaan DAS	Menyusun dokumen perencanaan tata ruang daerah yang memperhatikan DAS	Harmonisasi RTRW dan RDTR yang memperhatikan DAS
			2. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko bencana banjir dan banjir bandang	Penguatan pengelolaan dan pemantauan aliran sungai pada kawasan DAS rawan bencana	Penerapan pengelolaan dan pemantauan sungai di kawasan DAS yang rawan bencana
			3. Terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan hutan untuk mengurangi risiko bencana.	Penurunan alih fungsi lahan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan	Penguatan regulasi dan standar analisis serta integrasi dokumen kajian ke dalam dokumen perencanaan.	Penerapan regulasi dan standar analisis serta integrasi dokumen kajian ke dalam dokumen perencanaan.
			4. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan	Penguatan pengelolaan, pengendalian dan	Penerapan upaya pengelolaan, pengendalian dan

Lanjutan Tabel IV.3

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pemanfaatan hutan dan lingkungan.	pemanfaatan hutan dan lingkungan.	pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.	pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.
2. Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.	2. Meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan	Ditingkatkannya Indeks ketahanan daerah hingga 0.75	5. Memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Penguatan pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Penerapan sistem pencegahan dan mitigasi bencana daerah
			6. Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana daerah	Penguatan upaya penanganan darurat bencana daerah	Penerapan sistem penanganan darurat bencana daerah
			7. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	Terpenuhinya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak bencana	Pembangunan mekanisme daerah untuk pemulihan pasca bencana	Pelibatan OPD dan sektor-sektor kunci terkait dalam membangun mekanisme pemulihan pasca bencana
3. Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan.	3. Mewujudkan integrasi isu bencana dalam rencana pembangunan.	Ditingkatkannya integrasi isu bencana dalam rencana pembangunan.	8. Terwujudnya rencana pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan	Terpadunya rencana pembangunan dengan prinsip-prinsip	Mengintegrasikan rencana pembangunan dengan Rencana Penanggulangan	Integrasi dokumen RPJMD dan RPB

Lanjutan Tabel IV.3

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	pengurangan risiko bencana	Bencana	
4. Kurangnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	4. Meningkatkan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	Ditingkatkannya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	9. Meningkatnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	Peningkatan keterlibatan multi stakeholder dalam penanggulangan bencana.	Koordinasi dan kolaborasi multi stakeholder penanggulangan bencana daerah	Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan kolaborasi multi stakeholder penanggulangan bencana daerah
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta belum optimalnya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.	5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta memperkuat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.	Ditingkatkannya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta anggaran penanggulangan bencana.	10. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai.	Peningkatan persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Pemenuhan dan penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Melakukan pemenuhan dan penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan memperhatikan prioritas kebutuhan.
			11. Memperkuat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.	Meningkatnya upaya penguatan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana	Penguatan upaya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana yang transparan dan akuntabel.	Penerapan sistem pengelolaan anggaran penanggulangan bencana yang transparan dan akuntabel.

IV.3 Program Penanggulangan Bencana

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Program adalah untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (*outcome*), bukan keluaran langsung (*output*). Berikut adalah Tabel IV.4 yang berisi sasaran, indikator sasaran, program dan indikator program.

Tabel IV.4 Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program
1. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan DAS	Keterpaduan rencana tata ruang terhadap pengelolaan DAS	Penyusunan rencana tata ruang yang memperhatikan DAS. (RTRW dan RDTR)	Tersusunnya RTRW dan RDTR yang memperhatikan DAS
2. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko bencana banjir dan banjir bandang	Pengelolaan DAS untuk pengurangan risiko bencana	Terkelolanya DAS untuk pengurangan risiko bencana
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air sungai, udara, dan juga tanah
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap
3. Terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan hutan untuk mengurangi risiko bencana.	Penurunan alih fungsi lahan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup kabupaten	Dokumen kajian lingkungan yang disusun
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air sungai, udara, dan juga tanah
		Pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana
4. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana.	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana	Penyelenggaraan kegiatan reforestasi dan penghijauan di kawasan hutan yang terdegradasi	Persentase lahan hutan yang direstorasi

Lanjutan Tabel IV.4

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program
		Pengelolaan Hutan	Luas tutupan lahan
5. Memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
		Program Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kegiatan yang relevan dalam Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terkait bencana	Cakupan Pelayanan Informasi Publik yang dikelola
		Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Cakupan jaringan trayek terlayani angkutan umum
6. Memperkuat upaya penanganan tanggap darurat bencana daerah	Meningkatnya upaya penanganan tanggap darurat bencana daerah	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana	Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana
		Pelatihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Peningkatan kesiapan Aparatur daerah dan masyarakat terhadap bencana Terlaksananya SPM tentang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
7. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	Terpenuhinya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Pengembangan Perumahan (Pemulihan)	Persentase rehabilitasi rumah sesuai standar pelayanan minimal (SPM)
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan (Kopi)

Lanjutan Tabel IV.4

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar
8. Terwujudnya rencana pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Keterpaduan rencana pembangunan yang berbasis PRB	Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja
9. Meningkatnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	Keterlibatan multi stakeholder dalam penanggulangan bencana.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja
		Koordinasi dan Kerjasama para pihak dalam penyelenggaraan sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase terselenggaranya sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim
		Pengelolaan Hutan	Luas Tutupan Lahan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	Persentase penanggulangan bencana kebakaran yang tertangani
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE
		Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda

Lanjutan Tabel IV.4

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program
			Wirausaha
		Program perlindungan khusus anak	Persentase Perlindungan Anak yang tertangani
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
10. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai.	Peningkatan persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal Persentase penanganan tanggap darurat bencana
		Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Jalan Yang Dibangun
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan Perda dan Perkada sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11. Memperkuat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.	Meningkatnya upaya penguatan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana	Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Point)

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

V.1 Rencana Aksi

Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai bentuk Pengurangan Risiko Bencana merupakan program kegiatan dalam kebijakan dalam penanggulangan bencana yang disusun bersama oleh seluruh dari pemangku kepentingan daerah (Pemerintah, dunia usaha/industri, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait) sebagai bentuk wujud kesepakatan bersama dalam proses upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Way Kanan. Rencana aksi ini disusun dengan mengacu pada hasil dari isu strategis pilihan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dari pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan pada tahapan penyusunan Rencana Pengurangan Bencana (RPB). Beberapa hal menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana:

- a. Rencana tersebut disusun di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Di tingkat provinsi, rencana tersebut dibuat dengan memperhatikan semua pemangku kepentingan dalam sebuah forum yang mengintegrasikan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan unit-unit kerja terkait (OPD), yang semuanya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- c. Rencana Aksi Daerah disahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana dilakukan untuk jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai rencana aksi, RAD ini menjelaskan terkait program kegiatan, aksi kegiatan serta dengan indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan yang ada, sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Way Kanan, dengan pepaduan kontribusi para

pihak baik dari lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan, instansi, dan organisasi perangkat vertikal yang berkaitan dengan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana.

Rencana Aksi Daerah disusun menggunakan tabulasi untuk mempermudah pemahaman dan implementasi, serta memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dalam tabel atau matriks aksi prioritas penanggulangan bencana, terdapat program/kegiatan yang mencakup semua aspek manajemen bencana, tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Mulai dari kegiatan pra-bencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, semuanya tercakup dalam tabel tersebut. Hal ini memastikan bahwa semua tahapan penanggulangan bencana dapat diidentifikasi dan dilaksanakan secara terorganisir.

Strategi dalam penyelarasan kegiatan dan program Rencana Aksi Daerah dengan program serta kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan mencantumkan kodefikasi dan Nomenklatur. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan dikaitkan dengan kode dan istilah yang ditetapkan untuk perencanaan pembangunan daerah. Struktur Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Tabel V.1 sebagai berikut.

Tabel V.1 Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI		
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Isu Strategis 1 - Perlunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.																								
1.	Penyusunan rencana tata ruang yang memperhatikan DAS.	Tersusunnya RTRW dan RDTR yang memperhatikan DAS	01.03.12	Analisis dan Evaluasi Penggunaan Lahan	Persentase lahan yang telah dilakukan monev sesuai dengan tata ruang yang optimal	1.03.12.2.02	Pemetaan penggunaan lahan saat ini dan identifikasi area kritis Penilaian dampak penggunaan lahan terhadap DAS.	Updating lahan kritis	1 DAS dalam 5 tahun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	DAS Tulang Bawang (Kab. Way Kanan)	Utama: BPDAS, Dinas Kehutanan Pendukung: DLH, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	APBN/APBD	RPJMN /RPJMD /RENSTRA		
				Penyusunan Rencana Tata Ruang	Persentase dokumen RTRW yang telah disusun dan memperhatikan DAS.		1.03.12.2.02.0001	Penyusunan atau peninjauan kembali (PK) RTRW dengan integrasi pengelolaan DAS. Konsultasi Publik dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan validasi.	1.03.12.2.02.0001	1 Dokumen dalam 5 tahun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	Kabupaten Way Kanan	Utama : PUPR Pendukung: DLH, BPDAS	APBN	RPJMN /RPJMD /RENSTRA	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Materi teknis rencana tata ruang yang disetujui	01.03.12.2.02	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	01.03.12.2.02.0005	1 Dokumen dalam 5 tahun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Rp600.000,00	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Way Kanan	Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	APBD	RENSTRA Dinas PUPR
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	01.03.12.2.02.0001	1 Dokumen dalam 5 tahun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Rp150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Way Kanan	Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	APBD

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI	
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
			3 28 06	Integrasi RTRW dengan Rencana Pengelolaan DAS	Penyusunan Dokumen Integrasi RTRW dan Rencana Pengelolaan DAS	3 28 06 1.01	Rencana Pengelolaan DAS Terpadu	3 28 06 1.01 0001	1 DAS dalam 5 tahun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	DAS Tulang Bawang (Kab. Way Kanan)	Utama : BPDAS	APBN	RPJMN /RPJMD /RENSTRA	
2.	Pengelolaan DAS untuk pengurangan risiko bencana	Terkelolanya DAS untuk pengurangan risiko bencana	3 28 06	Implementasi tata kelola air yang telah dioptimalkan	Persentase Implementasi tata kelola air yang telah diperbaiki dan dioptimalkan	3 28 06 1.01	Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola DAS. Pengembangan Kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan dan manajemen air.	3 28 06 1.01 0001	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	Forum DAS Provinsi Lampung	Utama: BPDAS Pendukung: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	APBN	RPJMN /RPJMD Kabupaten	
				Penguatan Tata Kelola Pengelolaan dan Manajemen Air	Monitoring dan Evaluasi Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas Air	3 28 06 1.01	Mengelola aliran air, memastikan keberlanjutan pasokan air, dan mengurangi risiko banjir dan kekeringan.	3 28 06 1.01 0002	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	HL KPH Bukit Punggur, DAS Tulang Bawang, Kab. Way Kanan	Utama: BPDAS Pendukung: Dinas Perikanan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	APBN/APBD	RPJMD KABUPATEN
				Penyusunan Rencana Normalisasi Sungai, Penanaman tanaman penyangga di sepanjang aliran anak sungai	Intensitas air yang tinggi karena terahannya aliran dari anak sungai ke sungai besar	-	Mengidentifikasi area prioritas untuk reforestasi, Penyelenggaraan rapat koordinasi Reguler, Pengerukan aliran sungai, dan Monitoring pertumbuhan dan kesehatan pohon serta evaluasi dampak deforestasi terhadap kualitas air dan tanah.	-	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan 100%	-	-	-	-	Rp50.000.000,00	-	-	Lokasi HGU Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung	Tim Teknis Manajemen Perusahaan (PT, P LP)	CSR PT. PLP

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
				Penyusunan rencana sasaran prioritas dan titik lokasi Sosialisasi Kepada Masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam menjaga kelestarian alam dan kebersihan Daerah Aliran Sungai	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan kebersihan Daerah Aliran Sungai	-	Sosialisasi, Observasi Lingkungan, Menghimpun Aspirasi Masyarakat terkait Kelestarian Alam dan Daerah Aliran Sungai sebagai bahan input rumusan kebijakan pemerintah daerah	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Tintatif Berdasarkan Sasaran Prioritas	Utama : Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Way Kanan. Pendukung : ,KPH,DLH,BPB D, BPDAS, Perusahaan Swasta Terkait	APBD/APBD/ Dunia Usaha,	RPJMD KABUPATEN
3.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air sungai, udara, dan juga tanah	2 11 03	Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kot a	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap air sungai, udara, dan media tanah	2 11 03 2.01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air sungai, udara dan tanah	2 11 03 2.01 0001	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Kabupaten Way Kanan	Utama: DLH Pendukung: Laboratorium lingkungan DLH Provinsi Lampung	APBD	IKLH Kabupaten
4.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	3 25 03	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kot a	Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan nelayan kecil	3 25 03 2.02	Pengembangan kapasitas kelayan kecil pengembangan kapasitas nelayan kecil	3 25 03 2.02 0001	30 Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Rp60.000.000,00	-	-	-	-	Perairan umum daratan (sungai, embung) wilayah Kabupaten Way Kanan	Utama : Dinas Perikanan	APBD	RPJMD KABUPATEN
5.	Penyelenggaraa n kajian lingkungan hidup kabupaten	Dokumen kajian lingkungan yang disusun	2 11 02	Penyelenggara an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	2 11 02 2.02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2 11 02 2.02 02	1 Dokumen 5 Tahun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Rp200.000.000,00	-	-	-	-	Kabupaten Way Kanan	Utama : DLH	APBD	IKLH Kabupaten

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI			
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029							
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang disusun																				
6.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air sungai, udara, dan juga tanah	2 11 03	Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap air sungai, udara, dan media tanah	2 11 03 2.01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air sungai, udara dan tanah	2 11 03 2.01 0001	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Kabupaten Way Kanan	Utama : DLH	APBD	RENSTRA/IKLH Kabupaten			
7.	Pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana	01 03 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Materi teknis rencana tata ruang yang disetujui	01.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	01.03.12.2.02.0001	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Kabupaten Way Kanan	Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	APBD	RENSTRA Dinas PUPR			
8.	Penyelenggaraan kegiatan reforestasi dan penghijauan di kawasan hutan yang terdegradasi	Persentase lahan hutan yang direstorasi	2 16 03	Reforestasi dan Penghijauan Kawasan Hutan Terdegradasi	Persentase lahan hutan yang direstorasi dan dihijaukan kembali	1 03 02 2 01	Penanaman pohon dan tanaman lokal yang sesuai dengan ekosistem setempat	2 16 03 2.02 0009	Jumlah tanaman	Jumlah tanaman	Jumlah tanaman	Jumlah tanaman	Jumlah tanaman	-	-	-	-	-	Tintatif Berdasarkan Sasaran Prioritas	Utama : BPDAS, KPH Pendukung: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan,	APBD	RPJMD KABUPATEN			
			BPKTL XX Bandar Lampung	Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan	Kejelasan batas dan fungsi kawasan hutan	BPKHTL XX Bandar Lampung	Melakukan pengukuran batas dan fungsi kawasan hutan	BPKHTL XX Bandar Lampung	1 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	-	-	-	-	-	Tintatif berdasarkan overlay peta rawan dengan hutan sosial	Utama: BPKHTL	APBN/DUNIA USAHA	RENSTRA			
			-	penyusunan rencana sasaran prioritas dan titik lokasi Sosialisasi Kepada Masyarakat mengenai	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat mengenai dampak	-	Sosialisasi, Observasi Lingkungan, Menghimpun Aspirasi Masyarakat terkait Upaya Reforestasi sebagai bahan input	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Tintatif Berdasarkan Sasaran Prioritas	Utama : Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Way Kanan. Pendukung : ,KPH,DLH,BPB	APBD/APBD/, Dunia Usaha	RPJMD KABUPATEN			

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI	
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
				dampak deforestasi dan pentingnya partisipasi dalam upaya Reforestasi	deforestasi dan pentingnya Reforestasi dan pengembalian fungsi lahan		rumusan kebijakan pemerintah daerah												D, Perusahaan Swasta Terkait				
9.	Pengelolaan Hutan	Luas tutupan lahan	3.28.3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	3.28.3.1	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.3.1.04	245 ha	245 ha	245 ha	245 ha	245 ha	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Way Kanan	KPH Bukit Punggur, KPH Muara Dua	APBN/APBD	RPJMD/RESTRARA/RPHJP	
<p><i>Isu Strategis 2 - Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam penanggulangan Bencana dengan dibuktikan nilai IKD yang berada pada kelas Sedang dengan beberapa aspek masih sangat rendah yang perlu ditingkatkan seperti aspek Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Perkuatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.</i></p>																							
1.	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	01 05 03	Penyusunan Kajian Perencanaan bencana yang terintegrasi	Tersusunnya dokumen RPB yang menjadi landasan SKPD	01 2.01	Pengintegrasian dokumen RPB terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam penyusunan perencanaan	01 2.01 0006	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp42.561.600,00	Rp42.561.600,00	Rp42.561.600,00	Rp42.561.600,00	Rp42.561.600,00	Kabupaten Way Kanan	Utama : BPBD Pendukung :BAPPEDA	APBD	RPJMN /RPJMD /RENSTRA	
							Penyusunan Rencana Kontijensi	01.05.03.2.02.0009	100%	-	-	-	-	Rp155.000.000,00	-	-	-	-	Blambangan Umpu	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RESTRARA KABUPATEN	
							Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	01.05.03.2.02.0013	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Blambangan Umpu	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RESTRARA KABUPATEN	
							Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	01.05.03.2.02.0006	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Blambangan Umpu	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RESTRARA KABUPATEN
							Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	01.05.03.2.02.0008	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	Rp420.000.000,00	Rp420.000.000,00	Rp420.000.000,00	Rp420.000.000,00	Rp420.000.000,00	Rp420.000.000,00	Blambangan Umpu	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RESTRARA KABUPATEN
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 05 03 2.02	Penyusunan Rencana Penanggulangan	01.05.03.2.02.0011	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp200.000.000,00	-	-	-	-	Blambangan Umpu	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RESTRARA KABUPATEN	

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI				
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029								
							Pascabencana (R3P) Kab/Kota																			
2.	Program Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kegiatan yang relevan dalam Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	01 01 07	Pesantren siaga bencana	Meningkatkan ketangguhan pesantren dalam upaya pencegahan bencana	1 01 07 7.01	Kegiatan risiko bencana di tingkat pesantren, menyusun rencana kontijensi, pelatihan tanggap darurat dan simulasi terjadi bencana	1 01 07 7.01 0014	2 Pesantren	2 Pesantren	2 Pesantren	2 Pesantren	2 Pesantren	-	-	-	-	-	Semua Pesantren (terutama rawan terjadi bencana)	LPBI NU, Pesantren, Bagana, PMI dan Pemerintah Kabupaten	APBN/APBD, Swadaya/APB KAmP	RENSTRA IKD				
			3 27 04	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan dan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Penjaminan Kesehatan Hewan dan Wabah Penyakit Hewan Menular	3.27.04.2.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	3.27.04.2.01.0004	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	15 Kecamatan di Kabupaten Way Kanan	Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan	APBD	RPJMD KABUPATEN				
			3 27 04	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan dan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Penjaminan Kesehatan Hewan dan Wabah Penyakit Hewan Menular	3.27.04.2.01	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	3.27.04.2.01.0007	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	15 Kecamatan di Kabupaten Way Kanan	Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan	APBD	RPJMD KABUPATEN				
			01 06 06	Pencegahan/de teksis dini terkait potensi bencana alam	Jumlah Data dan Informasi yang Dikumpulkan dan Kecepatan Respon Terhadap Peringatan Dini	1 06 06 2.02	Patroli mitigasi bencana untuk memastikan situasi kondisi keadaan aman	1 06 06 2.02 0001	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	Kabupaten Way Kanan	POLRES	APBD	RPJMD/RENSTRA				

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terkait bencana	Cakupan Pelayanan Informasi Publik yang dikelola	2.16.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Publik yang dikelola	2.16.02.2.1	Pelayanan Informasi Publik	2.16.02.2.01.0017	81 Poin	Poin	Poin	Poin	Poin	Rp60.000.000,00	-	-	-	-	Blambangan Umpu	Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelola Website Kabupaten (www.waykanan.kab.go.id), Media Massa Pendukung: Pemerintah Kampung	APBD	RPJMD KABUPATEN, RENSTRA KOMINFO WAY KANAN
							Layanan Hubungan Media	2.16.02.2.01.0017	84 Poin	84 Poin	84 Poin	84 Poin	84 Poin	Rp5.908.680.000,00	Rp5.908.680.000,00	Rp5.908.680.000,00	Rp5.908.680.000,00	Rp5.908.680.000,00	Blambangan Umpu	Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelola Website Kabupaten (www.waykanan.kab.go.id), Media Massa	APBD	RPJMD KABUPATEN, RENSTRA KOMINFO WAY KANAN
							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.16.02.2.01.0017	84 Poin	84 Poin	84 Poin	84 Poin	84 Poin	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Blambangan Umpu	Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelola Website Kabupaten (www.waykanan.kab.go.id), Media Massa	APBD	RPJMD KABUPATEN, RENSTRA KOMINFO WAY KANAN
4.	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Cakupan jaringan trayek terlayani angkutan umum	2.15.02	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan	2.15.02.2.06	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.017	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Kabupaten WK	Utama : Dishub	APBD	RPJMD KABUPATEN

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI				
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029								
				Kabupaten/Kota	Jalan Kabupaten																					
5.	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.	Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.	01 05 03	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	01.05.03.2.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	01.05.03.2.01.0004	100%	100%	100%	100%	100%	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Daerah Rawan Bencana	Utama : BPBD Kab. Way Kanan Pendukung: Pemerintah Kampung	APBD/APBKAmpp	RPJMD/RENSTRA KABUPATEN				
				Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 05 03 2.02	Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten	1 05 03 2.02 0017	100%	100%	100%	100%	100%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Blambangan Umpu	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RENSTRA KABUPATEN				
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	01.05.03.2.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	01.05.03.2.02.0016	100%	100%	100%	100%	100%	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00	Daerah Rawan Bencana	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD KABUPATEN				
				Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1 05 03 2.02	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 05 03 2.02 0010	100%	100%	100%	100%	100%	Rp4.035.050.372,00	Rp4.035.050.372,00	Rp4.035.050.372,00	Rp4.035.050.372,00	Rp4.035.050.372,00	Tintatif (Kabupaten Way Kanan)	Utama : BPBD PROVINSI/KAB Pendukung: PUPR, DINKES, Palang Merah Indonesia (PMI), LANUDAD Gatot Subroto	APBD/APBN	RENSTRA PB				

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
				Terlaksananya keluarga yang siap siaga dalam bencana alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	01 05 03 1.04	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	01 05 03 1.04 06	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Tintatif (Kabupaten Way Kanan)	Utama : BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Pendukung : Pemerintah Kampung	APBD/APBN	RENSTRA PB
			-	Penyusunan Rencana sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase jumlah lokasi penyelenggaraan sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim	-	Mengidentifikasi wilayah rawan bencana	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tentatif	Utama : BMKG Pendukung: BPBD,BASARNAS	APBD/APBN	RENSTRA
			04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pe nanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	04 2.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	04 2.01 0009	100%	-	-	-	-	Rp70.000.000,00	-	-	-	-	WAY KANAN	SAT POL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	APBD	RPJMD KABUPATEN
				Pelatihan, Penyediaan alat kebakaran dan Pembuatan Menara Pantau api	Kondisi Kemarau dan kerapatan semak belukar	-	Pelatihan personil pemadam kebakaran secara berkala, pembuatan himbau larangan membakar hutan, pemutakhiran alat kebakaran	-	100%	-	-	-	-	Rp25.000.000,00	-	-	-	-	Lokasi HGU Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung	Tim Teknis Manajemen Perusahaan (PT.P LP)	CSR PT. PLP	RENSTRA PERUSAHAAN
			02 09 03	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)	2 09 03 202	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 09 03 202 0003	2 Ton	Ton	Ton	Ton	Ton	Rp33.250.000,00	-	-	-	-	Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga	Bidang Cadangan dan Distribusi Pangan, Pendukung : Perum BULOG	APBD	RPJMD KABUPATEN

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
			01.06.06	Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang melaksanakan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	1.06.06.2.02	Koordinasi, Sosialisasi & Pembentukan Kampung Siaga Bencana(KSB)	1.06.06.2.02.0001	1 Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Rp25.000.000,00	-	-	-	-	Kecamatan Negeri Agung	Dinas Sosial	APBD II	RPJMD KABUPATEN
					Jumlah Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas	1.06.06.2.02	Koordinasi, Sosialisasi & Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1.06.06.2.02.0001	40 orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Rp24.200.000,00	-	-	-	-	Kecamatan Blambangan Umpu	Dinas Sosial	APBD II	RPJMD KABUPATEN
			-	Penguatan SDM Melalui Pelatihan Kesiapsiagaan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan Kegiatan	-	Pelatihan Kesiapsiagaan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam	-	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Tentatif	Utama : Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Way Kanan. Pendukung : BPBD, BNPB, KODIM 0427	APBD	RENSTRA PB
			01.01.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar	01.01.02.2.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kawasan Rawan Bencana)	1.01.02.2.01.0028	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Way Kanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD	RENSTRA/RPJM KABUPATEN
			01.01.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kawasan Rawan Bencana)	1.01.02.2.02.0041	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Way Kanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD	RENSTRA/RPJM KABUPATEN

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI		
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
				Pengelolaan Pendidikan Madrasah Aliyah	Rerata kompetensi Literasi dan Numerasi Madrasah Aliyah	1.01.02.1.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Madrasah Aliyah	1.01.02.1.01.0052	18 Madrasah	18 Madrasah	18 Madrasah	18 Madrasah	18 Madrasah	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	(Peserta dari Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Se Kabupaten Way Kanan)	Seksi Pendidikan Madrasah KEMENAG	APBN	RENSTRA Kementerian Agama Way Kanan		
6.	Pelatihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Kesiapan Aparatur daerah dan masyarakat terhadap bencana	01 05 03	Pelaksanaan Program Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana secara Bertahap, Berjenjang, dan Berlanjut.	Persentase aparaturnya daerah yang telah terlatih dalam layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	1 05 03 1.02	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	01.05.03.2.02.0010	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Blambangan Umpu	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RENSTRA KABUPATEN		
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				01.05.03.2.03	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Daerah Rawan Bencana	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RENSTRA KABUPATEN
										Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Daerah Rawan Bencana	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RENSTRA KABUPATEN
										Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Daerah Rawan Bencana	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RENSTRA KABUPATEN
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	01.05.03.2.03.0011	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Blambangan Umpu	Utama : BPBD Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RENSTRA KABUPATEN			
7.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial	01 06 06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	1.06.06.2.01	Penyediaan Makanan	1.06.06.2.01.0001	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00	15 Kecamatan	Utama: Dinas Sosial Pendukung : PT.Mardec Siger Way Kanan	APBD II dan Dan CSR Sebagian	RPJMD KABUPATEN		

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
					Jumlah Orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	1.06.06.2.01	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.06.06.2.01.0004	20 KK	20 KK	20 KK	20 KK	20 KK	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	15 Kecamatan	Dinas Sosial	APBD II	RPJMD KABUPATEN
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten	1.06.06.2.01	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.06.06.2.01.0005	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	15 Kecamatan	Dinas Sosial	APBD II	RPJMD KABUPATEN
8.	Program Pengembangan Perumahan (Pemulihan)	Persentase rehabilitasi rumah sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	01 04 02	Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	1 04 02 2.01	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.01 0010	Kegiatan	7 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	-	Rp20.000.000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD	RENSTRA
				1 04 02 2.01		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.01 0010	Kegiatan	7 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	-	Rp20.000.000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD	RENSTRA	
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kab/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program	1 04 02 202	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 202 0007	1 Orang	2 Orang	Orang	Orang	Orang	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD	RENSTRA

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.03 0009	10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	Rumah Tangga	Rumah Tangga	Rumah Tangga	Rp700.000,00	Rp700.000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD	RENSTRA
					Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 04 02 2.03 0010	Orang	20 Orang	Orang	Orang	Orang	-	Rp20.000,000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD	RENSTRA
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.04 0003	25 Rumah	25 Rumah	Rumah	Rumah	Rumah	Rp15.000,000,00	Rp15.000,000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD	RENSTRA
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.04 0002	25 Dokumen	25 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Rp10.000,000,00	Rp10.000,000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
					Kabupaten/Kota		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.04 0004	25 Dokumen	25 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD	RENSTRA
							Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 04 02 2.04 0005	25 Dokumen	25 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD	RENSTRA
							Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.04 0001	25 Dokumen	25 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD	RENSTRA
							Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 04 02 2.04 0006	25 Dokumen	25 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	-	-	-	Way Kanan	Dinas Perkimtan	APBD	RENSTRA
9.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan (Kopi)	3.27.05	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelatihan Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Kabupaten Kota	3.27.05.2.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.01	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	Rp305.000.000,00	Rp305.000.000,00	Rp305.000.000,00	Rp305.000.000,00	Rp305.000.000,00	Banjit, Kasui, Rebang tangkas, Blambangan Umpu, Negeri Agung, Umpu Semenguk dan Gunung Labuhan	Kelompok Tani	APBD	RPJMD KABUPATEN

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
							Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.02	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Banjir, Kasui, Rebang tangkas, Negara Batin, Blambangan Umpu, Negeri Besar, Negeri Agung, Umpu Semenguk dan Pakuan Ratu	Kelompok Tani	APBD	RPJMD KABUPATEN
10.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	01.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang Menyediakan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.02.02.2.02.0014	100%	100%	100%	100%	100%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rest area Gunung Labuhan dan Simpang Perikanan Way Tuba	Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas se Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RENSTRA
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang Menyediakan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	1.02.02.2.02	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02.0024	100%	100%	100%	100%	100%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Tentatif	Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas se Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD/RENSTRA
Isu Strategis 3 - Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan.																						
1.	Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	05 01 02	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase terpenuhinya penyusunan Perencanaan dan pendanaan	5.01.02.2.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	5.01.02.2.01.0001	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp77.500.000,00	Rp77.500.000,00	Rp77.500.000,00	Rp77.500.000,00	Rp77.500.000,00	Kab. Way Kanan	Bappeda Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD KABUPATEN

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.02.0003	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Kab. Way Kanan	Bappeda Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD KABUPATEN
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.02.0004	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp41.700.000,00	Rp41.700.000,00	Rp41.700.000,00	Rp41.700.000,00	Rp41.700.000,00	Kab. Way Kanan	Bappeda Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD KABUPATEN
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	5.01.03.2.02.0005	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp30.289.700,00	Rp30.289.700,00	Rp30.289.700,00	Rp30.289.700,00	Rp30.289.700,00	Kab. Way Kanan	Bappeda Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD KABUPATEN
							Asistensi Peny. Dok.Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.02.0006	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp20.269.700,00	Rp20.269.700,00	Rp20.269.700,00	Rp20.269.700,00	Rp20.269.700,00	Kab. Way Kanan	Bappeda Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD KABUPATEN
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.02.0007	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp53.819.700,00	Rp53.819.700,00	Rp53.819.700,00	Rp53.819.700,00	Rp53.819.700,00	Kab. Way Kanan	Bappeda Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD KABUPATEN

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.02.0008	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp101.300.000,00	Rp101.300.000,00	Rp101.300.000,00	Rp101.300.000,00	Rp101.300.000,00	Kab. Way Kanan	Bappeda Kab. Way Kanan	APBD	RPJMD KABUPATEN
2.	Koordinasi dan Kerjasama para pihak dalam penyelenggaraan sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase terselenggaranya sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim	01 04 02	Penyusunan Rencana sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase jumlah lokasi penyelenggaraan sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim	1 04 02 1.01	Mengidentifikasi wilayah rawan bencana	1 04 02 1.01 0011	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tintatif Kecamatan/ Kampung'	Utama : BMKG Pendukung: BPBD,BASARNAS, SKADRON-12 SERBU	APBN/APBD	RENSTRA
3.	Pengelolaan Hutan	Luas Tutupan Lahan	3.28.3	Pelaksanaan perlindungan hutan lindung dan hutan produksi	Luas hutan yang rusak	3.28.3.1.05	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	3.28.3.1.05 0002	437 Ha	437 Ha	437 Ha	437 Ha	437 Ha	Rp850.000.000,00	Rp850.000.000,00	Rp850.000.000,00	Rp850.000.000,00	Rp850.000.000,00	Way Kanan	KPH Bukit Punggur, KPH Muara Dua	APBN/APBD	RPJMD/RENSTRA/RPHJP
							Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	3.28.3.1.05 0003	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Rp443.000.000,00	Rp443.000.000,00	Rp443.000.000,00	Rp443.000.000,00	Rp443.000.000,00	Way Kanan	KPH Bukit Punggur, KPH Muara Dua	APBN/APBD	RPJMD/RENSTRA/RPHJP
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3.28.3.1.05 0004	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Way Kanan	KPH Bukit Punggur, KPH Muara Dua	APBN/APBD	RPJMD/RENSTRA/RPHJP
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3.28.3.1.05 0005	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Way Kanan	KPH Bukit Punggur, KPH Muara Dua	APBN/APBD	RPJMD/RENSTRA/RPHJP

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
4.	Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	Persentase penanggulangan bencana kebakaran yang tertangani	01 05 04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	01 05 04 2.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	04 2.01 0009	100%	-	-	-	-	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	WAY KANAN	SAT POL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	APBD	RPJMD KABUPATEN
				Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04 0009	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Way Kanan	BPBD PROVINSI LAMPUNG DAN BPBD WAY KANAN
5.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE	2.16.03	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	2.16.03.2.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.007	2,30 Poin	2,30 Poin	2,30 Poin	2,30 Poin	2,30 Poin	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Blambangan Umpu	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Operator NTPD 112	APBD	RPJMD KABUPATEN, RENSTRA KOMINFO WAY KANAN

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
6.	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Wirausaha	2.19.02	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Muda Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	2.19.02.2.01.01	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Way Kanan	Disporapar Way Kanan	APBD	RPJMN /RPJMD /RENSTRA
7.	Program perlindungan khusus Anak	Presentase Perlindungan Anak yang tertangani	02.08.07	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Anak Dan Perlindungan Perempuan	2.08.07.2.01	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	2.08.07.2.01.04	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Way Kanan	Dinas P3APPKB	APBD	RPJMD
8.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	02.08.06	Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.2.02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemerintah Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	2.08.06.2.02.04	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Way Kanan	Dinas P3APPKB	APBD	RPJMD

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI			
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029							
9.	Program Perlindungan Perempuan	Presentase Perlindungan Perempuan	02.08.03	Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Perempuan	2.08.03.2.03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	2.08.03.2.01.02	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Way Kanan	Dinas P3APPKB	APBD	RPJMD			
10.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	04.02.02	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penjaringan dan penyerapan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.02.02.2.05.02	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp30.343.750,00	Rp30.343.750,00	Rp30.343.750,00	Rp30.343.750,00	Rp30.343.750,00	Kabupaten Way Kanan	Bagian Fasilitas Pengawasan & Penganggaran	APBD	Renstra Sekretariat DPRD			
Isu Strategis 5 - Keterbatasan Sarana Prasarana dan anggaran Penanggulangan Bencana terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibum Linmas Sub- Urusan Bencana																									
1.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	01 03 02	Prasarana pengendalian daya rusak air yang direhabilitasi	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	1 03 02 2.01	Normalisasi Sungai/ Restorasi Sungai	1 03 02 2.01 0093	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp15.000.000.000,00	-	-	Rp15.000.000.000,00	-	Sungai Way Besay dan Way Umpu	BWWS	APBN	RPJMN /RPJMD /RENSTRA			
				Pemasangan sistem peringatan dini bahaya banjir / Flood Warning System	Jumlah pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini banjir yang berfungsi dengan baik	1 03 02 2.01	Pengadaan dan pemasangan sistem peringatan dini banjir dan bencana lainnya	1 03 02 2.01 0019	Unit	Unit	-	-	-	Rp500.000,00	Rp500.000,00						Sekretariat RAPI Kab. Way Kanan	Satgas RAPI dan Pemerintah Kampung	Swadaya/APB Kamp	RPJMD Kabupaten	
				Membangun Tanggul Banjir	Persentase panjang tanggul banjir yang akan dibangun	1 03 02 2.01	Melakukan pembangunan infrastruktur tanggul banjir	1 03 02 2.01 0115	100%	-	-	-	-	Rp60.494.712,00								Way Kanan dan Way Umpu	BBWS-MS, Dinas SDA	APBN	RPJMD Kabupaten
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang Tersedia	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.002	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00				Kabupaten WK dan/atau Daerah Rawan	Utama : Dishub Pendukung : Dinas PUPR	APBD	RPJMD Kabupaten

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
																		Bencana Sesuai Usulan				
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.27.03.2.02.0001	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Rp750.000.000,00	Rp750.000.000,00	Rp750.000.000,00	Rp750.000.000,00	Rp750.000.000,00	Kecamatan Pakuan Ratu, Bumi Agung, Negara Batin, Bahuga dan Banjit	Swakelola Kelompok Tani dan Penyedia Pihak Swasta	APBD	RPJMD Kabupaten
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung	3.27.03.2.02.0005	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Kecamatan Pakuan Ratu, Bumi Agung, Negara Batin, Bahuga dan Banjit	Swakelola Kelompok Tani dan Penyedia Pihak Swasta	APBD	RPJMD Kabupaten
				Melaksanakan pengadaan peralatan terkait peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Ketersedian peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan minimal cukup untuk 1 regu sesuai dengan yang tertera dalam permentan nomor 5 tahun 2018	-	mengidentifikasi jumlah ketersediaan peralatan karhutla sesuai dengan permentan no 5 tahun 2018	-	1 Regu	1 Regu	1 Regu	1 Regu	1 Regu	Rp115.000.000,00	Rp115.000.000,00	Rp115.000.000,00	Rp115.000.000,00	Rp115.000.000,00	Unit karet / sawit	Unit Kerja PTPN	Internal	RENSTRA
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	1.06.06.2.01	Penyiapan Sandang	1.06.06.2.01.0002	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00	15 Kecamatan	Dinas Sosial	APBD II	RPJMD KABUPATEN

Lanjutan Tabel V.1

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUB- KEGIATAN	NOMEN KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET/TAHUN PELAKSANAAN					PAGU ANGGARAN					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
3.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan Perda dan Perkada sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	01 05 02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase penyelesaian kasus terkait pengaduan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	01 05 02 2.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Tersedia	1 05 02 2.01 0007	Tahun 1 100%	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Rp70.000.000,00	-	-	-	-	WAY KANAN	SAT POL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	APBD	RPJMD KABUPATEN
4.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	05.02.02	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04.0009	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Kab Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Utama: BPKAD Pendukung : Sekretariat Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (APBD)	RPJMD KABUPATEN

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

VI.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah

Kerjasama atau kolaborasi pentahelix (Pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga usaha, dan media) dalam upaya penanggulangan bencana adalah sebuah upaya bersama dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara menyeluruh, yang mencakup tahap pra-bencana, saat bencana terjadi, dan pasca-bencana. Bagian ini menjelaskan strategi untuk mengintegrasikan berbagai pihak yang terlibat serta menyatukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan perencanaan lainnya. Selain itu, dijelaskan juga kerangka kerja pengendalian dan kerangka kerja evaluasi program dan rencana aksi penanggulangan bencana, sehingga semua tahapan dapat terkoordinasi dengan baik dan evaluasi dilakukan secara efektif.

Kolaborasi pentahelix memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan keberhasilan upaya penanggulangan bencana di berbagai kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Way Kanan. Namun, penting untuk dijelaskan bahwa partisipasi dan kontribusi tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak non-pemerintah di daerah tersebut. Ini mencakup organisasi dari sektor swasta, perguruan tinggi, kelompok masyarakat sipil, dan media. Dengan demikian, semua tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari persiapan hingga respons dan pemulihan, dapat melibatkan berbagai sektor dan memanfaatkan beragam sumber daya untuk mencapai tujuan yang lebih efektif.

Sinergi dan pemaduan antar pihak bertujuan untuk mengajak dan melibatkan baik pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk berkontribusi dalam mewujudkan aksi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif dari berbagai pihak dalam memperkuat ketangguhan atau didukung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPB.

Sehingga, kolaborasi ini menjadi penting untuk menyelaraskan upaya dari berbagai sektor dan memperkuat kesinambungan dalam penanggulangan bencana. Berikut merupakan Tabel VI.1 yang memuat rincian terkait pemaduan para pihak.

Tabel VI.1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
Dunia Usaha	PT. PLN (UP3 Kotabumi)	Memastikan respons cepat dan pemulihan layanan listrik yang efektif dalam situasi bencana, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat	Memastikan penormalan jalur aliran listrik di wilayah bencana	Sistem penyaluran bantuan berada dalam satu komando. Sehingga, tuntutan penanganan bencana atau korban dan pemulihan ekonomi serta dampak sosial yang ditangani dapat dilakukan dalam waktu bersamaan dengan lebih baik
	PT. Telkom	Memastikan respons cepat dan pemulihan layanan telekomunikasi yang efektif dalam situasi bencana, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat	Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat mengenai status layanan dan langkah-langkah yang diambil selama bencana.	
	Perum Bulog	Memastikan distribusi pangan yang cepat dan efektif dalam situasi bencana, demi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat	Melakukan pemenuhan stok pangan atau sembako untuk kebutuhan penanggulangan bencana	
	PTPN 1 Regional 7	Memastikan respons cepat dan pemulihan operasional yang efektif dalam situasi bencana, demi kelangsungan produksi dan kesejahteraan masyarakat	Memastikan infrastruktur produksi dan distribusi tahan bencana dengan melakukan pemeliharaan dan peningkatan berkala.	

Lanjutan Tabel VI.1

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Memastikan respons cepat dan pemulihan operasional yang efektif dalam situasi bencana, demi kelangsungan produksi dan kesejahteraan masyarakat	Bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara keseluruhan.	Berkontribusi pada upaya penanggulangan bencana di masyarakat sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
	PT. Mardec Siger	Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan perusahaan.	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanggulangan bencana, Melindungi karyawan dan masyarakat sekitar dari dampak bencana, dan Mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kondisi setelah terjadi bencana.	Menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dengan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.
	PT. Way Kanan Sawitindo			
	PT. Batu Tua Way Kanan Mineral			
	PT. Bangun Nusa Indah Lampung			
	PT. Palm Lampung Persada			
	PT. Kharisma Mangestitama			
Perguruan Tinggi	Universitas Lampung (UNILA) Way Kanan	Peningkatan kapasitas dan pengurangan dari resiko bencana	Melakukan perawatan terhadap daerah aliran sungai dan Meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan terhadap pengurangan risiko bencana.	Kolaborasi dalam kegiatan penanggulangan bencana
	STIT Al-Hikmah Way Kanan, dan Institut Al-Ma'arif Way Kanan.	Menjalankan Rencana Induk dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat	Melakukan penelitian pada bidang kebencanaan Merencanakan Penelitian/riset serta Organisasi Kemahasiswaan KSR	

Lanjutan Tabel VI.1

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
Organisasi Masyarakat Sipil	PMI	Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah	Membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
	Forum Camat	Mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.	Melakukan tindakan tanggap darurat saat terjadi bencana, termasuk evakuasi dan penyelamatan korban.	Memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi risiko dan dampak bencana.
	APDESI	Melindungi desa dari dampak bencana dan memberdayakan masyarakat desa untuk lebih siap menghadapi bencana.		
	Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)	mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam upaya tanggap darurat, pemulihan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penguatan sistem jaringan, organisasi, serta pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana.	Bekerja sama dengan sekolah, rumah sakit, pelajar, pemuda, perempuan, komunitas, media, dan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.	Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana.
	Karang Taruna	Mengembangkan potensi generasi muda dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.	Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan pemuda dan masyarakat terhadap bencana.	Mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana.
	LPBI NU	Mengelola risiko bencana melalui pendekatan berbasis komunitas dan kebijakan yang	Melakukan pemantauan terhadap potensi bencana dan evaluasi terhadap	Memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi risiko

Lanjutan Tabel VI.1

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
		berkelanjutan.	upaya penanggulangan yang telah dilakukan.	dan dampak bencana.
	RAPI	Memastikan respons cepat dan efektif dalam penanggulangan bencana, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat	Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat	Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan dilapangan
	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka	Memastikan kesiapsiagaan dan respons cepat demi keselamatan masyarakat	Layanan pengabdian masyarakat dalam kepedulian sosial dan kebencanaan	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
	PEMULA	Meningkatkan kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana melalui pendidikan dan pelatihan.	Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.	Mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana.
	WALHI	Mendorong perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan dan penanggulangan bencana.	Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan cara-cara mitigasi bencana.	Menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah bencana ekologis di masa depan
MEDIA	PWI, RRI SP, PWRI, dan IWO	Pada tahap kejadian bencana dan tanggap darurat, peran utama kantor berita adalah sebagai sumber informasi dan media komunikasi serta penghubung. Adapun pada masa pascabencana, kantor berita menjalankan peran	Menyampaikan informasi terkini bagi masyarakat, media, dan para pihak terkait mengenai perkembangan bencana yang terjadi serta penanganan yang telah dilakukan dari waktu ke waktu, baik selama	Meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanggulangan bencana.

Lanjutan Tabel VI.1

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
		pemantauan dan menyelenggarakan suatu dialog publik.	masa tanggap darurat maupun berbagai kegiatan penanggulangan bencana lainnya.	

VI.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPB perlu diintegrasikan dengan dokumen perencanaan daerah yang sudah ada. Pada Bab 2, telah diidentifikasi beberapa kesenjangan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau visi/misi kepala daerah, seperti penerapan prinsip Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan yang masih kurang, pencegahan dan mitigasi di daerah rawan bencana yang belum optimal, serta koordinasi antar pihak dalam penanggulangan bencana yang belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan pemaduan yang lebih komprehensif antara rencana-rencana yang ada untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di daerah.

Pemaduan ini dilakukan untuk mengoptimalkan dukungan-dukungan, pola kerjasama, dan sinkronisasi penganggaran yang memungkinkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat memperbaiki kesenjangan yang ada, terutama dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan. Untuk mewujudkan keterpaduan dan harmonisasi antara Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya serta perencanaan lainnya, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk dan berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Dengan demikian, semua program dapat berjalan selaras dan saling mendukung, meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penanggulangan bencana di

Kabupaten Way Kanan. Berikut merupakan pemaduan program atau sasaran RPB dalam perencanaan lainnya yang disajikan dalam Tabel VI.2 sebagai berikut.

Tabel VI.2 Pemaduan Program/Sasaran RPB dalam Perencanaan

No	Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMN/RPJMD	KONTRIBUSI	
1.	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan DAS	RIPB 2020-2044	Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan Evaluasi Penggunaan Lahan 2. Penyusunan Rencana Tata Ruang 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 4. Integrasi RTRW dengan Rencana Pengelolaan DAS
		RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Terwujudnya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, RPJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup	
			Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	
RTRW WAY KANAN 2023-2043	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang baik khusus kawasan sempadan sungai Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan			
2.	Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi tata kelola air yang telah dioptimalkan 2. Penguatan Tata Kelola Pengelolaan dan Manajemen Air 3. Penyusunan rencana sasaran prioritas dan titik lokasi Sosialisasi Kepada Masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam menjaga kelestarian alam dan kebersihan Daerah Aliran Sungai 4. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota 5. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota 6. Penyusunan Rencana Normalisasi Sungai, Penanaman tanaman penyangga di sepanjang aliran anak sungai
		RIPB 2020-2044	Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah	
			Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
			Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana	
RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan			
3.	Terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan hutan untuk mengurangi risiko bencana.	RPJMN 2020-2024	Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

Lanjutan Tabel IV.2

No	Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMN/RPJMD	KONTRIBUSI	
		RIPB 2020-2044	Terlaksananya dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Terwujudnya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, RPJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Terwujudnya sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup	
4.	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.	RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan	1. Reforestasi dan Penghijauan Kawasan Hutan Terdegradasi 2. Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 3. Penyusunan rencana sasaran prioritas dan titik lokasi Sosialisasi Kepada Masyarakat mengenai dampak deforestasi dan pentingnya partisipasi dalam upaya Reforestasi 4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
			Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian dan Perikanan	
5.	Memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	RIPB 2020-2044	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.	1. Penyusunan Kajian Perencanaan bencana yang terintegrasi 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 5. Pesantren siaga bencana 6. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 7. Pencegahan/deteksi dini terkait potensi bencana alam. 8. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/ Kota 9. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana	

Lanjutan Tabel IV.2

No	Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMN/RPJMD	KONTRIBUSI	
6.	Memperkuat upaya penanganan tanggap darurat bencana daerah	RPJMN 2020-2024	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4. Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah 5. Terlaksananya keluarga yang siap siaga dalam bencana alam 6. Penyusunan Rencana sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim 7. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 8. Pelatihan, Penyediaan alat kebakaran dan Pembuatan Menara Pantau api 9. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 10. Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota 11. Penguatan SDM Melalui Pelatihan Kesiapsiagaan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 12. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 13. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 14. Pengelolaan Pendidikan Madrasah Aliyah 15. Pelaksanaan Program Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana secara Bertahap, Berjenjang, dan Berlanjut. 16. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		RIPB 2020-2044	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	
		RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana	

Lanjutan Tabel IV.2

No	Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMN/RPJMD	KONTRIBUSI	
7.	Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	RIPB 2020-2044	Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kab/Kota 4. Pembangunan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota 5. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 6. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota 7. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	
8.	Terwujudnya rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	KLHS RPJPD 2025-2045	Terwujudnya Integrasi pengelolaan DAS Terpadu terkait dengan pembayaran jasa lingkungan (insentif disinsentif) dan kelembagaan antara kabupaten/Kota yang di hulu dengan di hilir;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
		RIPB 2020-2044	Terwujudnya sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.	
			Teroptimalkannya pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.	
		RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Terwujudnya peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.	
Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.				
			Terwujudnya misi dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.	

Lanjutan Tabel IV.2

No	Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMN/RPJMD	KONTRIBUSI	
9.	Meningkatnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	RIPB 2020-2044	Terwujudnya peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam) 3. Penyusunan Rencana Sosialisasi Informasi Prakiraan Cuaca Maupun Peringatan Dini Cuaca Ekstrim 4. Penyelenggaraan Kerjasama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 5. Pelaksanaan Program Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana secara Bertahap, Berjenjang, dan Berlanjut. 6. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 7. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8. Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 9. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 10. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 11. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
			Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.	
		RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	

Lanjutan Tabel IV.2

No	Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMN/RPJMD	KONTRIBUSI	
10.	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana pengendali daya rusak air yang direhabilitasi 2. Pemasangan sistem peringatan dini bahaya banjir / Flood Warning System 3. Membangun Tanggul Banjir 4. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 5. Pembangunan Prasarana Pertanian 6. Melaksanakan pengadaan terkait peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 10. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 11. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
		RIPB 2020-2044	Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
		RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Terwujudnya penanganan jalan pada saat tanggap darurat bencana	
Terwujudnya kondisi infrastruktur dasar yang baik				
11.	Memperkuat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana	RIPB 2020-2044	Terwujudnya pembiayaan penanggulangan bencana yang berbasis manajemen risiko keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

VI.3 Pengendalian dan Evaluasi

Seperti yang dipertegas di atas, kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah kegiatan kolektif yang melibatkan berbagai pihak (pentahelix), mulai dari proses penyusunan hingga pelaksanaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). RPB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah, sehingga penting bagi semua pihak untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB.

Guna memantau dan mensupervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi RPB agar mencapai tujuan dan sasarannya, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi yang efektif. Pengendalian dan evaluasi dalam rencana penanggulangan bencana ini mencakup proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, pengukuran dan penilaian hasil serta pencapaian target, serta identifikasi pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak positif yang maksimal dalam penanggulangan bencana.

Tata cara dalam pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berikut merupakan Tabel VI.3 yang berisi kerangka dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

Tabel VI.3 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase Pencapaian	Sekretariat Bersama Daerah
Per Tahun	Pemaduan para pihak, Pemaduan perencanaan lainnya, dan Pencapaian hasil	Efektivitas kerjasama. Tingkat kesesuaian RPB dengan rencana pembangunan daerah. Persentase target yang tercapai	Sekretariat Bersama Daerah
Per Tengah Periode	Review RPB dan Pencapaian Sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi dan	Sekretariat Bersama Daerah, Bappeda

Lanjutan Tabel VI.3

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/Evaluasi
		Rencana tindak lanjut pembelajaran.	
Per Akhir Periode	Pencapaian Sasaran dan Pencapaian Tujuan	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi dan Rencana tindak lanjut pembelajaran	Sekretariat Bersama Daerah, Bappeda

VI.3.1 Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) mencakup upaya-upaya pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul atau berpotensi muncul, sehingga tindakan korektif dapat diambil sedini mungkin.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) meliputi:

- a. Memastikan keterpaduan semua pihak yang terlibat (pentahelix).
- b. Menilai keselarasan program dan kegiatan/rencana aksi dengan perencanaan lainnya.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya rencana aksi.
- d. Merumuskan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan.

Kegiatan pengendalian dilakukan secara periodik, baik setiap semester maupun setiap tahun. Pemantauan per semester bertujuan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pemantauan tahunan bertujuan untuk menilai sejauh mana keterpaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakterlaksanaan rencana, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjut.

Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi yang terstruktur dan periodik ini akan memastikan bahwa pelaksanaan RPB tetap berada di jalur yang benar dan dapat mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan format Tabel VI.4 dan Tabel VI.5 berikut ini.

Tabel VI.4 Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi Pengurangan Bencana

No.	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Keluaran	Capaian Target Tahun ke-					Catatan
			1	2	3	4	5	
A. Tahunan								
1.	Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.	Indikator Kinerja tidak terkait pelayanan dasar							
3.	Indikator Kinerja Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat.							
4.	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran							
B. Tengah Periode								
	Review RPB	Jumlah pemutakhiran RPB sejak awal						
C. Akhir Periode								
	Pencapaian Sasaran	Capaian Indikator Keluaran setiap tahunnya pada setiap materi pemantauan						
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa Membangun						

Lanjutan Tabel VI.4

No.	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Keluaran	Capaian Target Tahun ke-					Catatan
			1	2	3	4	5	
2.	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)						
3.	Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat.	Indeks Risiko Bencana						
		Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran						
4.	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran.	Wilayah manajemen kebakaran (WMK) /Jumlah luas Kabupaten x 100%						

Tabel VI.5 Format Rencana Pemantauan per-Semester Pelaksanaan Aksi Pengurangan Bencana

Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> Indikator Kinerja pemberdayaan masyarakat dan Desa. indikator Kinerja Tidak Terkait Pelayanan Dasar. Indikator kinerja ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran 	Catatan hasil Workshop File Softcopy Dokumen	Workshop Pengecekan Ketersediaan Dokumen	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah
Tengah Periode	Review RPB Tahunan	Notulensi hasil FGD	FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappeda
Akhir Periode	Capaian target kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Notulensi hasil FGD	FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappeda

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) mencakup upaya-upaya pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan pemantauan dan supervisi merupakan proses untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi yang terstruktur dan periodik ini akan memastikan bahwa pelaksanaan RPB tetap berada di jalur yang benar dan dapat mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanggulangan bencana serta memastikan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat.

VI.3.2 Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu;

- a. Analisis kesenjangan antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai.

- b. Analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan
- c. Pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan.

Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mechanisme lain yang sudah ada di daerah. Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode:

- a. Evaluasi Semester, dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dan berfokus pada pengukuran serta penilaian pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi per semester dilakukan oleh Sekretariat Daerah Bersama.
- b. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan untuk mengukur dan menilai integrasi para pihak yang terlibat, keterpaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasil evaluasi tahunan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana aksi atau kegiatan untuk tahun berikutnya. Evaluasi tahunan juga dilakukan oleh Sekretariat Daerah Bersama.
- c. Evaluasi Tengah Periode, dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan rencana aksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.
- d. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau berfokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung pencapaian tujuan RPB serta pembelajaran dari penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang periode lima tahun.

Kesimpulan dan rekomendasi dari evaluasi ini digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB untuk periode berikutnya. Evaluasi akhir periode ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Dengan demikian, proses evaluasi yang terstruktur ini memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan RPB dapat diukur, dinilai, dan disesuaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini: Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dapat menggunakan format Tabel VI.6, Tabel VI.7, Tabel VI.8 dan Tabel VI.9 sebagai berikut.

Tabel VI.6 Format Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana

Waktu Evaluasi	Kriteria/Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Desa Membangun 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 3. Indeks Risiko Bencana 4. indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran 5. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)/jumlah luas kabupaten x 100% 	Catatan hasil Workshop File Softcopy dokumen	Workshop Pengecekan Ketersediaan Dokumen	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah
Tengah Periode	Jumlah pemutakhiran RPB sejak tahun awal	Notulensi hasil FGD	FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappelitbang
Akhir Periode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Indeks Desa Membangun tahun 2026 2. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2026 3. Capaian Indeks Risiko Bencana tahun 2026 4. Capaian Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran tahun 2026 5. Capaian Wilayah manajemen kebakaran (WMK)/Kabupaten x 100% tahun 2026 	Notulensi hasil FGD	FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappelitbang

Tabel VI.7 Format Penyajian Hasil Evaluasi Tahunan

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak lanjut	Pembelajaran
1.	Indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa.						
2.	Indikator kinerja tidak terkait pelayanan dasar.						
3.	Indikator kinerja ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.						
4.	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran						

Tabel VI.8 Format Penyajian Hasil Evaluasi Tengah Periode

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak lanjut	Pembelajaran
1.	Review RPB Tahunan	Dokumen RPB/tahunan	Jumlah Pemutakhiran RPB sejak tahun 2023-2025				

Tabel VI.9 Format Penyajian Hasil Evaluasi Tahunan

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak lanjut	Pembelajaran
1.	Pemberdayaan masyarakat dan desa		Capaian Indeks Desa membangun tahun 2026				
2.	Tidak Terkait pelayanan dasar		Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2026				

Lanjutan Tabel VI.9

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak lanjut	Pembelajaran
3.	Ketentraman , Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		Capaian Indeks Risiko Bencana tahun 2026				
			Capaian Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran tahun 2026				
4.	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran		Capaian Wilayah manajemen kebakaran (WMK) / jumlah luas kabupaten x 100% tahun 2026				

Rencana Penyelenggaraan PB (RPB) melibatkan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah, termasuk organisasi non pemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat, dan lainnya. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan (MEP) mencakup semua pihak terkait dengan pelaksanaan RPB.

Capaian kegiatan dan aksi dalam RPB dijabarkan melalui indikator dan sasaran kinerja. Evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan dengan rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis, menyeluruh, objektif, dan transparan. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun laporan dan rekomendasi perencanaan untuk kegiatan dan aksi RPB berikutnya.

Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RPB ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi tersebut. Pemantauan juga dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi

penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap dua tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan oleh masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah dan diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD, dengan laporan yang disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun, yang kemudian menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara itu, laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap dua tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap lima tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas, dengan BPBD melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Lampung dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kabupaten Way Kanan memerlukan komitmen yang kuat, baik secara politis maupun teknis. Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan, RPB berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Penguatan RPB akan diwujudkan dalam bentuk aturan daerah, minimal melalui Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan. Langkah ini juga merupakan salah satu indikator pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana. Selain itu, langkah ini mendukung proses pengarusutamaan RPB ke dalam perencanaan anggaran daerah, sehingga RPB dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif.

Dokumen RPB harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan di Kabupaten Way Kanan, perubahan lingkungan, serta kemajuan yang mempengaruhi profil risiko bencana. Evaluasi ini penting agar dokumen tetap relevan dan efektif dalam menghadapi berbagai resiko bencana yang ada. Selain evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanggulangan bencana. Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya juga harus mencakup langkah-langkah penanggulangan bencana yang terstruktur. Hal ini memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Way Kanan.

Upaya lain yang diharapkan dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Melalui strategi pengarusutamaan ini, kerjasama antara semua pihak akan menjadi lebih solid dan terkoordinasi, sehingga terbentuk dan terpeliharanya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kabupaten Way Kanan. Kerjasama ini mencakup berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi

masyarakat, untuk memastikan bahwa seluruh aspek penanggulangan bencana dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. 2007. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Jakarta.
- BNPB. 2023. IRBI : Indeks Risiko Bencana Indonesia. Jakarta.
- BNPB. 2021. Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Jakarta.
- BNPB. 2020. Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024. Jakarta.
- BNPB. 2020. Rencana Aksi Nasional Untuk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024. Jakarta.
- BNPB. 2020. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2044. Jakarta.
- PEMKAB Way Kanan. 2023. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan. Provinsi Lampung.
- PEMKAB Way Kanan.2021. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.Kabupaten Way Kanan.
- PEMKAB Way Kanan.2023. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.Kabupaten Way Kanan.
- PEMKAB Way Kanan.2023. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 .Kabupaten Way Kanan
- PEMKAB Way Kanan. 2023. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Kabupaten Way Kanan.
- Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan kerja organisasi lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri.

LAMPIRAN

